



Pemerintah Kabupaten
Purbalingga

LPPD



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat tersusun tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja yang terdiri atas :

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sebagai gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan komprehensif serta memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan ruang lingkup pelaporan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang meliputi Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;
- c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang berisi Tugas Pembantuan



- Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten dan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten;
- d. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang berisi Penerapan dan Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
 - e. Penutup.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagai wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 30 Maret 2026

BUPATI PURBALINGGA,



H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	Vi
DAFTAR GAMBAR.....	Xi
DAFTAR GRAFIK.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Penjelasan Umum.....	I.1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I.21
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I.64
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II.1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II.1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II.3
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci.....	II.4
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.16
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II.19
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	III.3
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten.....	III.3
3.1.1 Target Kinerja.....	III.3
3.1.2 Realisasi.....	III.3
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Kabupaten.....	III.52
3.2.1 Target Kinerja.....	III.7
3.2.2 Realisasi.....	III.7
3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III.12
3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III.12
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
4.1 Urusan Pendidikan.....	IV.1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.1
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	IV.1
4.1.3 Realisasi.....	IV.2
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV.4



4.1.5	Dukungan Personil.....	IV.4
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.5
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV.6
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.6
4.2.2	Target Pencapaian SPM.....	IV.8
4.2.3	Realisasi.....	IV.17
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV.32
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV.34
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.34
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.38
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.38
4.3.2	Target Pencapaian SPM.....	IV.39
4.3.3	Realisasi.....	IV.40
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV.43
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV.43
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.43
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV.44
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.44
4.4.2	Target Pencapaian SPM.....	IV.45
4.4.3	Realisasi.....	IV.46
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV.47
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV.47
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.47
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	IV.48
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.48
4.5.2	Target Pencapaian SPM.....	IV.48
4.5.3	Realisasi.....	IV.55
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV.67
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV.68
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.68
4.6	Urusan Sosial.....	IV.70
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.70
4.6.2	Target Pencapaian SPM.....	IV.71
4.6.3	Realisasi.....	IV.74

4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV.79
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV.80
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV.80
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV.80
4.7.1	Urusan Pendidikan.....	IV.80
4.7.2	Urusan Kesehatan.....	IV.82
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.82
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV.82
4.7.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	IV.83
4.7.6	Urusan Sosial.....	IV.85
BAB V PENUTUP.....		V.1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga.....	I.5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Janis Kelamin Tahun 2025.....	I.11
Tabel 1.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupeten Purbalingga Tahun 2025.....	I.11
Tabel 1.4	Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	I.12
Tabel 1.5	Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan Se Kab. Purbalingga.....	I.13
Tabel 1.6	Daftar Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.....	I.14
Tabel 1.7	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	I.16
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025.....	I.18
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025.....	I.19
Tabel 1.10	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025.....	I.21
Tabel 1.11	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	I.29
Tabel 1.12	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	I.40
Tabel 1.13	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	I.41
Tabel 1.14	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Target Tahun 2025 pada RKPD Tahun 2025...	I.59
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Purbalingga.....	II.1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome).....	II.4
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.16
Tabel 2.4	Target Kinerja Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025.....	II.20
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.....	II.21
Tabel 2.6	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II.22
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025.....	II.22
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025.....	II.23



Tabel 2.9	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II.24
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II.25
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026.....	II.26
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029.....	II.26
Tabel 2.13	Realisasi Anggaran 2025.....	II.28
Tabel 2.14	Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran.....	II.39
Tabel 2.15	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II.40
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean government)...	II.42
Tabel 2.17	Nilai IRH Berdasarkan Variabel.....	II.44
Tabel 2.18	Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.....	II.44
Tabel 2.19	Indeks BerAKHLAK Tahun 2024.....	II.46
Tabel 2.20	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.....	II.47
Tabel 2.21	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Per Dimensi Profesionalitas Tahun 2025.....	II.48
Tabel 2.22	Nilai Penilaian Mandiri Merit Sistem Tahun 2025.....	II.49
Tabel 2.23	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	II.51
Tabel 2.24	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.....	II.51
Tabel 2.25	Penilaian eksternal dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola/ pengelolaan arsip.....	II.52
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.....	II.53
Tabel 2.27	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	II.53
Tabel 2.28	Capaian Indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas.....	II.55
Tabel 2.29	Potensi konflik.....	II.56
Tabel 2.30	Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga.....	II.57
Tabel 2.31	Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024	II.57
Tabel 2.32	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024...	II.60
Tabel 2.33	Kejadian Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024...	II.60
Tabel 2.34	Dampak Bencana tahun 2022-2025.....	II.61
Tabel 2.35	Kerugian akibat bencana tahun 2021 – 2025.....	II.62

Tabel 2.36	Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.....	II.63
Tabel 2.37	Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2025.....	II.64
Tabel 2.38	Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum...	II.71
Tabel 2.39	Rumah Tinggal Yang Mempunyai Akses Sanitasi.....	II.72
Tabel 2.40	Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga.....	II.74
Tabel 2.41	Penanganan Kawasan Kumuh tingkat Kabupaten.....	II.75
Tabel 2.42	Jumlah Rumah dan RTLH di Kabupaten Purbalingga.....	II.76
Tabel 2.43	Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	II.77
Tabel 2.44	Capaian Indeks Pembangunan Manusia.....	II.79
Tabel 2.45	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, tahun 2016-2025.....	II.79
Tabel 2.46	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2016-2024.....	II.80
Tabel 2.47	Persebaran Tenaga Kesehatan.....	II.82
Tabel 2.48	Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenisnya.....	II.82
Tabel 2.49	Rasio Dokter.....	II.83
Tabel 2.50	Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.....	II.83
Tabel 2.51	Peserta Jaminan Kesehatan.....	II.84
Tabel 2.52	Angka Kematian Bayi.....	II.87
Tabel 2.53	Angka kematian Balita.....	II.89
Tabel 2.54	Indeks Kesehatan Keluarga.....	II.90
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender.....	II.95
Tabel 2.56	IPG Jawa Tengah dan Purbalingga.....	II.95
Tabel 2.57	Indek Pemberdayaan Gender.....	II.96
Tabel 2.58	IDG Berdasarkan Komponen Penyusun.....	II.96
Tabel 2.59	Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak.....	II.97
Tabel 2.60	Capaian Pertumbuhan Ekonomi.....	II.99
Tabel 2.61	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025.....	II.100
Tabel 2.62	Nilai PDRB Per Kapita.....	II.101
Tabel 2.63	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah).....	II.102
Tabel 2.64	PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024.....	II.103

Tabel 2.65	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2025 (miliar rupiah).....	II.104
Tabel 2.66	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2025 (miliar rupiah).....	II.104
Tabel 2.67	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II.105
Tabel 2.68	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	II.106
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa.....	II.109
Tabel 2.70	Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga.....	II.110
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2025.....	II.111
Tabel 2.72	V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten.....	II.112
Tabel 2.73	Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga....	II.114
Tabel 2.74	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga.....	II.115
Tabel 2.75	Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga.....	II.116
Tabel 2.76	Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II.116
Tabel 2.77	Capaian Kinerja sasaran Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II.117
Tabel 2.78	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya.....	II.119
Tabel 2.79	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024 (miliar rupiah).....	II.119
Tabel 2.80	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya.....	II.120
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan.....	II.120
Tabel 2.82	Capaian Pertumbuhan Ekonomi.....	II.125
Tabel 2.83	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah).....	II.126
Tabel 2.84	PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024.....	II.127
Tabel 2.85	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II.127
Tabel 2.86	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	II.128
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2025.....	II.130

Tabel 2.88	Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR.....	II.131
Tabel 2.89	Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan.....	II.132
Tabel 2.90	Capaian Indeks Pembangunan Manusia.....	II.134
Tabel 2.91	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2016 – 2024.....	II.134
Tabel 2.92	Dimensi penilaian Indeks Pembangunan Olahraga.....	II.135
Tabel 2.93	Angka kematian Balita.....	II.139
Tabel 2.94	Capaian Pengobatan dan Penemuan Tuberkulosis, ODHIV VL Tersuspensi 95% di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	II.141
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat..	III.5
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi.....	III.9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Purbalingga.....	I.3
Gambar 2.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024.....	II.45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025.....	II.65
Grafik 2.2	Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga.....	II.66
Grafik 2.3	Indeks Ketahanan Pangan.....	II.70
Grafik 2.4	Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025..	II.81
Grafik 2.5	Angka Kematian Ibu Tahun 2025.....	II.86
Grafik 2.6	Trend Kematian Ibu Tahun 2021 – 2025.....	II.86
Grafik 2.7	Tren Angka Kematian Bayi Tahun 2021 – 2025.....	II.88
Grafik 2.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga.....	II.92
Grafik 2.9	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025.....	II.93
Grafik 2.10	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025.....	II.94
Grafik 2.11	Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga.....	II.107
Grafik 2.12	Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025..	II.137
Grafik 2.13	Angka Kematian Ibu Tahun 2025.....	II.137
Grafik 2.14	Trend Kematian Ibu Tahun 2021 – 2025.....	II.138
Grafik 2.15	Tren Angka Kematian Bayi Tahun 2021 – 2025.....	II.138
Grafik 2.16	Tren Angka Kematian Balita Tahun 2021-2025.....	II.140



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 29);
 12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 33);
 13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 43);
 14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 49);
 15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 63).

Pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga berada di wilayah Kecamatan Purbalingga. Jarak dari Kabupaten Purbalingga ke beberapa kota di sekitarnya adalah :

Purbalingga – Semarang	:	191 Km
Purbalingga – Purwokerto	:	20 Km
Purbalingga – Cilacap	:	60 Km
Purbalingga – Banjarnegara	:	45 Km
Purbalingga – Wonosobo	:	75 Km
Purbalingga – Pemalang	:	55 Km

2. Kondisi Topografis

Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut, dan menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- b. Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- c. Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- d. Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- e. Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai kondisi topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya yaitu :

- a. Bagian utara, merupakan wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan/kemiringan lebih dari 40%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari,

- Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet;
- b. Bagian tengah, merupakan wilayah dengan kelerengan 25%-40%, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari;
 - c. Bagian selatan, merupakan wilayah yang relatif rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0-25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kaligondang, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi batuan yang terdiri dari *alluvium* endapan rawa dan danau yang tersusun oleh lempung, endapan *alluvium* gunung api, lava andesit, endapan vulkanik, batu pasir, napal, napal lempungan dan napal *globigerina*. Struktur tanah bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan, yang terdiri dari tanah alluvial, latosol, andosol, gromosol, dan regosol. Jenis dan penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

No.	Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
1.	I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
2.	II	Latosol	Sedang/Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karangmoncol, Rembang
3.	III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non	Tinggi/Kurang Peka	-

No.	Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
		caltic brown, mediteran.		
4.	IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
5.	V	Regosol, litosol, organosol, renzina	Amat Sangat Tinggi/Sangat Peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

4. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C – 33°C.

5. Kondisi Hidrologi

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Sungai Ponggawa
- b. Sungai Gemuruh
- c. Sungai Kajar
- d. Sungai Lembereng
- h. Sungai Tungtunggunung
- i. Sungai Laban
- j. Sungai Kuning
- k. Sungai Wotan

- | | |
|------------------|-------------------|
| e. Sungai Tlahab | l. Sungai Gintung |
| f. Sungai Soso | m. Sungai Tambra |
| g. Sungai Lebak | n. Sungai Muli |

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah. Struktur perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu PPK dan PPL.

Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga; dan Perkotaan Bobotsari. Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Sedangkan Kecamatan Bukateja, Rembang, dan Karangreja didorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha meliputi Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Karangjambu, Karangmoncol, Karangreja, Kertanegara, Kutasari, Mrebet dan Rembang. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.

- b. Kawasan perlindungan setempat

Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai

Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tungtunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Gringsing, dan Sungai Muli. Sedangkan untuk Rencana pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berada di Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk di dalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 Ha. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.

d. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan kawasan budidaya seluas 66.617 Ha terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 Ha meliputi hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 Ha dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 Ha.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas $\pm$ 15.694 Ha yang terdiri dari lahan sawah

beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas ± 6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten seluas 1.453 Ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (agroforestri) seluas ± 17.564 Ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

c. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Kalimanah, Bojongsari dan Padamara.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari, sebagian wilayah Kecamatan Karangreja dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

e. Kawasan peruntukan industri

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 Ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkong, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

- f. Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.
- g. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 Ha. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 Ha yang meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 Ha meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan
Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 Ha yang terdiri dari Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga di Kecamatan Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma di Kecamatan Purbalingga, Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari, Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari, Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja, dan Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin berdasarkan data kependudukan periode semester I Tahun 2025 hasil validasi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA					
No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah Penduduk Per Kecamatan
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	33.03.01	KEMANGKON	34.046	33.613	67.659
2	33.03.02	BUKATEJA	42.121	41.266	83.387
3	33.03.03	KEJOBONG	27.793	27.357	55.150
4	33.03.04	KALIGONDANG	35.599	34.989	70.588
5	33.03.05	PURBALINGGA	29.923	30.061	59.984
6	33.03.06	KALIMANAH	30.082	29.649	59.731
7	33.03.07	KUTASARI	36.263	34.781	71.044
8	33.03.08	MREBET	43.085	41.421	84.506
9	33.03.09	BOBOTSARI	28.642	27.785	56.427
10	33.03.10	KARANGREJA	25.563	24.429	49.992
11	33.03.11	KARANGANYAR	22.552	21.345	43.897
12	33.03.12	KARANGMONCOL	32.131	30.405	62.536
13	33.03.13	REMBANG	37.524	35.612	73.136
14	33.03.14	BOJONGSARI	34.520	33.132	67.652
15	33.03.15	PADAMARA	24.221	24.026	48.247
16	33.03.16	PENGADEGAN	22.333	22.038	44.371
17	33.03.17	KARANGJAMBU	15.658	14.560	30.218
18	33.03.18	KERTANEGARA	20.428	19.454	39.882
JUMLAH			542.484	525.923	1.068.407

Sumber : Dinpendukcapil Kab.Purbalingga Tahun 2025

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat prtambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5
1	KEMANGKON	66.878	67.659	1,17
2	BUKATEJA	82.466	83.387	1,12

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
3	KEJOBONG	54.257	55.150	1,65
4	KALIGONDANG	69.518	70.588	1,54
5	PURBALINGGA	59.418	59.984	0,95
6	KALIMANAH	58.866	59.731	1,47
7	KUTASARI	69.996	71.044	1,50
8	MREBET	83.132	84.506	1,65
9	BOBOTSARI	56.011	56.427	0,74
10	KARANGREJA	49.069	49.992	1,88
11	KARANGANYAR	43.383	43.897	1,18
12	KARANGMONCOL	61.749	62.536	1,27
13	REMBANG	72.235	73.136	1,25
14	BOJONGSARI	66.486	67.652	1,75
15	PADAMARA	47.460	48.247	1,66
16	PENGADEGAN	43.565	44.371	1,85
17	KARANGJAMBU	29.674	30.218	1,83
18	KERTANEGARA	38.685	39.882	3,09
JUMLAH		1.053.565	1.068.407	1,41

Sumber : Dinpendukcapil Kab.Purbalingga Tahun 2025

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebarab penduduk yang meunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 4 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Julah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5
1	KEMANGKON	48,46	67.659	1,396
2	BUKATEJA	44,96	83.387	1,855
3	KEJOBONG	40,14	55.150	1,374
4	KALIGONDANG	51,44	70.588	1,372
5	PURBALINGGA	15,66	59.984	3,830
6	KALIMANAH	23,24	59.731	2,570

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5
7	KUTASARI	37,81	71.044	1,879
8	MREBET	51,43	84.506	1,643
9	BOBOTSARI	35,54	56.427	1,588
10	KARANGREJA	62,01	49.992	8,06
11	KARANGANYAR	35,21	43.897	1,247
12	KARANGMONCOL	71,98	62.536	8,69
13	REMBANG	98,79	73.136	7,40
14	BOJONGSARI	44,99	67.652	1,504
15	PADAMARA	17,9	48.247	2,695
16	PENGADEGAN	41,25	44.371	1,076
17	KARANGJAMBU	48,95	30.218	6,17
18	KERTANEGARA	36,01	39.882	1,108
JUMLAH		805,76	1.068.407	1.326

Sumber : Dinpendukcapil Kab.Purbalingga Tahun 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.554 Rukun Warga (RW), dan 5.125 Rukun Tetangga (RT). Jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 5 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan Se Kab. Purbalingga

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	KEMANGKON	19		19
2	BUKATEJA	14		14
3	KEJOBONG	13		13
4	KALIGONDANG	18		18
5	PURBALINGGA	2	11	13
6	KALIMANAH	14	3	17
7	KUTASARI	14		14
8	MREBET	19		19
9	BOBOTSARI	16		16
10	KARANGREJA	7		7
11	KARANGANYAR	13		13
12	KARANGMONCOL	11		11

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
13	REMBANG	12		12
14	BOJONGSARI	13		13
15	PADAMARA	13	1	14
16	PENGADEGAN	9		9
17	KARANGJAMBU	6		6
18	KERTANEGARA	11		11
JUMLAH		224	15	239

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebagaimana daftar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 6 Daftar Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA OPD	TIPE	DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
2	Sekretariat DPRD	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
3	Inspektorat Daerah Kabupaten	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
5	Badan Keuangan Daerah	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
6	BKPSDM	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Intensitas Besar	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Satuan Pendidikan SD-SMP Satu Atap	-	Perbup Purbalingga Nomor 117 Tahun 2017
	b. UPTD Satuan Pendidikan SMPN	-	Perbup Purbalingga Nomor 12 tahun 2018
	c. Koorwilcam Dindikbud	-	Perbup Purbalingga Nomor 34 tahun 2018

NO	NAMA OPD	TIPE	DASAR HUKUM
9	DINSOSDALDUKKBP3A	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. Satuan Pelayanan KB Kecamatan	-	Perbup Purbalingga Nomor 35 Tahun 2018
	b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Perbup Purbalingga Nomor 257 Tahun 2023
10	Dinas Pertanian	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan	-	Perbup Purbalingga Nomor 113 Tahun 2017
	b. UPTD Pembenihan	-	Perbup Purbalingga Nomor 111 Tahun 2017
	c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	-	Perbup Purbalingga Nomor 95 Tahun 2016
11	Satpol PP	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
12	Dinas Kesehatan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	-	Perbup Purbalingga Nomor 107 Tahun 2016
	b. UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten (LABKESKAB)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 114 Tahun 2017
	c. RSUD Panti Nugroho	-	Perbup Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019
	d. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Khusus	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
13	Dinas Tenaga Kerja	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Balai Latihan Kerja	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 112 Tahun 2017
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
16	Dinas Perhubungan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Wilayah (PJ21 Wilayah)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 110 Tahun 2017
18	Dinas Lingkungan Hidup	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016

NO	NAMA OPD	TIPE	DASAR HUKUM
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
21	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Budidaya Ikan Air Tawar (UPTD BIAT)	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 115 Tahun 2017
23	Dinas Perumahan dan Permukiman	B	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	a. UPTD Pasar :		Perbup Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018
	- Wilayah 1	Klasifikasi A	
	- Wilayah 2 dan 3	Klasifikasi B	
	b. UPTD Pengembangan Industri Logam	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018
	c. Metrologi Legal	Klasifikasi A	Perbup Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018
25	Dinas Koperasi dan UKM	C	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
27	BPBD	Klasifikasi A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025
28	18 Kecamatan	A	Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
	Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan	-	

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025*

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 yang berada di setiap Perangkat Daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 7 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	RINCIAN		JML ASN
			PNS	PPPK	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan Kebudayaan	77	1	78

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	RINCIAN		JML ASN
			PNS	PPPK	
2	Korwilcam, Guru SMP dan SD		3155	2143	5298
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan	92	3	95
4	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata		349	115	464
5	UPTD RSUD Panti Nugroho		84	81	165
6	UPTD Puskesmas se Kab. Purbalingga dan UPTD Lab Kes Kab. Purbalingga		684	337	1021
7	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	21	2	23
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibunlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kebakaran	35	2	37
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibunlinmas Sub Urusan Kebencanaan	11	3	14
10	DinsosdaldukBKP3A	Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26	1	27
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67	2	69
12	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	20	2	22
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Pangan, Perikanan	29	2	31
14	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	77	1	78
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	2	23
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Desa	22	0	22
17	Dinas Perhubungan	Perhubungan	35	0	35
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi Informatika Persandian	37	1	38
19	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi UKM	15	0	15
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	19	2	21
21	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16	1	17
22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan Perpustakaan	12	4	16
23	Dinas Pertanian	Pertanian	132	61	193
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian Perdagangan	44	2	46
	Pasar Daerah se Kab. Purbalingga		9	0	9

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	RINCIAN		JML ASN
			PNS	PPPK	
25	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	134	9	143
26	Sekretariat DPRD	Fungsi Pendukung	19	1	20
26	Inspektorat Daerah	Bidang Pengawasan	47	1	48
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bidang Perencanaan dan Penelitian	28	1	29
28	Badan Keuangan Daerah	Bidang Keuangan	64	0	64
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Kepegawaian	37	0	37
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bidang Pemerintahan Umum	11	2	13
30	Kecamatan Bobotsari	Unsur Kewilayahan	8	0	8
31	Kecamatan Bojongsari	Unsur Kewilayahan	9	0	9
32	Kecamatan Bukateja	Unsur Kewilayahan	10	0	10
33	Kecamatan Kaligondang	Unsur Kewilayahan	8	0	8
34	Kecamatan Kalimanah	Unsur Kewilayahan	8	0	8
	3 kelurahan	Unsur Kewilayahan	16	3	19
35	Kecamatan Karanganyar	Unsur Kewilayahan	7	0	7
36	Kecamatan Karangjambu	Unsur Kewilayahan	11	0	11
37	Kecamatan Karangmoncol	Unsur Kewilayahan	8	0	8
38	Kecamatan Karangreja	Unsur Kewilayahan	7	0	7
39	Kecamatan Kejobong	Unsur Kewilayahan	8	0	8
40	Kecamatan Kemangkon	Unsur Kewilayahan	8	0	8
41	Kecamatan Kertanegara	Unsur Kewilayahan	7	0	7
42	Kecamatan Kutasari	Unsur Kewilayahan	8	0	8
43	Kecamatan Mrebet	Unsur Kewilayahan	11	0	11
44	Kecamatan Padamara	Unsur Kewilayahan	8	0	8
	1 kelurahan		6	0	6
45	Kecamatan Pengadegan	Unsur Kewilayahan	10	0	10
46	Kecamatan Purbalingga	Unsur Kewilayahan	8	0	8
	11 kelurahan		57	4	61
47	Kecamatan Rembang	Unsur Kewilayahan	10	0	10
TOTAL			5662	2789	8451

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2025 kondisi *unaudited* secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.096.179.854.000,00	2.131.230.727.315,43	101,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.414.333.000,00	441.601.641.649,43	101,18
4.1.01	Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,83
4.1.02	Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	203.315.671.694,46	103,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.499.406.635,97	100,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,81
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.544.544.170.000,00	1.570.885.087.381,00	101,70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,27
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,27
	JUMLAH PENDAPATAN	2.096.179.854.000,00	2.131.230.727.315,43	101,67

Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga Tahun 2025

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2025 kondisi *unaudited* secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5	BELANJA DAERAH	2.150.822.651.000,00	2.082.109.182.519,01	96,80
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.195.266.000,00	1.538.934.703.103,01	96,83

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.600.996.000,00	1.007.119.990.576,00	97,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,18
5.1.04	Belanja Subsidi	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33
5.1.05	Belanja Hibah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,26
5.2	BELANJA MODAL	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000,00	693.289.970,00	99,04
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,73
5.4	BELANJA TRANSFER	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,33
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,55
	JUMLAH BELANJA	2.150.822.651.000,00	2.082.109.182.519,01	96,80
	SURPLUS/DEFISIT	54.642.797.000,00	49.121.544.796,42	- 89,89

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 pada sisi penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu serta Pencairan Dana Cadangan. Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri atas penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Gambaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan Sebelumnya sebesar Rp.15.000.000.000,- dan sesudahnya menjadi Rp.55.705.297.000,- yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebelumnya sebesar Rp.1,062,500,000,- dan sesudahnya menjadi Rp.1,062,500,000,- terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

Tabel 1. 10 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	103.764.341.907,47	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam Pencapaian visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dalam skala tahunan, tentunya tidak terlepas pada persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan melihat pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (*strength*) yang dimiliki di daerah namun belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*Opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dilihat dari berbagai aspek, maka masalah utama Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Kualitas Manusia yang Belum Optimal

Berdasarkan permasalahan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Bahkan masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata. Disamping itu, penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten. Literasi juga menjadi permasalahan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya re-aktivasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kecamatan, sehingga minat membaca masyarakat meningkat.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik yaitu masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Di samping itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain

kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran di mana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Merata dan Optimal

Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan yang ada antara lain perlambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing. Pemanfaatan terkait data produk unggulan daerah dapat menjadi daya dongkrak untuk meningkatkan *bergaining power* Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi penting agar dapat meningkatkan citra diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan perlambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

3. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggara dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan

akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintahan yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Perlunya sumber data aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

4. Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat, dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolak ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Di samping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

5. Pengembangan Wilayah yang Belum Optimal

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi

satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Di samping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarana prasarana air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarana prasarana tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang, di mana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu (5) lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode tahun 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga adalah

“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”.

Visi tersebut dirumuskan guna menjawab permasalahan pembangunan daerah di Purbalingga dengan memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketentraman; ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan *collaborative government hexahelix* antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang

telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasi diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

2. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksud agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur juga di dukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

3. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

4. Misi 4 : Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada penjabaran misi pembanguan, dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 11 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
	Tujuan: Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	
Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	1. Pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah
		2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global
		3. Peningkatan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		4. Pengembangan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan
		5. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat
		6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
		7. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan
		8. Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan
		9. Perwujudan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
		10. Pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan
		11. Pengembangan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan
Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	1. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah
		2. Peningkatan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya
		2. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM	Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	1. Peningkatan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter
		2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global
		3. Peningkatan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul
		4. Peningkatan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan
		5. Perwujudan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila,

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
		demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Dari arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih rinci ke dalam strategi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi nantinya akan diturunkan ke dalam sejumlah program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah di atas, penjabaran strategi lebih rinci yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian yang maju dan inklusif sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:
 - a. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. Pembentukan sentra-sentra industri untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang didukung dengan fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal, manajemen usaha dan teknologi yang memadai;
 - c. Peningkatan kualitas produk manufaktur (IKM) serta fasilitasi *link and match* dengan pabrik;
 - d. Pemanfaatan Sistem Industri Nasional dalam pembinaan industri kecil;
 - e. Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan;
 - f. Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli Masyarakat;
 - g. Penguatan standarisasi produk unggulan daerah dengan mengembangkan branding daerah.
2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global, melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata antara pemerintah, pelaku usaha/investor dan komunitas lokal;

- b. Peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata seperti transportasi, akomodasi dan fasilitas umum;
 - c. Penguatan promosi wisata dan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - d. Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan desa wisata;
 - e. Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan dengan melakukan integrasi pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal melalui paket wisata tematik;
 - f. Mendorong penyelenggaraan event nasional dan internasional untuk menarik wisatawan;
 - g. Penguatan ekosistem pariwisata kreatif bagi pelaku usaha kreatif yang mencakup inovasi produk wisata digital serta keterlibatan komunitas secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata;
 - h. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan usaha wisata.
3. Peningkatan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:
- a. Optimalisasi peta potensi investasi;
 - b. Peningkatan kerjasama penanaman modal;
 - c. Peningkatan kepeminatan penanaman modal dan promosi peluang investasi kepada investor;
 - d. Peningkatan kemudahan izin berusaha dan optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik.
4. Pengembangan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan, melalui:
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pengembangan pertanian lokal berbasis potensi wilayah;
 - d. Hilirisasi rantai komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui *corporate farming*;
 - e. Implementasi teknologi pertanian melalui *smart farming*, *smart agriculture*, *climate smart agriculture* dan *logistic system*;
 - f. Peningkatan peran pemuda menjadi petani millennial;
 - g. Pengembangan benih unggul dan adaptif iklim;
 - h. Peningkatan prasarana pertanian baik irigasi, jalan usaha tani dan embung.

5. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Pengelolaan jalur distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan pangan, harga pangan stabil, akses pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau;
 - b. Peningkatan pola konsumsi pangan lokal bergizi seimbang melalui diversifikasi konsumsi pangan;
 - c. Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan Lestari;
 - d. Optimalisasi peran BUMD sektor pangan;
 - e. Penguatan cadangan pangan lokal melalui Lumbung Pangan Masyarakat, kerjasama Gapoktan-BUMDes;
 - f. Penguatan sistem usaha perikanan budidaya secara terpadu dari hulu ke hilir (pembenihan, pembesaran, pengolahan, pemasaran, kelembagaan);
 - g. Penguatan kampanye dan edukasi Gemar Makan Ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan produk olahannya.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, melalui:
 - a. Penyediaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
 - b. Penyediaan informasi pasar kerja dan kolaborasi *job-fair* bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - d. Mendorong dialog sosial tripartit, penguatan lembaga kerja sama bipartit dan perlindungan hak-hak pekerja serta pengusaha secara adil;
 - e. Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif;
 - f. Pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis pemula, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB);
 - g. Pendataan tenaga kerja dan pemutakhiran sistem informasi pasar kerja daerah (Kepenk Ngodene) yang terintegrasi dengan sistem pencarian kerja online;
 - h. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta guna memperluas akses kerja.

7. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Penguatan akses permodalan dan manajemen koperasi melalui pelatihan, pendampingan usaha serta digitalisasi layanan koperasi;
 - b. Peningkatan literasi digital dan keterampilan berbasis industri kreatif untuk masyarakat dan UMKM;
 - c. Penyediaan inkubator bisnis dan pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM dan startup digital;
 - d. Penyediaan pusat kreatif (*creative center*) dan startup center untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) serta wirausaha muda;
 - e. Fasilitasi link and match untuk UMKM dan wirausaha mikro untuk meningkatkan akses pasar dan pemodalan;
 - f. Peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual secara digital melalui sertifikasi produk lokal agar lebih kompetitif di pasar regional dan nasional.
8. Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kewirausahaan;
 - b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;
 - c. Optimalisasi peran BUMDes dan BUMDesma sebagai motor penggerak ekonomi desa serta pengembangan koperasi Merah Putih dalam memperluas basis usaha dan distribusi hasil produksi desa;
 - d. Peningkatan produktivitas perekonomian desa melalui pengembangan potensi lokal unggulan yang berorientasi pada nilai tambah dan daya saing;
 - e. Peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan antar desa dalam memperluas jaringan usaha, pemasaran produk lokal, dan akses permodalan;
 - f. Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
9. Perwujudan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melalui:

- a. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama untuk membangun ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan dan penegakkan perda terkait ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat.
10. Pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, melalui:
- a. Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan bencana;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai informasi rawan bencana terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
 - c. Peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penanganan korban bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
 - e. Peningkatan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana dengan penerapan teknologi mitigasi bencana.
11. Pengembangan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, melalui:
- Pengelolaan sampah di hulu dengan melakukan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah rumah tangga;
- a. Pengelolaan sampah di tengah dan hilir dengan melakukan penanganan sampah melalui perbaikan tata kelola dan manajemen persampahan;
 - b. Pengurangan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*reuse reduce recycle*) untuk menghasilkan produk-produk sampah yang bernilai ekonomis;
 - c. Peningkatan kualitas air tanah dan udara melalui peningkatan ruang terbuka hijau;
 - d. Pengendalian pencemaran dari limbah industri, pertanian dan rumah tangga;

- e. Peningkatan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan non motorize;
- f. Penciptaan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi baru terbarukan;
- g. Penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*);
- h. Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air.

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standart dan terkoneksi antar wilayah;
 - b. Peningkatan jaringan irigasi yang dapat meningkatkan luas oncoran air irigasi;
 - c. Peningkatan kualitas drainase perkotaan untuk mengurangi banjir dan genangan;
 - d. Penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih dan jaringan distribusi air untuk penyediaan air minum layak menuju aman;
 - e. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi layak dan pengolahan limbah menuju aman;
 - f. Penataan bangunan gedung dan rehabilitasi bangunan yang tidak laik fungsi;
 - g. Peningkatan keterwujudan penataan ruang yang berkualitas melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang;
 - h. Pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - i. Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan;
 - j. Peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan jaringan trayek serta pengelolaan simpul transportasi;
 - k. Penyediaan angkutan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau;
 - l. Penataan parkir dan kawasan parkir pada ruang publik.
2. Peningkatan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing, melalui:

- a. Penyediaan rumah layak huni terutama bagi korban bencana atau relokasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Penataan jaringan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas dasar pada kawasan permukiman yang layak huni;
- c. Penataan kawasan kumuh terutama di lingkungan permukiman bantaran sungai dan wilayah pinggir;
- d. Pengembangan perumahan dan pengelolaan rusunawa yang memadai.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi yang prima dan berintegritas sebagai berikut:

1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya, melalui:
 - a. Peningkatan kelembagaan yang agile dan penataan organisasi yang mampu mendorong efisiensi dan efektivitas;
 - b. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan;
 - c. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil;
 - d. Peningkatan kapabilitas riset dan inovasi daerah;
 - e. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan publik;
 - f. Implementasi Smart City;
 - g. Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - h. Peningkatan keamanan informasi pemerintah;
 - i. Peningkatan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik;
 - j. Peningkatan kualitas sistem merit dengan memperkuat kompetensi aparatur sipil negara;
 - k. Peningkatan layanan kependudukan berbasis digital;
 - l. Penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Peningkatan tata kelola keuangan daerah;
 - b. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dan inovasi pembiayaan;

- d. Mempercepat implementasi ETPD untuk Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital;
- e. Pemutakhiran data objek pajak daerah;
- f. Memperluas edukasi literasi keuangan mendukung Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
- g. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya kualitas manusia yang unggul sebagai berikut.

1. Peningkatan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta kesetaraan;
 - b. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan kompetensi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Optimalisasi pendidikan vokasi melalui pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu;
 - e. Peningkatan partisipasi dan penanganan anak tidak sekolah melalui pemberian beasiswa AUSTS;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik;
 - h. Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif;
 - i. Peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gemar membaca;
 - j. Pelestarian seni dan budaya lokal melalui festival budaya, revitalisasi warisan budaya dan dukungan terhadap komunitas budaya.
2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global, melalui:
 - a. Peningkatan partisipasi dan daya saing pemuda dalam ajang kompetisi lokal dan nasional;

- b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
 - c. Peningkatan dukungan terhadap atlet potensial;
 - d. Pembinaan olahraga untuk generasi muda;
 - e. Penguatan kerjasama dalam penyelenggaraan event olah raga;
 - f. Penguatan organisasi pemuda;
 - g. Pelatihan konten kreator untuk pemuda berbasis digital.
3. Peningkatan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul, melalui:
- a. Peningkatan kelas layanan puskesmas;
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat;
 - c. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - d. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
 - f. Percepatan penurunan prevalensi stunting dan prevalensi balita dengan permasalahan gizi lainnya;
 - g. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
 - h. Pemenuhan sediaan farmasi;
 - i. Pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - j. Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat.
4. Peningkatan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan, melalui:
- a. Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan social;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan peningkatan kualitas bantuan social;
 - c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan;
 - d. Peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga;
 - e. Peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek;
 - f. Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. Pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak;

- h. Pengembangan ruang publik ramah anak dan advokasi lembaga layanan anak.
5. Perwujudan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
 - b. Penanganan potensi konflik di daerah;
 - c. Penguatan forum kerukunan antar umat beragama;
 - d. Peningkatan wawasan kebangsaan;
 - e. Penguatan Tim Pemantauan Konflik dan Wasdinda (Kewaspadaan Dini Daerah);
 - f. Peningkatan pendidik politik bagi kader politik dan Masyarakat.

Selanjutnya agar arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan pentahapan pembangunan. Pentahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan dan fokus tema pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. 12 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan				
2026	2027	2028	2029	2030
Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Pemantapan Infrastruktur Dasar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Sosial Berkelanjutan	Menumbuhkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial Menuju Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera	Perwujudan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan kebijakan 9 program prioritas dan 50 program unggulan. Seluruh program tersebut kemudian dijabarkan secara teknokratik dan implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Program prioritas tersebut harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penjabaran program prioritas dan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 13 Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)		
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)		
		Tingkat Kemiskinan		
Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PROGRAM PRIORITAS Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan sebesar 6 persen dan peningkatan PAD hingga Rp.	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengembangan

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			500 milyar pada tahun 2029	Iklm Penanaman Modal
			Peningkatan kemakmuran masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 24 juta per tahun per orang (ADHK)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			PROGRAM UNGGULAN Inkubator dan Akselerator Wirausaha Baru (UPTD Logam menjadi inkubator IKM Logam Unggulan)	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Branding Purbalingga sebagai wisata NEWA (<i>Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism</i>) berbasis komunitas	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Program Pengembangan Sumber Daya

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Pariwisata dan Ekonomi Kreati
			• <i>Smart Farming</i> dan <i>Corporate Farming</i>	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			• Optimalisasi Saluran Irigasi Pertanian	• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			• Hilirisasi Produk Unggulan Daerah (PUD) berbasis kawasan untuk peningkatan daya saing	• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			• Kolaborasi dengan pengusaha lokal, dalam negeri dan luar negeri dengan melakukan MoU dan Lol	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			• Purbalingga Bisnis Forum	
			• Optimalisasi Mall Pelayanan Publik	
			• Penggunaan pangan bergizi seimbang dan aman	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi dan
			• Pemanfaatan pekarangan lestari	

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan
			• Pengembangan budidaya ikan hias	• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			• Optimalisasi Hijau (RTH) melalui RTH Tematik, Pemenuhan Luas RTH Perkotaan dan Ruang Publik Perkotaan	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			• Optimalisasi <i>online monitoring system</i> (onlimo) pada pencemaran air sungai	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Peningkatan tata kelola sampah melalui optimalisasi TPS 3R (<i>Reuse, Recycle, Reduce</i>)	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan efektivitas kegiatan di desa melalui pemberian mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan	- Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Administrasi

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			efektivitas layanan dan kegiatan di desa	Pemerintahan Desa
			• Peningkatan dana operasional RT / dana bergulir	• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
			• Fasilitasi Kecamatan Berdaya	• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			• Fasilitasi Koperasi Merah Putih	• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			• Purbalingga Cerdas Spiritual dan Sosial	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Penguatan Sistem Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan Melalui PUSDALOPS	- Program Penanggulangan Bencana - Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			PROGRAM PRIORITAS Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, meningkatkan dukungan bagi <i>start up</i> dan UMKM melalui pembentukan pusat kreatif dan start up di setiap kecamatan serta pemberian hibah pendanaan	- Program Pengembangan UMKM - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM UNGGULAN Pembentukan <i>Creative Center</i> dan <i>StartUP Center</i> (Taman Usman Janatin sebagai <i>hetero space/techno park</i>)	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			Hibah bagi <i>StartUP</i> dan UMKM Inovatif	
			Fasilitasi <i>link and match</i> UMKM lokal dengan Perusahaan Nasional dan Global	
			PROGRAM PRIORITAS Penurunan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka pengangguran sebesar 1,7 persen dengan menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor jasa dan ekonomi kreatif	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			PROGRAM UNGGULAN Kolaborasi dengan <i>Social Entrepreneur</i>, Filantropis dan kerjasama internasional (<i>Sister City</i>)	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial
			Fasilitasi <i>link and match</i> angkatan kerja dengan pasar kerja melalui <i>Job Fair</i>	
			Penciptaan lapangan kerja	

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif	
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	PROGRAM PRIORITAS Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui proyek berbasis kemitraan publikswasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk jalan, fasilitas pendidikan dan Kesehatan	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			PROGRAM UNGGULAN Peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk meningkatkan konektivitas ekonomi	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur strategis diantaranya SPAM Bandara, Gedung DPRD melalui kolaborasi dengan seluruh	Program Penataan Bangunan Gedung

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			stakeholder di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah	
			Operasionalisasi Bandara Jenderal Soedirman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Peningkatan akses hunian layak	Program Pengembangan Perumahan
			Perbaikan tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungai dan wilayah pinggiran	- Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PRIORITAS Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menerapkan tata kelola pemerintahan	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			yang bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; - Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif; - Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			PROGRAM UNGGULAN Bupati Award sebagai bentuk apresiasi (Guru Berprestasi, Masyarakat Inovatif, RT Inovatif, RT Berdaya, Wirausaha Inspiratif)	- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Program Pengembangan UMKM
			Purbalingga <i>Smart City</i>	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi lainnya guna meningkatkan efisisensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - Program Riset dan Inovasi Daerah
			Program <i>Open-House</i> Pendopo	Program Penunjang

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			Kita dan Matur Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian dan Pembangunan
			• Pelayanan kependudukan 0 rupiah 0 kilometer	• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka
			• Kenaikan pendapatan dari sektor PBB (Updating data NJOP)	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			• Pemutakhiran Data Wajib Pajak	
			• Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak	
			• Kolaborasi pemungutan dan pengawasan	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan
			• Pelatihan Kompetensi (Sertifikasi Kompetensi) untuk menunjang	

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			karir di Era Digital	Sumber Daya Manusia
Unggulkan Kualitas SDM	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PRIORITAS Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program beasiswa, pelatihan dan peningkatan layanan kesehatan	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			PROGRAM UNGGULAN Pemberian beasiswa untuk 1000 pelajar hingga jenjang vokasi	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Renovasi sekolah SD dan SMP	
			Pembinaan olahraga terpadu meliputi pelatihan intensif, peningkatan fasilitas, dukungan kompetisi, pembangunan karakter	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Pemberdayaan kader kesehatan	Program Pemenuhan

Visi / Misi	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah	Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Perlindungan Kesehatan Semesta	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			• Penyediaan layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat	
			• Pembangunan fasilitas layanan kesehatan rujukan layanan guna pemerataan akses layanan bagi masyarakat	
			• Peningkatan kelas layanan puskesmas	
			• Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana

Sumber : RPJM Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021. Namun seiring dengan telah terpilihnya Bupati-Wakil Bupati periode tahun 2025-2030, maka saat ini berada pada masa transisi dari dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Kemudian berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 100.37/NK/04/IV/2025 dan Nomor 170/02 Tahun 2025 mengenai Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, telah disepakati beberapa hal antara lain visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, pedoman penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dan acuan penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sampai dengan RPJMD tersebut ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam dokumen perubahan RKPD 2025 ini didasarkan pada beberapa hal yaitu:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan pergeseran pemotongan dan pergeseran alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melaksanakan prioritas kepala daerah 2025-2030 utamanya “Alus Dalane Kepenak Ngodene”;

- 2) Capaian pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam menentukan target untuk tahun berikutnya, sehingga perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada:
 - a) Hasil evaluasi capaian kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disandingkan dengan target kinerja tahun 2025 yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
 - b) Identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
 - c) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah tahun 2025 termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang;
 - d) Mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran Pembangunan.

Adapun indikator dan target kinerja serta sasaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 secara lengkap terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1. 14 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Target Tahun 2025 pada RKPD Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	CAPAIAN KERJA		TARGET KINERJA 2025
				2023	2024	
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.						
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	66,2	81,96	78
Sasaran :						
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Angka	67,02	68,1	78
Misi 2 : Mendorong Kehidupan Masyarakat Religius yang Beriman dan Bertaqwa Kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta Mengembangkan Paham Kebangsaan Guna Mewujudkan Terciptanya Rasa Aman dan Tenteram dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indone						
Tujuan : Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,87	0,78	1,4
Sasaran :						
1.	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka Konflik Sosial	per 10.000 penduduk	0,05	0,02	0,06
		Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,82	0,77	1,43
Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak						
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	Persen	14,99	14,18	12,5-13,5
Sasaran :						
1.	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	78,05	78,47	83,3
		Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	96	96,52	93,67
		Cakupan Sanitasi Layak	Persen	94,03	95,37	92,75
		Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	99,12	99,38	99,46
2.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	92,34	93,81	85,7

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat						
Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,51	70,97	70,46
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,51	93,74	94,15
Sasaran :						
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,03	12,38
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,98	74,19	73,5
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Nilai	621,35	732,65	710
Misi 5 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan Mendorong Simpul-Simpul Perekonomian Utamanya Dalam Industri Pengolahan dan Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan Tetap Berorientasi Pada Kemitraan dan Pengembangan Potensi Lokal Serta Didukung dengan Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Pengembangan Usaha, Investasi dan Peciptaan Lapangan Kerja						
Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51	4,55	05-Jun
Sasaran :						
1.	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	30.390.000	32.090.000	29.685.932
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,61	4,96	<5
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Angka	0,7784	0,7901	0,82
Sasaran :						
1.	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju	Persen	89,29	95,09	50
Misi 7 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah / Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan						
Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	77,22	69,19	82,28
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87	67,1	67,85

Sasaran :						
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Jalan Mantap	Angka	78,83	68,38	85,3
		Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	75,61	70	100
		Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	Persen	72	73	76
2.	Optimalnya pemanfaatan ruang	Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	95,29	94,49	91
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,87	67,1	67,85

Sumber : RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025

Tabel 1. 15 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Target Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN
				2024	2025
TUJUAN DAERAH					
	Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000
		Angka Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 - 12,86
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB	Persen	1,06	1,07
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO2eq	448.472,89	522.952,69
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,97	71,63
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5
SASARAN DAERAH					
1.	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5,3
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96 - 4,79
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32
2.	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	64,66	66,09
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,28	77,05
4.	Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas	Nilai SAKIP	Angka	68,1	70,01
		Indeks Integritas Nasional	Angka	77,18	78

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN
				2024	2025
5.	Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Desa	Angka	76,24	78,84
6.	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	84,04	86,01
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,05	62,43 - 63,94
7.	Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis	Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	0,78	0,75

Sumber : RKPD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tabel 1. 16 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Selaras dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras dengan Prioritas Nasional
Prioritas 1 : Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi	Prioritas 1 : Penguatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Didukung dengan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas. Prioritas 3 : Penguatan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Prioritas 2 : Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	Prioritas 1 : Penguatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Didukung dengan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.	Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Prioritas 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Prioritas 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Selaras dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras dengan Prioritas Nasional
		Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Prioritas 2: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Lebih Pintar, Sehat, Bugar, Berkarakter, dan Adaptif Secara Inklusif dan Merata.	Prioritas 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Prioritas 4 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif.	Prioritas 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Prioritas 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan. Prioritas 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sumber : RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
2. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;
4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;
5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi unit pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
4. Alat akuntabilitas unit pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanannya;
5. Mendorong terwujudnya *checks and balances*;
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan unit pelayanan publik.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan prioritas utama antara lain belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan dasar dituangkan dalam program sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan serta program unggulan daerah **“mageh pada sekolah”**. Selain itu juga diarahkan untuk Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah, rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dalam rangka serta untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu: 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar: 99,85%; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama: 96,77%; 3) APM PAUD: 82%; 4) Presentase PKBM yang terakreditasi: 88,89%.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20: 10,38%.

2. Urusan Kesehatan

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah dalam rangka mendukung

pencapaian SPM Kesehatan. Selain itu fokus pada pelayanan kesehatan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit dan puskesmas, pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan obat dan vaksin, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan balita, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025, yaitu: 1) Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan minimal Madya atau sederajat: 100%; 2) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk: 2,25 per 100.000; 3) Prevalensi stunting (data EPPGM): 11%; 4) Angka Morbiditas: 17,6%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase puskesmas dengan 9 (Sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar: 100%.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: 1) Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar: 96,23%; dan 2) Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan: 100%.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase Desa/Kelurahan sehat mandiri: 41,1%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pembangunan serta peningkatan SPAM di

kawasan perdesaan. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n sebesar: 0,57%.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n sebesar: 1,34%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan: 100%.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, SPM pemadam kebakaran dan SPM penanggulangan bencana. Menitikberatkan pada pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM), penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Bupati serta sosialisasi penegakan Perda dan Perkada. Untuk penanggulangan bencana dititikberatkan pada Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana

kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten, serta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan untuk pemadam kebakaran menitikberatkan pada *respon time* terhadap penanggulangan bencana kebakaran dan kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: 1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan): 99,65%; dan 2) Persentase penegakkan perda: 12,96%.

2) Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan sebesar: 80,55%.

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase penanganan kejadian kebakaran: 100%.

6. Urusan Sosial

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Fokus pada peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, pemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pengoptimalan Rumah Singgah serta Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 100%.

2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial sebesar 97,78%.

3) Program Penanganan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%.

BAB II

CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Capain Kinerja Makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,97	71,71	1,04
2.	Persentase Penduduk Miskin	14,18	12,25%	-13,61
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,83	-2,63
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,55	5,92	30,11
5.	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp.32.090.000,-	Rp.34.426.830,-	7,28
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,314	0,339	7,96

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; sementara dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia

kian menjadi perhatian karena merupakan Gambaran keberhasilan suatu wilayah dalam Pembangunan. Capaian Pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga secara umum terus menunjukkan peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mencapai 71,71. Mengalami perubahan/ laju sebesar 1,04% dibandingkan capaian IPM tahun 2024 yang sebesar 70,97.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mencapai 12,25% menunjukkan laju positif berupa penurunan sebesar 13,61% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 14,18%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 mencapai 4,83%, menunjukkan laju positif berupa penurunan sebesar 2,62% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,96%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mencapai 6,36% mengalami kenaikan sebesar 39,78% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 4,55%. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2025 mencapai Rp.34.426.830,-per tahun atau naik sebesar 7,28% dari tahun 2024, dengan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) mencapai 0,339%.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Wajib Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan.	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$\frac{29.999}{32.996} \times 100\% = 90,92\%$	DINDIKBUD DINPENDUKCAPIL	
		1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{14.182}{149.696} \times 100\% = 9,32\%$	DINDIKBUD DINPENDUKCAPIL	
		1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{2.944}{2.944} \times 100\% = 100\%$	DINDIKBUD	
		1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{1.411}{3.475} \times 100\% = 40,60\%$	DINDIKBUD	
		1.a.5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{2.087}{4.825} \times 100\% = 43,25\%$	DINDIKBUD	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Kesehatan	1.b.1	Persentase kematian ibu	$\frac{8}{10.446} \times 100\% = 0,08 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	$\frac{6.950}{57.318} \times 100\% = 12,13 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	$\frac{9.714}{9.714} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	$\frac{10.446}{10.446} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	$\frac{10.337}{10.337} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standa	$\frac{51.082}{51.082} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standa	$\frac{136.588}{136.588} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	$\frac{679.016}{679.016} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{127.953}{163.461} \times 100\% = 78,28 \%$	DINKES DINPENDUKCAPIL	
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{237.140}{237.140} \times 100\% = 100 \%$	DINAS KESEHATAN	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	14.060 ----- x 100% = 100 % 14.060	DINAS KESEHATAN	
		1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	2.787 ----- x 100% = 100 % 2.787	DINAS KESEHATAN	
		1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	18.770 ----- x 100% = 100 % 18.770	DINAS KESEHATAN	
		1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	17.703 ----- x 100% = 100 % 17.703	DINAS KESEHATAN	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	12.411 ----- x 100% = 64,78% 19.159	DPUPR	
		1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	687,34 ----- x 100% = 72,15 % 952.602	DPUPR	
		1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	968.311 ----- x 100% = 90,97 % 1.064.475	DINRUMKIM DPUPR	
		1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	236.502 ----- x 100% = 95,42 % 247.852	DINRUMKIM DPUPR	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	$\frac{0}{129.316} \times 100\% = 0\%$	DPUPR	- Tidak dilaksanakan karena infrastruktur banjir merupakan kewenangan BBWS Serayu Opak. - Dilengkapi dengan Surat Keterangan dari DPUPR
		1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	DPUPR	- Tidak Dapat dilaksanakan karena tidak ada pantai. Dilengkapi dengan Surat Keterangan dari DPUPR
		1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	$\frac{173}{173} \times 100\% = 100\%$	DPUPR	
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	$\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$	DPUPR	
		1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{267}{273} \times 100\% = 97,80\%$	DPUPR	
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	$\frac{9}{53} \times 100\% = 16,98\%$	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	DINRUMKIM	
		1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{7,36}{68,04} \times 100\% = 10,82\%$	DINRUMKIM	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	$\frac{1.201}{44.065} \times 100\% = 2,73 \%$	DINRUMKIM	
		1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100 \%$	DINRUMKIM	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100 \%$	SATPOL PP	
		1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{155}{155} \times 100\% = 100 \%$	SATPOL PP	
		1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100 \%$	BPBD	
		1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{13.544}{13.544} \times 100\% = 100 \%$	BPBD	
		1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{1.470}{1.470} \times 100\% = 100 \%$	BPBD	
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{65}{79} \times 100\% = 82,28\%$	SATPOL PP	
6	SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{550}{550} \times 100\% = 100\%$	DINSOS DALDUK KBP3A	
		1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantih[	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100 \%$	DINSOS DALDUK KBP3A	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		1.f.3	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	760 ----- x 100% = 100 % 760	DINSOS DALDUK KBP3A	
		1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10 ----- x 100% = 100 % 10	DINSOS DALDUK KBP3A	
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	930 ----- x 100% = 100 % 930	DINSOS DALDUK KBP3A	
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	1.310 ----- x 100% = 100 % 1.310	DINSOS DALDUK KBP3A	
Urusan Wajib Pemerinatahan Tdak Berakitan dengan Pelayanan Dasar						
7	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	4 ----- x 100% = 66,67 % 6	DINNAKER	
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	51 ----- x 100% = 53,68 % 95	DINNAKER	
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	2.164 ----- x 100% = 100 % 2.164	DINNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	102 ----- x 100% = 100 % 102	DINSOS DALDUK KBP3A	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Anak	2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	32 ----- x 100% = 100 % 32	DINSOS DALDUK KBP3A	
9	Pangan	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	28,44 ----- x 100% = 49,96 % 56,92	DKPP	
10	Pertanahan	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	9.698.899 ----- x 100% = 85,12 % 11.394.050	DINRUMKIM	
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	739.124.700 ----- x 100% = 91,73 % 805.756.400	DINRUMKIM	
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	2 ----- x 100% = 100 % 2	DINRUMKIM	
11	Lingkungan Hidup	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	60 ----- x 100% = 96,77 % 62	DLH	
		2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	98.934 ----- x 100% = 51,74 % 191.215	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	277.315 ----- x 100% = 98,46 % 281.658	DINPENDUKCAPIL	
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	176.048 ----- x 100% = 66,40 % 265.118	DINPENDUKCAPIL	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$	DINPENDUKCAPIL	
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	$\frac{793858}{803.322} \times 100\% = 98,82\%$	DINPENDUKCAPIL	
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{6.992}{6.992} \times 100\% = 100\%$	DINPENDUKCAPIL	
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{160}{160} \times 100\% = 100\%$	DINPENDUKCAPIL	
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{110}{110} \times 100\% = 100\%$	DINPENDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	DINPER MASDES	- Sudah tidak ada desa tertinggal - Dilengkapi dengan surat keterangan Kepala Dinsospermasdes
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{5}{11} \times 100\% = 45,45\%$	DINPER MASDES	
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	$\frac{29}{30} \times 100\% = 96,67\%$	DINPER MASDES	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	$\frac{2,22}{2,1} \times 100\% = 105,71\%$	DINSOS DALDUK KBP3A	
		2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{108.635}{170.010} \times 100\% = 63,90\%$	DINSOS DALDUK KBP3A	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,95 ----- x 100% = 79,33 % 7,5	DINSOS DALDUK KBP3A	
15	Perhubungan	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,7	DINHUB	
		2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,49	DINHUB	
		2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	1 ----- x 100% = 3,57 % 28	DINHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	25 ----- x 100% = 55,56 % 45	DINAS KOMINFO	
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35 ----- x 100% = 100 % 35	DINAS KOMINFO	
		2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	709.756 ----- x 100% = 100 % 709.756	DINAS KOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	117.255.716.270 ----- x 100% = 19,01% 98.529.699.057	DINKOP UKM	
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	1.630 ----- x 100% = 2,48 % 65.606	DINKOP UKM	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
18	Penanaman Modal	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{1.135.956.928.855}{1.001.180.131.135} \times 100\% = 13,46\%$	DPMPSTP	
		2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	$\frac{1.135.956.928.855}{1.093.000.000.000} \times 100\% = 103,93\%$	DPMPSTP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{136}{136} \times 100\% = 100\%$	DINPORAPAR DINKOPUKM	
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{17.437}{240.119} \times 100\% = 7,26\%$	DINPORAPAR BEKESBANGPOL	
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	$\frac{6}{15} \times 100\% = 5,22\%$	DINPORAPAR	
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	$\frac{11}{29} \times 100\% = 37,93\%$	DINPORAPAR	
20	Statistik	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	$\frac{1.463}{1.562} \times 100\% = 93,66\%$	DINAS KOMINFO	
21	Persandian	2.0	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	$\frac{573}{918} \times 100\% = 62,42\%$	DINAS KOMINFO	
22	Kebudayaan	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	DINDIKBUD	
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	$\frac{183.200}{98.194} \times 100\% = 90,37\%$	DINDIKBUD	
23	Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	14,07	DINARPUS	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	56,38	DINARPUS	
24	Kearsipan	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	93,75 %	DINARPUS	
Urusan Pilihan						
25	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	$\frac{6.680}{7.180} \times 100\% = 93,04 \%$	DKPP	
		3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	29,59	DKPP	
26	Pariwisata	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	$\frac{23.756.610.000}{1.135.956.928.855} \times 100\% = 2,09\%$	DINPORAPAR	
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	$\frac{53}{25} \times 100\% = 112 \%$	DINPORAPAR	
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{3.703.641}{2.876.550} \times 100\% = 28,75 \%$	DINPORAPAR	
27	Pertanian	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{292.775}{286.514} \times 100\% = 2,19 \%$	DINAS PERTANIAN	
		3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	$\frac{171.692,88}{135.429,67} \times 100\% = 26,78 \%$	DINAS PERTANIAN	
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	$\frac{19.887,3}{18.618,22} \times 100\% = 6,82 \%$	-	
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	$14.024,4 \times 100\% = 100 \%$	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			(diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	14.024,4		
28	Perdagangan	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{25.056}{25.000} \times 100\% = 100,22 \%$	DINPERINDAG	Data dukung ditandatangani oleh Kepala Dindagkop UKM
29	Perindustrian	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	91	DINPERINDAG	
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$\frac{216}{229} \times 100\% = 94,32 \%$	DINPERINDAG	
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$\frac{28.065}{18.291} \times 100\% = 53,44 \%$	DINPERINDAG	
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{286.268.133.631}{1.135.956.928.855} \times 100\% = 25,20 \%$	DINPERINDAG	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO.	URUSAN PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17 ----- x 100% = 100 % 17	BAPPELITBANGDA	
2	Keuangan	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	831.706.767.000 ----- x 100% = 38,67 % 2.150.822.651.000	BAKEUDA	
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	441.527.911.649,43 ----- x 100% = 20,72% 2.131.156.997.315,43	BAKEUDA	
		4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.317.347.956.527,01 ----- x 100% = 63,27% 2.082.109.182.519,01	BAKEUDA	

NO.	URUSAN PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			Daerah tahun N			
		4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	498.095.490.000 ----- x 100% = 28,58% 1.742.546.906.000	BAKEUDA	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.233 ----- x 100% = 68,33 % 1.794	BKPSDM	
4	Penelitian dan Pengembangan	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	121 ----- x 100% = 100 % 121	BAPPELITBANGDA	
5	Fungsi Pengawasan	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,17	INSPEKTORAT	
		4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3.00	INSPEKTORAT	Diisi nilai tahun 2024 karena nilai tahun 2025 belum rilis dari BPKP
		4.e.3	Manajemen risiko Indeks	2,98	INSPEKTORAT	
		4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	812 ----- x 100% = 91,75 % 885	INSPEKTORAT	
6	Pengadaan	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	BAGIAN PBJ	

NO.	URUSAN PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan Kualifikasi dan kompetensi	28,09	BAGIAN PBJ	
		4.f.3	Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	8,89	BAGIAN PBJ	
7	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	SEKRETARIAT DPRD/ BAGIAN HUKUM	
		4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	$\frac{14}{19} \times 100\% = 73,68\%$	SEKRETARIAT DPRD/ BAGIAN HUKUM	
8	Pelayanan Publik	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96,49	BAGIAN ORGANISASI	Tahun 2025 Pemkab Purbalingga tidak menjadi lokus penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik dari Ombudsman, sehingga nilai yang digunakan adalah hasil nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Tahun 2024 oleh Ombudsman.

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP) Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026 yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2025-2029 yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Mendasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Target Kinerja Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69
- Nilai SAKIP	Angka	70,01
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,40
Angka Kemiskinan	Persen	11,5 – 12,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,5
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5 - 6
- Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	31.480.622
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	< 4,8
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,80
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	79.000
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,75

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/110 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3	4
MEWUJUDKAN PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	35.000
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,334
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,06
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96
	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	69,01
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,5
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,63
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif			
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas			
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas			
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul			

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rumus pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja bersifat positif apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator kinerja bersifat negatif apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerja, rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 16 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025, baik Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Perubahan tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Awal)
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69	82,73	119,90
- Nilai SAKIP	Angka	70,01	68,29 B	97,54

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,40	1,086	128,91 (sifat negatif)
Angka Kemiskinan	Persen	11,5 – 12,5	12,55	100
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,5	71,71	100,29
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15	93,92	99,76
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5 - 6	5,92	98,67
- Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	31.480.622	34.426.830	109,36
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	< 4,8	4,83	100
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,80	0,7923	99,04
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	79,00	71,85	90,95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,75	71,37	105,34

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Adapun capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan)
Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
MEWUJUDKAN PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	35.000	34.426,83	98,36
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,334	0,339	98,53
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,06	12,55	115,94

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5	5,92	131,56
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,83	97,38
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	69,01	71,85	104,12
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,5	82,73	100,28
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,63	71,71	100,11

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2		4	5
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	69	82,73
- Nilai SAKIP	Angka	68,10 B	70,01	68,29 B
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	0,77	1,40	1,086
Angka Kemiskinan	Persen	14,18	11,5 – 12,5	12,55
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,97	71,5	71,71
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,51	94,15	93,92
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	5 – 6	5,92
- Nilai PDRB Per Kapita	Milyar	33.357,33	31.480.622	34.426.830
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen			

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,7901	0,80	0,7923
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	69,56	82,275	71,85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87	67,75	71,37

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
MEWUJUDKAN PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	33.357,33	35.000	36.070,88
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,334	0,334	0,339
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,18	14,06	12,55
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5	5,92
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96	4,83
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	69,56	69,01	71,85
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5	82,73
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70.79	71,63	71,71

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	82,73	100,06
- Nilai SAKIP	Angka	78	68,29 B	87,55
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,40	1,086	128,91
Angka Kemiskinan	Persen	12,5	12,55	99,60
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,46	71,71	101,77
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,15	93,92	99,76
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5	5,92	118,4
- Nilai PDRB Per Kapita	Milyar	29.685.932	34.426.830	115,97
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	< 5	4,83	103,52
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,82	0,7923	96,62
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	82,275	71,85	87,33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,21	71,37	96,17

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	5	6	4
MEWUJUDKAN PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	35.000	36.070,88	103,06
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,334	0,339	98,53
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,06	12,55	112,03
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5	5,92	131,56

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	5	6	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,83	97,38
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	69,01	71,85	104,12
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,5	82,73	100,28
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,63	71,71	100,11

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Penggunaan biaya guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 13
Realisasi Anggaran 2025

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	817.000	815.000	99,76
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	78.068.000	76.660.197	98,20
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	6.000.000	5.916.000	98,60
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.852.000	17.767.477	99,53
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	114.220.000	14.149.500	12,39
	Program Promosi Penanaman Modal	268.320.000	167.143.060	62,29
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	71.380.000	71.318.000	99,91
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.815.000	6.797.157	99,74

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Penanaman Modal	61.376.000,00	61.323.760,00	99,91
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.350.000	20.751.700	81,86
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	531.011.000,00	513.384.800,00	96,68
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	111.055.000,00	103.268.576,00	92,99
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.723.000	439.882.922	98,47
	Program Pemasaran Pariwisata	91.810.000	91.585.000	99,75
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60.410.000	59.925.500	99,20
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	848.056.000	838.043.629	98,82
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.678.435.000	15.529.341.285	99,05
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	141.381.000	140.361.556	99,28
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	211.851.000	175.595.967	82,89
	Program Penyuluhan Pertanian	3.393.227.000	3.373.847.441	99,43

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	7.247.000	7.226.400	99,72
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.637.435.000	2.309.702.411	87,57
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	872.330.000	861.836.850	98,80
	Program Pengembangan Ekspor	1.519.000	1.511.000	99,47
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	147.557.000	147.388.148	99,89
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.273.537.000	1.249.606.392	98,12
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2.860.000	2.766.000	96,71
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.826.000	2.815.430	99,63
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	24.087.000	24.078.402	99,96
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	222.135.000	220.711.725	99,36
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.250.781.000	1.231.282.561	98,44
	Program Pengendalian Bahan	11.095.000	11.094.300	99,99

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12.917.000	12.913.100	99,97
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.124.000	7.123.500	99,99
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	19.919.000	19.911.000	99,96
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.579.000	5.563.500	99,72
	Program Pengelolaan Persampahan	6.688.555.000	6.557.894.942	98,05
	Program Penataan Desa	2.208.252.000	2.192.709.000	99,30
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	142.063.000	141.201.000	99,39
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.269.818.000	2.840.364.114	86,87
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	470.304.000	413.181.500	87,85

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	839.827.000	689.908.144	82,15
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	172.952.000	169.111.997	97,78
	Program Penanggulangan Bencana	416.921.000	355.049.494	85,16
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.169.000	2.169.000	100,00
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	945.339.000	933.696.491	98,77
	Program Penempatan Tenaga Kerja	358.024.000	327.870.200	91,58
	Program Hubungan Industrial	474.638.000	432.964.200	91,22
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	77.400.000	77.397.000	100,00
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	521.842.000	322.821.000	61,86
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.220.444.000	1.157.768.122	94,86
	Program Pengembangan UMKM	1.559.557.000	1.537.520.987	98,59
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.230.000	10.227.800	99,98

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.506.897.000	2.368.971.740	94,50
	Program Penataan Bangunan Gedung	1.152.805.000	969.640.172	84,11
	Program Penyelenggaraan Jalan	90.239.513.000	88.137.231.533	97,67
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	459.537.000	399.650.280	86,97
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	70.004.000,00	68.923.840,00	98,46
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	201.608.000	185.651.463	92,09
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7.549.000	7.546.863	99,97
	Program Penatagunaan Tanah	270.000.000,00	263.775.102,00	97,69
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.977.124.000	13.525.565.363	96,77%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	568.605.000,00	467.486.055,00	82,22
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	134.400.000,00	133.768.488,00	99,53
	Program Pengembangan Perumahan	272.064.000	260.184.303	95,63

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Kawasan Permukiman	835.434.000	822.343.101	98,43
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	155.664.000	155.073.873	99,62
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.448.979.000	1.443.218.550	99,60
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.276.224.704.000	1.239.159.840.576	97,10
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.411.574.000	11.397.419.555	91,83
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.366.759.000	1.199.346.728	87,75
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.813.415.000	27.675.522.406	99,50
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	526.805.000	412.794.301	78,36
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	319.007.000	310.360.490	97,29
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	410.879.959.000	398.139.718.274	96,90
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.081.170.000	989.549.058	91,53
	Program Pengelolaan Pendapatan	1.800.418.000	1.608.618.272	89,35

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Daerah			
	Program Kepegawaian Daerah	1.155.092.000	1.037.794.104	89,85
	Program Pendidikan dan Pelatihan	38.430.000	38.404.700	99,93
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.430.000	38.404.700	99,93
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.430.000	38.404.700	99,93
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	132.660.000	126.778.324	95,57
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.249.540.000	1.099.345.280	87,98
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	485.973.000	409.836.627	84,33
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	459.734.000	435.545.674	94,74
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.478.367.000	5.448.305.542	99,45
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	491.859.000	489.869.000	99,60
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	391.123.000	389.034.150	99,47

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.295.000	48.705.500	94,95
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	47.223.000	47.123.000	99,79
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	31.459.000	31.344.700	99,64
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	868.497.000	801.037.558	92,23
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.167.225.000	1.061.820.515	90,97
	Program Pendaftaran Penduduk	1.073.580.000	1.073.388.952	99,98
	Program Pencatatan Sipil	65.430.000	65.336.506	99,86
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	274.199.000	274.180.365	99,99
	Program Pengelolaan Arsip	32.124.000	32.105.890	99,94
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	21.050.000	21.048.037	99,99
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90.288.000	45.670.000	50,58
	Program Pengelolaan Pendidikan	151.069.125.000	147.995.598.340	97,97
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.113.213.000	1.113.037.786	99,98

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan Sejarah	12.326.000	5.530.000	44,86
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	124.241.000	116.697.000	93,93
	Program Pengelolaan Permuseuman	628.923.000	622.878.346	99,04
	Program Pembinaan Perpustakaan	855.920.000	754.603.536	88,16
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	27.876.000	27.570.671	98,90
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	549.729.000	535.525.459	97,42
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.343.527.000	5.072.145.145	94,92
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	350.000.000	100,00
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	527.641.000	508.596.581	96,39
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.137.336.000	2.118.000.604	99,10
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	680.822.000	657.548.800	96,58

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	164.040.000	160.770.000	98,01
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	662.720.000	610.949.000	92,19
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.967.416.000	80.238.911.008	94,43
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	768.389.000	743.820.506	96,80
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	196.859.000	166.114.911	84,38
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	223.695.000	208.714.382	93,30
	Program Pemberdayaan Sosial	845.250.000	835.159.100	98,81
	Program Rehabilitasi Sosial	7.154.827.000	5.578.125.158	77,96
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.287.410.000	2.126.085.000	92,95
	Program Penanganan Bencana	150.171.000	103.385.700	68,85
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	123.043.000	122.743.420	99,76

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	114.825.000	114.769.925	99,95
	Program Perlindungan Perempuan	203.774.000	200.651.550	98,47
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	2.158.000	2.142.600	99,29
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	176.831.000	175.925.459	99,49
	Program Perlindungan Khusus Anak	353.599.000	350.889.653	99,23
	Program Pengendalian Penduduk	500.591.000	495.635.026	99,01
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.407.364.000	6.246.195.747	84,32
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.248.557.000	5.098.457.900	97,14

Tabel 2. 14
Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
Pendapatan Perkapita (ADHB)	98,37			
Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	100,00			

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
Tingkat Kemiskinan	112,03			
Pertumbuhan Ekonomi	141,33	25.830.245.000	25.035.543.336	96,92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	102,69	22.211.195.000	20.949.720.901	94,32
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	104,12	112.300.183.000	109.209.030.726	97,25
Indeks Reformasi Birokrasi	100,28	1.746.015.531.000	1.693.900.983.484	97,02
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,11	275.062.486.000	263.502.848.313	95,8

Tabel 2. 15
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Perkapita (ADHB)	35.000	34.430	98,37				
Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,334	0,334	100,00				
Tingkat Kemiskinan	14,06	12,55	112,03				
Pertumbuhan Ekonomi	4,5	6,36	141,33	25.830.245.000	25.035.543.336	96,92	Efisien
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	4,83	102,69	22.211.195.000	20.949.720.901	94,32	Efisien
Indeks Daya Saing Infrastruktur	69,01	71,85	104,12	112.300.183.000	109.209.030.726	97,25	Efisien

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
Daerah							
Indeks Reformasi Birokrasi	82,5	82,73	100,28	1.746.015.531.000	1.693.900.983.484	97,02	Efisien
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,63	71,71	100,11	275.062.486.000	263.502.848.313	95,8	Efisien

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian target Kinerja

Target kinerja sebagaimana dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Misi 1 :
“MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

TUJUAN :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 sampai dokumen LPPD disusun belum release dari KemenPanRB sehingga capaian kinerja juga belum dapat disajikan.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good governance and clean government*)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,22	67,89	66.2	81,96	69	82,73	119,90

Sumber: Dokumen LKjIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan masa transisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Suhubungan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Surat Edaran tersebut disusun untuk mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025-2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025-2029. Selain itu Surat Edaran dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan

dan sasaran RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dalam peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan.

Beberapa ketentuan pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan monitoring tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.
2. Instrumen Evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi yang digunakan pada evaluasi RB Tahun 2024.
3. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan Menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana AKSi Tematik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024
 - b) Rencana Aksi RB Tematik untuk tema Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB Tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025-2029
 - c) Instansi pemerintah diharapkan mulai Menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB tematik baru, yaitu :
 - RB mendorong Hilirisasi
 - RB mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
 - RB mendukung Ketahanan Pangan, dan
 - RB mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi Refomasi Birokrasi Tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Meninjau kembali indikator output pada setiap rencana aksi agar relevan dan cukup dalam merepresentasikan keterukuran hasil aksi yang ingin dicapai;
2. Mendorong instansi untuk menetapkan target indikator output secara lebih terukur dan berorientasi peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan baseline capaian, target nasional, serta kebutuhan pencapaian sasaran, sehingga target dapat berfungsi sebagai alat kendali dan pendorong perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi;

Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum di Indonesia. IRH dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan. Indeks Reformasi Hukum bertujuan untuk memperkuat sistem regulasi nasional. Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga

tahun 2025 sebesar **99,52** dengan kategori **AA (Istimewa)**, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai sebesar **97,14**. Penilaian Indeks Reformasi Hukum berdasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.
2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas.
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu.
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Tabel 2. 17
Nilai IRH Berdasarkan Variabel

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	24,4
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	25	23,2
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	30
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
Nilai Total Penilaian Indeks Reformasi Hukum		100	97,6

Sumber: Laporan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Pada penilaian tahun 2025, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading institutional* IRH di level meso memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan nilai IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 18
Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

No	Penialian	Nilai
1	Nilai Awal	97,60

2	Nilai Apresiasi	1,92
3	Nilai Akhir	99,52

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu bagian dari agenda Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola *Pengadaan* minimal mendapatkan predikat BAIK. Untuk mencapai ITKP minimal baik, skor penilaian minimal yang harus didapatkan adalah 70.

Gambar 2. 1
Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024



Dari gambar tersebut diketahui bahwa nilai ITKP Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 76,98 dengan kategori **BAIK** atau meningkat dibandingkan capaian ITKP Tahun 2023 sebesar 62,91. Adapun pencapaian nilai skor ITKP 76,98 tersebut meliputi :

1. Hasil penilaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 28,09 (skor maksimal 30);
2. Hasil penilaian Indikator Tingkat Kematangan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPJ) sebesar 40,00 (skor maksimal 40);dan
3. Hasil penilaian Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) sebesar 8,89 (skor maksimal 30).

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian ITKP antara lain :

1. Adanya pergantian admin/staf pendukung dari OPD dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) setiap tahun anggaran;
2. Proses yang cukup lama dalam pemenuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) melalui mekanisme Pengangkatan

- Pertama (CPNS dan PPPK);
3. Minimnya SDM ASN bersertifikat PBJ Level 1 yang dapat ditarik menjadi JF PPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Purbalingga.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mencapai nilai dimaksud antara lain :

1. Pendampingan dan monitoring pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) mulai dari input Rencana Umum Pengadaan (RUP), e Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering/e-Purchasing, e-Kontrak sampai serah terima dan penilaian kinerja penyedia;
2. Mengadakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Indeks BerAKHLAK

Indeks BerAKHLAK merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

Pada Tahun 2025, Kementerian PANRB tidak melaksanakan penilaian Indeks berAKHLAK sehingga sesuai dengan SE Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 nilai tersebut menggunakan nilai pada penilaian Tahun 2024.

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada Tahun 2024, diperoleh Indeks BeAKHLAK sebesar **79,5%** dengan kategori **Sehat (A)**. Nilai ini meningkat **15,9** point dari tahun 2023 (**63,6%**). Indeks BerAKHLAK tersebut merupakan hasil dari survei BerAKHLAK dan evaluasi Organisasi. Survei Indeks BerAKHLAK diikuti oleh 5.700 ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan rincian PNS sejumlah 4.074 orang dan PPPK sejumlah 1.626 orang. Adapun dimensi penilaian meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Tabel 2. 19
Indeks BerAKHLAK Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1.	Hasil Survei BerAKHLAK	80	79,0%	63,2%
2.	Hasil Evaluasi Organisasi	20	26/32	16,3%
Indeks BerAKHLAK				79,5%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68,1%

Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Indikator evaluasi RB yang selanjutnya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP). Terkait dengan IPP, pada Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan **Pelayanan** Publik (PEKPPP) pada 2 (dua) Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 20
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Unit Penyelenggara
Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO	UPP	KATEGORI	NILAI
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	3,94
2.	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	4,78
	Rata – rata	B	3,72

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga

Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 4,44 atau turun sebesar 0,72. Nilai Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan nilai Tahun 2025, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada sistem penilaian.

Selain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna mengetahui tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, OMBUDSMAN Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan bagian dari upaya menuju Reformasi Birokrasi yang melibatkan kecepatan, fleksibilitas, inovasi, dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025, Ombudsman tidak melaksanakan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dikarenakan Kabupaten Purbalingga bukan merupakan lokus penilaian, sehingga nilai yang digunakan nilai Tahun

2024.

Mendasari Surat Kepala OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor R/3446/PC.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar **96,49 kategori A, zona hijau, opini Kualitas Tertinggi**, naik 2,79 poin jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar 93,70.

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh KemenPAN RB maupun Ombudsman RI, dilaksanakan terhadap aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Peningkatan Profesionalitas ASN

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin. Tingkat profesionalitas pegawai di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berkala setiap tahun, melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN yang telah disediakan yaitu SPAK. Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupten Purbalingga sebesar 82,54 masuk dalam kategori **"TINGGI"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 79,38, maka IP ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,16.

Adapun perincian dimensi dan nilai IP ASN Kabupaten Purbalingga tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 21
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Per Dimensi
Profesionalitas Tahun 2025

NO	DIMENSI PROFESIONALITAS	KATEGORI	NILAI
1	Dimensi Kualifikasi	SR/R/S/T	20,43
2	Dimensi Kompetensi	SR/R/S/T	32,30

NO	DIMENSI PROFESIONALITAS	KATEGORI	NILAI
3	Dimensi Kinerja	SR/R/S/T	24,82
4	Dimensi Disiplin	SR/R/S/T	5
J u m l a h			79,38

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga

Berkaitan dengan Sistem Merit, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, berdasarkan Pasal 28A Perpres Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2024, tugas dan fungsi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) beralih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Tahun 2025 BKN tidak melaksanakan penilaian Sistem Merit sehingga penilaian sistem merit menggunakan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Mandiri Penilaian Sistem Merit.

Hasil Penilaian Mandiri Penilaian Sistem Merit Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Berita Acara Penilaian Mandiri Sistem Merit Nomor 800/5079.85 Tahun 2025 sebesar 0,73 dengan **kategori III (BAIK)**, naik 0,10 dari nilai Tahun 2024.

Rekap Penilaian Mandiri Merit Sistem tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2. 22
Nilai Penilaian Mandiri Merit Sistem Tahun 2025

No	Aspek	Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	40,0
2	Pengadaan	40,0
3	Pengembangan Karir	77,5
4	Mutasi dan Promosi	32,5
5	Manajemen Kinerja	52,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	32,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	10,0
8	Sistem Informasi	12,0

No	Aspek	Nilai
	Jumlah	297
	Indeks	0,73

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Purbalingga

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia.

Perwujudan kapabilitas APIP berkelas dunia yang ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP pada level yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sampai saat doku,men LPPD disusun belum rlease dari BPKP sehingga capaian dan analisis belum dapat tersaji

Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2025, BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri oleh Penjamin Kualitas sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-892/PW11/3.2/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yaitu Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,174.

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi meliputi 3 unsur, yaitu Maturitas SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).Manajemen Resiko Indeks (MRI) merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen resiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan resiko. Terkait MRI tersebut,

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar 2,981. Parameter penilaian MRI ini dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dengan 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko di dalam organisasi.

Dimensi dan indikator penilaian IEPK dikelompokkan dalam 3 pilar yaitu, pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Dalam penilaian IEPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar 2,910.

Tabel 2. 23
Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,174
2	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,981
3	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,910

Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan

Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan sesuai standar nasional. Pengawasan Kearsipan terdiri dari Pengawasan Kearsipan eksternal dan internal. Pengawasan Kearsipan eksternal dilakukan oleh ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap penciptaan arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purbalingga sebesar 91,67 dengan katagori **AA “SANGAT MEMUASKAN”**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 24
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	91,67	60%	55,00

Internal	74,34	40%	29,73
Nilai akumulasi			85,23

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Penilaian pengawasan kearsipan dilakukan oleh instansi vertikal yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap semua Lembaga Kearsipan Daerah di wilayah Jawa Tengah. Penilaiannya dibagi menjadi 2 (dua) bobot, yaitu Pengawasan Internal (PD) sebesar 40% dan Pengawasan Eksternal (LKD) sebesar 60%. Pada tahun 2025 tim pengawasan/monitoring internal Kabupaten Purbalingga melakukan penilaian pada 25 Perangkat Daerah.

Penilaian eksternal dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola/ pengelolaan arsip yang meliputi lima (5) aspek, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 25
Penilaian eksternal dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola/ pengelolaan arsip

No	Aspek/ Komponen	Nilai	Nilai Standar	Bobot Aspek	Nilai Aspek
1.	Aspek Kebijakan	1070	1100	15%	14,59
2.	Aspek Pembinaan	1680	1900	25%	24,34
3.	Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 th	770	800	10%	9,63
4.	Aspek Pengelolaan Arsip Statis	1970	2200	30%	26,86
5.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	1610	2400	20%	16,25
	TOTAL NILAI	6850	8400	AA (SANGAT MEMUASKAN)	91,67

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, didukung oleh capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAHAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah* dengan indikator Nilai SAKIP tahun 2025

adalah 68,29 atau capaian sebesar 97,54. Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Nilai SAKIP	Angka	B 64,06	B 65,94	B 67,02	B 68,10	B 70,01	B 68,29	97,54

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 68,29 meningkat 0,19 jika dibandingkan dengan nilai tahun 2024 sebesar 68,10 dengan predikat “B”. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD 2021-2025 realisasi masih dibawah target atau dengan capaian sebesar 85,36%.

Adapun rincian hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 27
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,91
Pengukuran Kinerja	30	18,73
Pelaporan Kinerja	15	10,74
Evaluasi Internal	25	15,91
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dengan nilai sebesar 68,29 (predikat “B”), menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sudah baik” pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih diperlukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Perlu melakukan peninjauan kembali atas target yang masih menggunakan rentang nilai, kemudian mengonversinya menjadi target tunggal yang spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kapasitas dan kondisi kinerja. Penyesuaian ini diperlukan untuk memperkuat pengendalian kinerja serta untuk dasar evaluasi capaian kinerja secara objektif;
 - b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga disarankan memperkuat results chain/logical framework dengan memetakan kembali peran setiap kinerja terhadap pencapaian kinerja di atasnya. Penajaman alur "jika-maka" perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja mencerminkan logika perubahan yang realistis dan terukur. Sehingga setiap level kinerja menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Rantai hasil harus menggambarkan bagaimana output berkontribusi pada immediate, intermediate, hingga ultimate outcome;
 - c. Melakukan reviu perjanjian kinerja setiap level jabatan, untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja telah menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan secara jelas dan spesifik serta berorientasi hasil;
 - d. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memastikan bahwa setiap pegawai dari level pimpinan hingga level staf memahami sasaran unit, indikator kinerja, serta kontribusi masing-masing terhadap pencapaian hasil. Mekanisme komunikasi internal dan penyebaran informasi kinerja harus diperkuat, pimpinan perlu menegakkan budaya kerja yang mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam perbaikan kinerja
2. Pengukuran Kinerja
- a. Melakukan penajaman indikator kinerja dengan memastikan keterukuran, relevansi terhadap sasaran strategis, serta kecukupan indikator dalam menggambarkan hasil yang ingin dicapai, sehingga indikator kinerja prinsip SMART-C, dan agar Indikator Kinerja benar-benar mencerminkan perubahan yang ingin dicapai dan dapat dipantau secara konsisten;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai bahan dialog kinerja dan pengendalian, termasuk dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, sehingga pengukuran kinerja dapat digunakan secara aktif untuk perbaikan strategi dan peningkatan capaian outcome.
3. Pelaporan Kinerja
- Mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas substansi pelaporan kinerja dengan melengkapi laporan dengan analisis capaian kinerja yang menjelaskan penyebab kinerja, dampaknya terhadap sasaran hasil, serta arah perbaikan yang diperlukan, sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

4. Evaluasi Internal

- a. Meninjau ulang proses penyusunan laporan evaluasi AKIP internal agar mencakup identifikasi masalah utama, penyebab deviasi, serta rekomendasi perbaikan yang relevan dan realistis. Penguatan konten ini akan membantu memastikan bahwa laporan evaluasi benar-benar memberikan arah perbaikan kinerja;
- b. Memperkuat komitmen evaluator internal untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi internal secara sistematis dan konsisten.

Misi 2 :

“MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEHADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEBHINEKAAN”

TUJUAN :

MENINGKATKAN KONDUSIFITAS WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TOLERAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat yang Tertib dan Toleran" dengan indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas pada tahun 2025 adalah 1,086 atau capaian sebesar 128,91 persen dari target 1,40.

Tabel 2. 28
Capaian Indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Angka konflik sosial dan kriminalitas	angka	Na	1,11	1,89	0,77	1,40	1,086	128,91

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Angka konflik sosial dan kriminalitas tahun 2025 sebesar 1,086 dengan atau meningkat 0,316 dari tahun 2024 sebesar 0,77.

Pada tahun 2025 terjadi potensi konflik sebanyak 40 kasus. Dari 40 potensi konflik yang muncul dimasyarakat semuanya berhasil diredam

dengan damai.

Tabel 2. 29
Potensi konflik

Uraian	Satuan	Potensi Konflik	Potensi Konflik yang dapat diredam	Potensi konflik tidak dapat diredam
Potensi konflik	Kasus	40	40	0

Sumber data : Kesbangpol Kab. Purbalingga

Penyebab masih tingginya potensi konflik ditahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Fenomena geng motor yang sering melakukan tawuran menunjukkan lemahnya karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda. Dari sisi karakter, perilaku tersebut mencerminkan rendahnya pengendalian diri, kurangnya empati, degradasi nilai moral, serta pemahaman sempit penyelesaian konflik dengan kekerasan;
2. Perbedaan cara pandang dalam memberikan penghormatan kepada tokoh agama, sehingga menumbuhkan fanatisme berlebihan terhadap tokoh agama, salah paham tentang otoritas keagamaan, serta rendahnya literasi keagamaan dalam menyikapi perbedaan. Konflik ini sering diperparah oleh politisasi agama, provokasi media sosial, dan kepentingan kelompok tertentu, sehingga perbedaan pandangan berkembang menjadi permusuhan;
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa disebabkan antara lain lemahnya tata kelola, integritas aparatur, dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat desa menginginkan transparansi, penegakan etika perangkat pemerintahan desa, pelayanan publik yang baik, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap kebijakan desa;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dalam mengatasi aktivitas-aktivitas yang diduga melanggar hukum sehingga masyarakat memilih bertindak sendiri.

Sedangkan penyebab yang paling dominan dari potensi konflik ditahun 2025 adalah tawuran antar geng motor dan pemuda, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak luput dari norma, aturan, standar serta ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara sigap, professional, akuntabel dan humanis (SiPUMA). Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pelanggaran trantibum di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebanyak 1.415 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 479 kasus dari angka pelanggaran trantibum di tahun 2024. Dari 1.415 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2025, yang terbanyak adalah pelanggaran reklame yaitu sebanyak 747 kasus. Berikut rincian pelanggaran trantibum dari tahun 2020 sampai dengan 2025.

Tabel 2. 30
Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis Pelanggaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	PGOT	104	156	166	116	116
2	PKL	942	358	142	52	241
3	Razia Anak Sekolah	-	-	99	11	38
4	Razia PSK	-	-	-	-	-
5	Razia Miras	17	22	33	29	18
6	DBHCHT	-	13	8	53	83
7	Razia Reklame	1.670	2.306	1.678	1.595	747
8	Protokol Kesehatan	2.498	978	-	-	-
9	Rumah Kost	-	64	17	4	15
10	Aduan Masyarakat	-	49	46	34	157
	JUMLAH	5.231	3.946	2.189	1.894	1.415

Sumber : Data SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebanyak 1.415 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 479 kasus dari angka pelanggaran trantibum di tahun 20234 sebanyak 1894 kasus.

Menurunnya Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Pada tahun 2025 angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 116 kasus, yang artinya mengalami kenaikan sebanyak 35 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 81 kasus.

Tabel 2. 31
Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

No	Kasus	2021	2022	2023	2024	2025
----	-------	------	------	------	------	------

		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian Berat	142	99	173	113	41	18	21	14	18	18
2	Pencurian dengan kekerasan					3	2	0	0	4	4
3	Pencurian Kendaraan Bermotor					48	29	2	1	18	18
4	Pencurian Biasa					21	11	11	7	11	11
5	Penipuan					18	16	4	3	10	10
6	Pengelapan					11	8	14	11	3	3
7	Perjudian					6	6	9	9	3	3
8	Pengeroyokan					2	2	1	0	3	3
9	Korupsi					2	2	0	0	2	2
10	Penganiayaan					12	11	4	3	9	9
11	Pencabulan					5	5	1	1	4	4
12	Persetubuhan					14	13	8	8	13	13
13	Perzinaan					0	0	0	0	7	7
14	Pengerusakan					0	0	0	0	1	1
15	Fidusia					1	1	0	0		
16	Pemerasan					0	0	0	0		
17	ITE/hoax					1	1	0	0	1	1
18	Pencemaran Nama Baik					0	0	0	0		
19	Perbuatan tidak menyenangkan					0	0	0	0		
20	Perampasan					0	0	0	0		
21	Pencurian ringan					2	2	1	1		
22	Perkelahian					0	0	0	0		
23	Kekerasan Anak/ KDRT/ Senjata Tajam tidak berijin					2	2	5	5		
24	Serobot Tanah					0	0	0	0		
25	Percobaan Pemerkosaan/ Pencabulan					0	0	0	0		
Jumlah		142	99	173	113	189	129	81	63	116	116

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Ket :

L : Lapor

S : Selesai

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025, rata-rata jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 166 kasus. Kasus-kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetubuhan dan penganiayaan.

Masih adanya permasalahan terkait kriminalitas tak lepas dari adanya beberapa faktor penyebab. Salah satu penyebabnya yaitu lingkungan tidak aman yang merupakan dampak dari adanya bencana. Hal

ini menunjukkan bahwa bencana telah menjadi fenomena sosial mengingat bencana mempengaruhi kehidupan manusia. Hal demikian terjadi mengingat dampak yang telah dimunculkan akibat bencana telah menghancurkan tatanan atau struktur sosial yang ada. Korban kelaparan, kemiskinan, hilangnya pekerjaan hingga penyakit sosial yang mengarah pada kriminalitas kerap terjadi di daerah yang tertimpa bencana.

Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Purbalingga telah memetakan daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan faktor topografi yang beraneka ragam meliputi dataran tinggi/pegunungan dan dataran rendah. Adapun berikut capaian pengukuran kinerja “Terwujudnya Pemetaan Resiko Bencana” dengan indikator pengukuran Indeks Resiko Bencana Indonesia.

Keberhasilan penurunan Indeks Resiko Bencana tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Hal ini diperkuat dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dikategorikan memiliki risiko bencana **Sedang**. Skor IRBI mencapai 120,19, dengan fokus utama potensi bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir, yang didukung dengan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB). Indeks tersebut diukur dengan memperhitungkan potensi dampak negatif yang timbul akibat suatu potensi bencana yang ada serta dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Indeks Ketahanan Bencana

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 sebesar 0,58 hasil evaluasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi). Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui rata-rata persentase cakupan pelayanan bencana alam dan cakupan desa tangguh bencana yang diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam.

Cakupan Pelayanan Bencana Alam merupakan penanganan terhadap setiap kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 32
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis Bencana/ Kejadian	Jumlah Kejadian		Terdampak								
				Jiwa		Rumah						
				Meninggal (orang)	Luka (orang)	Roboh (Unit)	Rusak berat (Unit)	Rusak sedang (Unit)	Rusak ringan (Unit)	Terancam	Terendam	Jumlah
1	Angin Kencang/ Cuaca Ekstrem	38	kali	1	4	0	23	45	187	0	0	255
2	Banjir	9	kali	0	0	0	1	1	0	0	71	73
3	Tanah Longsor	52	kali	0	0	0	38	24	14	48	0	124
4	Gempa	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Karhulta	1	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kekeringan	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		100	kali	1	4	0	62	70	201	48	71	452

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, terjadi 100 kali kejadian dengan 6 jenis bencana yakni cuaca ekstrem sebanyak 38 kali kejadian, banjir 9 kali kejadian, tanah longsor terjadi 52 kali kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 1 kali. Dengan jumlah orang terdampak meninggal sebanyak 1 orang dan rumah rusak, terancam dan terendam sebanyak 452 unit.

Kemudian bagi yang terdampak bencana, ditemukan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka. Sedangkan untuk tempat tinggal yang terdampak dengan jumlah paling banyak yaitu rumah dengan kondisi rusak ringan sebanyak 201 unit dan rumah terendam sebanyak 71 yang disebabkan oleh bencana banjir.

Tabel 2. 33
Kejadian Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024	2025
Angin/Cuaca Ekstrem	28	19	16	32	38
Banjir	7	27	5	7	9

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024	2025
Kebakaran	38	10	39	-	1
Longsor	19	38	31	43	52
Gempa	-	-	1	-	-
Kekeringan	-	-	108	-	-
Jumlah	92	94	200	82	100

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025, dengan melihat pada berbagai jenis bencana cenderung fluktuatif dengan jumlah peningkatan dan penurunan yang tidak terprediksi, tergantung pada wilayah mana yang terdampak dan bencana yang terjadi. Untuk tahun 2025, jumlah kejadian bencana meningkat menjadi 100 kali.

Tabel 2. 34
Dampak Bencana tahun 2022-2025

Dampak Bencana	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Meninggal	Jiwa	1	1	-	-	1
Luka-luka	Jiwa	1	2	-	-	4
Rumah Roboh	Unit	10	4	1	-	-
Rumah Rusak Berat	Unit	28	7	31	17	62
Rumah Rusak Sedang	Unit	39	23	43	53	70
Rumah Rusak Ringan	Unit	288	163	252	92	201
Terancam	Unit	12	25	25	34	48
Terendam	Unit	251	-	513	202	71
Jumlah		630	225	865	398	452

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, dampak bencana yang paling dominan dari tahun 2021 – 2025 yaitu terjadi pada tempat tinggal kategori rumah dengan kerusakan ringan, dimana kerusakan paling banyak terjadi di tahun

2020 sebanyak 1.110 unit rumah. Selain itu, tahun 2020 juga menjadi tahun dengan jumlah terdampak paling banyak dari segi tempat tinggal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya. Untuk tahun 2025, kejadian bencana mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Sedangkan kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi diakibatkan bencana pada tahun 2025 terdapat 452 rumah rusak baik rusak berat, sedang maupun ringan sebanyak 333 unit serta beberapa rumah terancam dan terendam sebesar 119 unit.

Tabel 2. 35
Kerugian akibat bencana tahun 2021 – 2025

Jumlah Kerugian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Angin/Cuaca Ekstrem	Juta	706,5	453,5	314,4	441,66	1.313,050
Banjir	Juta	19,0	25,0	81,7	1.809,5	175,480
Kebakaran	Juta	3.243,0	476,6	1.155,5	-	-
Longsor	Juta	162,0	268,5	1.114,9	2.342	3.300,910
Gempa	Juta	-	-	-	-	-
Jumlah	Juta	4.130,5	1.223,6	2.733,3	4.593,16	4.789,44

Sumber : Data BPBD Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kerugian yang terjadi 2020 – 2025 cenderung fluktuatif, namun jika dilihat dari 3 (tahun) sebelumnya kerugian selalu mengalami peningkatan. Untuk kerugian yang ditimbulkan dari adanya bencana di tahun 2025 sebanyak Rp. 4.789,44 juta yang terdiri dari 3 (tiga) jenis bencana yakni cuaca ekstrem, banjir dan longsor. Kerugian yang terjadi di tahun 2025 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 196,28 juta dari tahun 2024 sejumlah Rp. 4.593,16 juta.

Pada Tahun 2025 guna mengurangi terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana sendiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Cakupan desa tangguh bencana diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam. Adapun pembentukan desa tangguh bencana dilakukan di 6 desa yakni Desa Jingkrang dan Sanguwatang Kecamatan Karangjambu, Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja,, Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dan Desa Cendana Kecamatan Kutasari.

Program yang mendukung tujuan *Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran* adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penanggulangan Bencana
8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Misi 3 :
” MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN
PAPAN SECARA LAYAK”

TUJUAN : **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Hasil evaluasi pada tujuan *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* mendapatkan nilai 99,60% dengan kategori **Tinggi**. Angka Kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan	Persen	16,24	15,3	14,99	14,18	12,5	12,55	99,60

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan fluktuasi. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021

sebesar 16,24 persen. Pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Tahun 2023 angka kemiskinan menjadi sebesar 14,99 persen atau turun sebesar 0,31 persen dari tahun 2022. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga kembali turun dari 14,88 persen di tahun 2023 menjadi 14,18 persen di tahun 2024. Pada tahun 2025, penurunan kemiskinan di Purbalingga sebesar 1,63 persen menjadi 12,55 persen.

Kemiskinan Purbalingga (12,55%) menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di peringkat yang membaik (sekitar urutan ke-7 dari bawah), keluar dari lima besar termiskin di Jawa Tengah, meskipun tetap memiliki tantangan dan bertujuan mencapai 10% pada RPJMD 2025-2029. Posisi ini lebih baik dari data 2024 (sekitar 14,18%) yang menempatkannya di urutan ke-6 termiskin, dengan penurunan terbaik di Jateng.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-29 dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 37
Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGKA KEMISKINAN
	PROVINSI JAWA TENGAH	9,48
1	Kota Semarang	3,8
2	Kota Salatiga	4,2
3	Kota Magelang	5,68
4	Kabupaten Jepara	5,79
5	Kota Pekalongan	6,14
6	Kabupaten Tegal	6,16
7	Kabupaten Semarang	6,3
8	Kabupaten Kudus	6,59
9	Kabupaten Sukoharjo	6,83
10	Kota Tegal	7,28
11	Kota Surakarta	7,69
12	Kabupaten Temanggung	7,78
13	Kabupaten Batang	7,79
14	Kabupaten Pekalongan	8,05
15	Kabupaten Pati	8,24
16	Kabupaten Kendal	8,4
17	Kabupaten Karanganyar	8,48
18	Kabupaten Boyolali	8,71

NO.	URAIAN	ANGKA KEMISKINAN
19	Kabupaten Cilacap	9,41
20	Kabupaten Wonogiri	9,59
21	Kabupaten Magelang	9,9
22	Kabupaten Purworejo	10,06
23	Kabupaten Blora	10,58
24	Kabupaten Grobogan	10,63
25	Kabupaten Demak	10,87
26	Kabupaten Klaten	11
27	Kabupaten Banyumas	11,15
28	Kabupaten Sragen	11,22
29	Kabupaten Purbalingga	12,55
30	Kabupaten Rembang	13,01
31	Kabupaten Banjarnegara	13,28
32	Kabupaten Pemalang	13,32
33	Kabupaten Wonosobo	13,34
34	Kabupaten Kebumen	13,58
35	Kabupaten Brebes	14,15

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Grafik 2. 1
Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tahun 2021

sebanyak 153.100 jiwa dan turun di 2022 menjadi 145.330 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 143.410 jiwa. Pada tahun 2024 sebesar 136.720 jiwa atau menurun sebanyak 6.760 jiwa. Pada tahun 2025 menjadi 121.800 atau turun sebesar 14.920 jiwa. Fluktuasi penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 2. 2
Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tidak lepas dari program yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun para filantropis, baik dilaksanakan sendiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin adalah dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dijalankan antara lain :

1. Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah yang mayoritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.294.950.000,- dengan sasaran sebanyak 1.598 anak.
2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dimana program ini pada tahun 2025 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 251.536 KK. Rumah yang layak huni sebanyak 247.852 68 rumah. Pada tahun 2025 jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab sebanyak 1.201 rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 3.684 rumah. Aktivitasnya rehab RTLH dari APBD Provinsi sebanyak 579 rumah, APBD Kabupaten 5 rumah, dana DD 250 rumah,

Baznas 91 rumah, CSR 156 rumah dan BSPD 120 rumah.

3. Jambanisasi

Program ini diarahkan untuk penyehatan lingkungan sebagai program preventif di bidang kesehatan lingkungan. Jambanisasi juga merupakan sarana mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) serta kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan untuk meningkatkan mutu lingkungan sehat menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pada tahun 2025, paket stimulan jamban keluarga sejumlah 50 paket untuk 5 (enam) desa yaitu :

- a. Desa Pengadegan Kec. Pengadegan : 16 paket
- b. Desa Majasari Kec. Bukateja : 24 paket
- c. Desa Karangturi Kec. Mrebet : 2 paket
- d. Desa Blater Kec. Kalimanapak : 4 paket
- e. Kelurahan Wirasana Kec. Purbalingga : 4 paket

4. Rantang berkah

Program Rantang Berkah merupakan pemberian makanan siap santap untuk lanjut usia kurang mampu dan sebatangkara yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dalam seleksi pemilihan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang, yaitu penyeleksian dilakukan oleh penyedia rantang berkah yang dikoordinasikan dengan pihak Desa, kemudian diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Penyedia rantang berkah sendiri merupakan pemilik UMKM berjumlah 27 penyedia. Jumlah penerima rantang berkah sebanyak 510 orang yang diberikan selama 365 hari.

5. Operasionalisasi Rumah Singgah

Rumah Singgah Dharma Perwira Kabupaten Purbalingga diresmikan pada tanggal 8 April 2019. Rumah singgah dapat digunakan untuk persinggahan sementara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang berasal dari Kabupaten Purbalingga maupun dari luar kabupaten. Adapun fasilitas yang dapat dimanfaatkan, 4 shelter untuk perempuan, 4 shelter untuk laki-laki, 2 ruang isolasi untuk perempuan, 2 ruang isolasi untuk laki-laki, 3 kamar mandi, ruang aula, ruang makan, ruang kesehatan, ruang konseling dan tempat parkir.

6. Bantuan Sosial kepada anak yatim

Bantuan anak yatim piatu diberikan kepada 5.000 anak, dimana masing-masing anak mendapatkan Rp.200.000,- dengan jumlah anggaran Rp.1.000.000.000,-.

7. Bantuan orang dengan kecacatan berat

Bantuan untuk orang dengan kedisabilitas berat (ODKB) diberikan secara rutin selama 12 bulan yang diberikan kepada 300 anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.080.000.000. Bantuan tersebut diberikan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan atau membantu kebutuhan disabilitas berat, sehingga kehidupannya dapat lebih baik.

8. Jaminan kesehatan keluarga miskin

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS.

Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp28.061.966.600,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp26.966.381.200,- dan Rp1.095.585.400,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBPU dan BP kelas 3. Sedangkan Capaian *Universal Health Coverage* (UHC) pada Desember tahun 2025 sebesar 100,14% dari total penduduk di Kabupaten Purbalingga, dimana 79,17% diantaranya adalah peserta aktif.

9. Usaha Mikro Naik kelas

Program ini mendorong agar usaha mikro naik kelas. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan tenaga pendamping UMKM di setiap kecamatan, melakukan kerjasama dengan LIPI untuk alih teknologi, pelatihan teknis, fasilitasi teknologi dan kewirausahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Hibah Bagi Paguyuban UMKM, sebesar Rp.1.312.000.000,- digulirkan untuk 54 pelaku UMKM .
- Pelatihan UMKM kepada 54 pelaku yang dilakukan sebanyak 10 kali.

10. Kartu Tani

Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses petani pada pupuk bersubsidi guna mendukung program ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Secara filosofis, program ini dilandasi akan pentingnya menjamin produksi dan produktivitas komoditas pertanian, mendukung program ketahanan pangan, dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang.

Manfaat Kartu tani yang diberikan petani adalah :



- Kepastian ketersediaan saprota bersubsidi/nonsubsidi;
- Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara);
- Kemudahan akses pembiayaan (KUR);
- Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
- Biaya simpanan lebih ringan;
- Mendapatkan program Prona (BPN);
- Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop);
- Kemudahan mendapatkan bansos.

Jumlah kartu tani yang tercetak 49.125 kartu tani. Kartu tani yang sudah terdistribusi di Kabupaten Purbalingga sebanyak 49.051 kartu tani sedangkan yang belum terdistribusi sebanyak 74 kartu tani. Kartu tani yang digunakan 28.187 kartu tani. Kartu tani yang digunakan Kabupaten Purbalingga sebesar 57,78 % di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 68,87 persen menempati rangking 26 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani urea sebesar 10.399.989 kg dan NPK sebesar 9.839.415kg

11. Tuka-tuku Produk Purbalingga

TUKA-TUKU adalah sebuah platform yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pemasaran produk UMKM. TUKA-TUKU akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, terutama pasar on line. Tuka-Tuku menyediakan personel untuk membantu branding produk yang ditampilkan antara lain membantu foto, editing, deskripsi produk dan pemasaran produk serta melakukan live streaming di Media Sosial untuk memperluas pemasaran produk Usaha Mikro. Hasil yang dicapai :

- Sampai saat ini program tuka-tuku telah ada 63 item barang. Barang-barang tersebut sudah melalui kurasi dan branding
- Omset pada tahun 2025 sebesar Rp.106.004.000,-

12. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. Syarat untuk dapat tinggal di Rusunawa Kabupaten Purbalingga adalah WNI penduduk Kabupaten Purbalingga yang dikhususkan bagi pekerja pabrik, masyarakat berpenghasilan rendah (kurang dari Rp.8.000.000-), belum memiliki rumah dan mengisi formulir pendaftaran sesuai ketentuan. Jumlah Penghuni Rusunawa pada tahun 2025 adalah sebanyak 47 kepala keluarga.

13. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

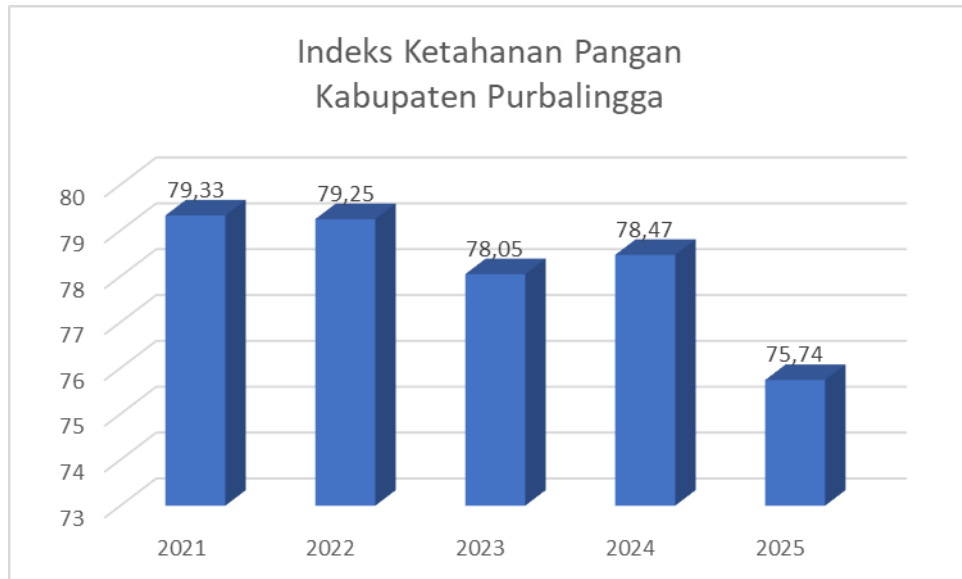
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID adalah :

- a. Peningkatan kualitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah, mendorong struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- b. Perbaikan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat.
- c. Peningkatan kegiatan operasi pasar khususnya operasi pasar bahan pokok masyarakat.
- d. Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi
- e. Penyusunan laporan hasil analisis permasalahan ekonomi sektor riil untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian pangan di daerah.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) harus secara komprehensif yaitu melihat dari besarnya skor dan posisi peringkat secara nasional dikomparasikan dengan skor yang menggambarkan katagorisasi suatu daerah termasuk daerah yang tahan pangan atau rentan. Meskipun secara skor dan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga ada kecenderungan mengalami penurunan, tetapi dari sisi skor yang diperoleh masih masuk dalam katagori daerah yang sangat tahan pangan, karena skornya masih diatas 70, disamping itu secara peringkat Kabupaten Purbalingga juga termasuk diatas atau diatas setengah dari jumlah Kabupaten. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 75,74. Capaian ini turun 2,73 dari capaian 2024 sebesar 78,47.

Grafik 2. 3
Indeks Ketahanan Pangan



Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga

Akses Terhadap Air Minum

Rumah tangga menggunakan air bersih terus meningkat, yaitu dari 87,6 persen di tahun 2017 hingga mencapai 96,52 persen di tahun 2025. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, terutama pada wilayah kekeringan sehingga akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju universal access 100-0-100.

Tabel 2. 38
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH AKSES SAM		JUMLAH RUMAH BELUM AKSES	%
			PERPIPAAN	NON PERPIPAAN		
1	BOBOTSARI	12.320	5.298	6.665	357	97,10
2	BOJONGSARI	14.803	5.893	8.809	101	99,32
3	BUKATEJA	20.636	2.706	15.978	1.952	90,54
4	KALIGONDANG	16.400	6.558	9.185	657	95,99
5	KALIMANAH	14.810	7.434	7.376	-	100,00
6	KARANGANYAR	9.542	4.410	4.940	192	97,99
7	KARANGJAMBU	6.106	4.021	2.053	32	99,48
8	KARANGMONCOL	13.417	5.373	7.526	518	96,14
9	KARANGREJA	10.115	3.870	5.958	287	97,16
10	KEJOBONG	12.899	4.317	8.393	189	98,53

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH AKSES SAM		JUMLAH RUMAH BELUM AKSES	%
			PERPIPAAN	NON PERPIPAAN		
11	KEMANGKON	18.268	7.530	10.530	208	98,86
12	KERTANEGARA	8.469	2.636	5.833	-	100,00
13	KUTASARI	15.321	6.714	8.607	-	100,00
14	MREBET	18.600	6.890	10.525	1.185	93,63
15	PADAMARA	10.846	4.685	6.161	-	100,00
16	PENGADEGAN	10.966	8.228	2.607	131	98,81
17	PURBALINGGA	14.563	10.817	3.746	-	100,00
18	R E M B A N G	19.771	9.711	7.250	2.810	85,79
JUMLAH		247.852	107.091	132.142	8.619	96,52

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2025

Guna meningkatkan akses air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program dimaksud adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan ketercukupan akses air minum guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembangunan SPAM di 1 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 35 SR.
- b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)
Perluasan jaringan SPAM di 2 lokasi/desa sebanyak 22 SR.

Akses Sanitasi

Rumah tangga bersanitasi pada tahun 2025, persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 95,42 persen. Akses sanitasi selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya meningkatkan kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Akses sanitasi yang paling besar yaitu berupa Jamban Sehat Permanen, kemudian diikuti dengan Jamban Sehat Semi Permanen dan Jamban Sharing. Saat ini kondisi di Kabupaten Purbalingga masih terdapat masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Tabel 2. 39
Rumah Tinggal Yang Mempunyai Akses Sanitasi

No.	Kecamatan	Total Rumah	Rumah Akses Septictank	
			Jumlah	%
1	Bobotsari	12.320	10.336	83,90
2	Bojongsari	14.803	13.946	94,21
3	Bukateja	20.636	20.636	100,00
4	Kaligondang	16.400	16.400	100,00
5	Kalimanah	14.810	14.421	97,37
6	Karanganyar	9.542	8.483	88,90
7	Karangjambu	6.106	6.106	100,00
8	Karangmoncol	13.417	12.140	90,48
9	Karangreja	10.115	10.115	100,00
10	Kejobong	12.899	12.899	100,00
11	Kemangkon	18.268	18.268	100,00
12	Kertanegara	8.469	7.900	93,28
13	Kutasari	15.321	13.590	88,70
14	Mrebet	18.600	15.894	85,45
15	Padamara	10.846	10.579	97,54
16	Pengadegan	10.966	10.966	100,00
17	Purbalingga	14.563	14.563	100,00
18	Rembang	19.771	19.260	97,42
JUMLAH		247.852	236.502	95,42

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2025

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketersediaan sistem air limbah, guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain dengan melaksanakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat di 13 desa lokasi, yang tersebar pada 8 Kecamatan. Jumlah KK yang terakses program ini sebanyak 207 SR.

Penanganan Permukiman Kumuh

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang

tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters).

Berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 600.2/173 Tahun 2025 tentang Kawasan Kumuh, ditetapkan luasan kawasan kumuh sebesar 173,919 hektar di beberapa desa dan kelurahan prioritas di perkotaan dengan luasan 7.434,57 ha. Penanganan kawasan kumuh terbagi dalam 3 tingkat kewenangan penanganannya yaitu kewenangan Tingkat Kabupaten yang luasannya dibawah 10 Ha seluas 68,04 ha, Tingkat Provinsi luasannya 10 s/d 15 Ha seluas 48,24 ha dan Pusat di atas 15 Ha seluas 57,64 ha. Selanjutnya berdasarkan buku rencana penyusunan revisi materi teknis dan raperda revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 luas kawasan permukiman perkotaan adalah 7.434,57 Ha.

Tabel 2. 40
Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga

NO	KAWASAN	KECAMATAN	SATUAN	LUAS
1	Kali Gemuruh	Purbalingga	Ha	14,97
2	Gringsing	Purbalingga	Ha	6,12
3	Kandangampang	Purbalingga	Ha	3,47
4	Wirasana	Purbalingga	Ha	11,79
5	Bojong	Purbalingga	Ha	1,23
6	Toyareja	Purbalingga	Ha	9,56
7	Jatisaba	Purbalingga	Ha	9,95
8	Keramean	Kalimanah	Ha	17,46
9	Babakan	Kalimanah	Ha	9,43
10	Selabaya	Kalimanah	Ha	10,36
11	Brobot	Bojongsari	Ha	7,36
12	Kaligondang	Kaligondang	Ha	19,91
13	Bobotsari	Bobotsari	Ha	2,32
14	Majapura	Bobotsari	Ha	1,83
15	Dukuh Jawi	Bobotsari	Ha	2,82
16	Karangduren	Bobotsari	Ha	4,64
17	Pakuncen	Bobotsari	Ha	4,72
18	Bukamaja	Bukateja	Ha	20,27
19	Kedungjati	Bukateja	Ha	11,12
20	Sumampir	Rembang	Ha	4,59

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2025

Kawasan permukiman kumuh yang menjadi tanggungjawab tingkat kabupaten dengan luas total 68,04 Ha yang tersebar di 13 kawasan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 41
Penanganan Kawasan Kumuh tingkat Kabupaten

No	Lokasi/Kawasan	Luas Kumuh (ha)
1	Gringsing	6,12
2	Kandanggampang	3,47
3	Bojong	1,23
4	Toyareja	9,56
5	Jatisaba	9,95
6	Babakan	9,43
7	Brobot	7,36
8	Bobotsari	2,32
9	Majapura	1,83
10	Dukuh Jawi	2,82
11	Karangduren	4,64
12	Pakuncen	4,72
13	Sumampir	4,59
TOTAL KAWASAN KUMUH		68,04

Sumber : DINRUMKIM Kab. Purbalingga Tahun 2025

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Guna penanganan kawasan kumuh adalah dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Aktivitas yang dilakukan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pada desa yang kategori kemiskinan ekstrim dan desa stunting. Program ini dimaksudkan agar secara bertahap masyarakat memiliki rumah yang layak huni dan sehat. Hal ini karena perumahan selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Tahun 2025 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 251.536 KK. Rumah yang layak huni sebanyak 247.852 68 rumah. Pada tahun 2025 jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab sebanyak 1.201 rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 3.684 rumah. Aktivitasnya rehab RTLH dari APBD Provinsi sebanyak 579 rumah, APBD Kabupaten 5 rumah, dana DD 250 rumah, Baznas 91 rumah, CSR 156 rumah dan BSPD 120 rumah.

Tabel 2. 42
Jumlah Rumah dan RTLH di Kabupaten Purbalingga

No.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	BOBOTSARI	12.320	-
2	BOJONGSARI	14.803	484
3	BUKATEJA	20.636	429
4	KALIGONDANG	16.400	-
5	KALIMANAH	14.810	-
6	KARANGANYAR	9.542	-
7	KARANGJAMBU	6.106	-
8	KARANGMONCOL	13.417	133
9	KARANGREJA	10.115	309
10	KEJOBONG	12.899	208
11	KEMANGKON	18.268	-
12	KERTANEGARA	8.469	493
13	KUTASARI	15.321	-
14	MREBET	18.600	251
15	PADAMARA	10.846	-
16	PENGADEGAN	10.966	971
17	PURBALINGGA	14.563	-
18	REMBANG	19.771	406
JUMLAH		247.852	3.684

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 129 perumahan. Namun hanya 81 perumahan yang sudah diserahkan

terimakan aset PSUnya.

Tabel 2. 43
Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Perumahan	Jumlah yang sudah Diserahterimakan Set PSU
1	Bobotsari	2	2
2	Bojongsari	7	5
3	Bukateja	7	2
4	Kaligondang	6	5
5	Kalimanah	24	16
6	Kemangkon	5	1
7	Kutasari	4	2
8	Mrebet	10	2
9	Padamara	26	20
10	Pengadegan	1	0
11	Purbalingga	37	26
JUMLAH		129	81

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 247.852 unit rumah. Jumlah terbanyak di Kecamatan Bukateja yaitu sebanyak 20.636 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah paling sedikit berada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak 6.106 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah susun (rusun) MBR di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Purbalingga.

Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri

Pada tahun 2025 penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri sebesar 3.04%. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Purbalingga sebanyak 61,806 KPM dan yang telah mengundurkan diri sebagai penerima manfaaf/Graduasi sebanyak 2.196 orang. Beberapa faktor yang memepengaruhi Graduasi Mandiri antara lain menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun dan kemampuan usaha KPM PKH yang menurun.

Program yang mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pengembangan Perumahan
- g. Program Kawasan Permukiman
- h. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- i. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- j. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- l. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- m. Program Pemberdayaan Sosial
- n. Program Rehabilitasi Sosial
- o. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- p. Program Penanganan Bencana
- q. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Misi 4 :
"MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN
DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT"

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan penjelasan kemampuan penduduk untuk menikmati pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah 25+ dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut capaian IPM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2. 44
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	65,15	69,54	70,24	70,97	71,5	71,71	100,29

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 65,15 di tahun 2021 menjadi 71,71 pada tahun 2025. Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,77. IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 71,71 atau mengalami kenaikan sebesar 0,74 point dibanding tahun 2024 yang sebesar 70,97. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 30 masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 45
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, tahun 2016-2025

Kabupaten	Nilai IPM				
	2021	2022	2023	2024	2025
Purbalingga	69,15	69,54	70,24	70,97	71,71
Cilacap	70,42	70,99	71.83	72,55	73,45
Banyumas	72,44	73,17	73.86	74,57	75,44

Banjarnegara	67,86	68,61	69,14	69,62	70,61
Kebumen	70,65	70,79	71,37	72,48	73,17
Jawa Tengah	72,16	72,79	73,39	73,87	74,77
Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	75,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 46
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Purbalingga 2016-2024

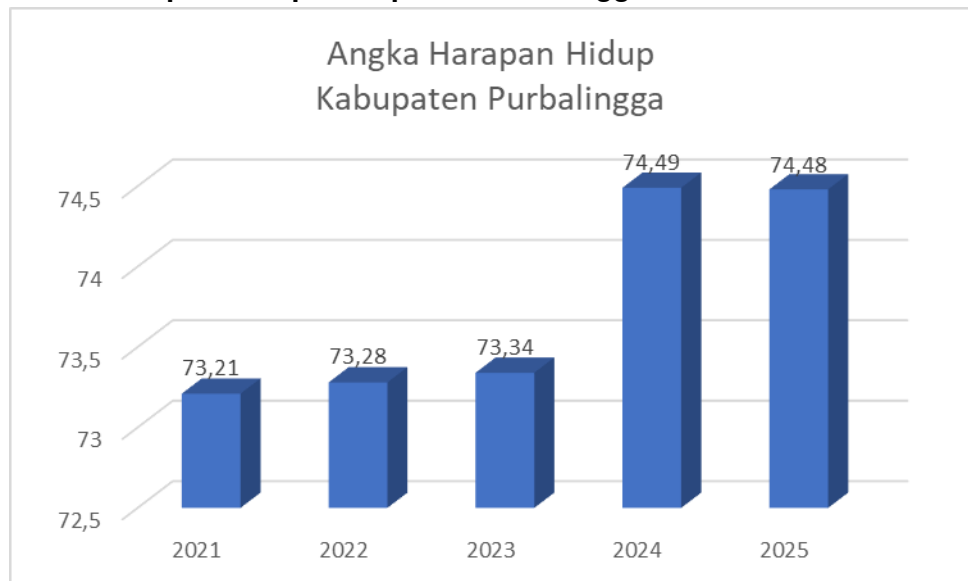
Komponen IPM	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,21	73,28	73,34	74,49	74,48
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12	12,01	12,02	12,03	12,11
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,25	7,33	7,34	7,36	7,37
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah/ orang/ tahun)	10.032	10.277	10.964	11.343	11.949

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Angka Harapan Hidup (UHH)

Tahun 2025, Angka Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 74,48. Ketercapaian angka harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Angka tersebut menurun 0,01 dari capaian tahun 2024 sebesar 74,49 tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 74 tahun 05 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata – rata 75,24 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian UHH nasional yaitu sebesar 74,47 tahun.

Grafik 2. 4
Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN, Pegawai Tetap, Tenaga Honor Daerah serta tenaga Kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun klinik swasta.

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dari 5.070 orang tenaga kesehatan yang

ada, terbagi dalam unit kerja sebagai berikut :

Tabel 2. 47
Persebaran Tenaga Kesehatan

Unit	Jumlah	Persentase
Dinas Kesehatan	105	2,17
Puskesmas	2802	25,67
Labkes	1281	0,67
Klinik	17	6,34
Rumah Sakit	298	57,43
JUMLAH	5.070	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Tabel 2. 48
Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenisnya

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah
1	Tenaga Medis	450
	Dokter	253
	Dokter Gigi	68
	Dokter Spesialis	122
	Dokter Gigi Spesialis	7
2	Tenaga Psikologi Klinis	4
3	Tenaga Keperawatan	1424
4	Tenaga Kebidanan	771
5	Tenaga Kefarmasian	389
	Apoteker	241
	Tenaga Teknis Kefarmasian	148
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	98
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	57
8	Tenaga Gizi	57
9	Tenaga Keterampilan Fisik	25
	Fisioterapis	15
	Terapis Okupasional	5
	Terapis Wicara	4
	Akupuntur	1
10	Tenaga Keteknisian Medis	171
11	Tenaga Teknik Biomedika	186

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah
	Radiografer	49
	ATLM	127
	Fisikawan Medik	3
	Ortotik Prostetik	0
12	Tenaga Kesehatan Tradisional	0
13	Nakes Lainnya	5
Total		3624

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Tabel 2. 49
Rasio Dokter

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Dokter Umum	196	203	203	213	321
Jumlah Dokter Spesialis	155	108	108	182	129
Jumlah Penduduk	1.011.425	1.027.521	1.007.795	1.053.565	1.066.060
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	19,37	19,76	20,1	20,22	30,04
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	15,30	10,51	10,7	17,27	17,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Tabel 2. 50
Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

URAIAN	JUMLAH
Rumah Sakit Umum	7
Rumah Sakit Bersalin	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	2
Klinik Utama	2
Klinik Pratama	25
Puskesmas rawat inap	11
Puskesmas non rawat inap	12
Puskesmas pembantu	46
PKD	185
Posyandu	1237

URAIAN	JUMLAH
Apotek	121
Laboratorium	3
Optik	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi terhadap kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Rasio dokter terhadap kepersertaan JKN adalah 1 : 5000. Satu Dokter praktek mandiri melayani 5.000 penduduk, satu klinik melayani 10.000 penduduk, satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Nilai Puskemas adalah 6 point, klinik adalah 2 ponit, Dokter praktek Mandiri adalah 1 point.

Cakupan rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,64. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdiri dari 22 Puskesmas, 24 klinik, 161 Dokter Praktik Mandiri (DPM).

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1.066.060 atau 100,22% dari total penduduk 1.068.407 jiwa. Dari jumlah tersebut, 737.600 atau 69,04% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian Universal Haealth Coverage (UHC) yaitu minimal 95% dari jumlah penduduk.

Tabel 2. 51 38
Peserta Jaminan Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
BPJS	869.258	989.221	1.039.317	1.052.030	1.066.060
BPJS PBI	583.101	684.872	728.954	734.857	737.600
BPJS Non PBI	286.157	304.349	310.363	317.713	328.460

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai

target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS.

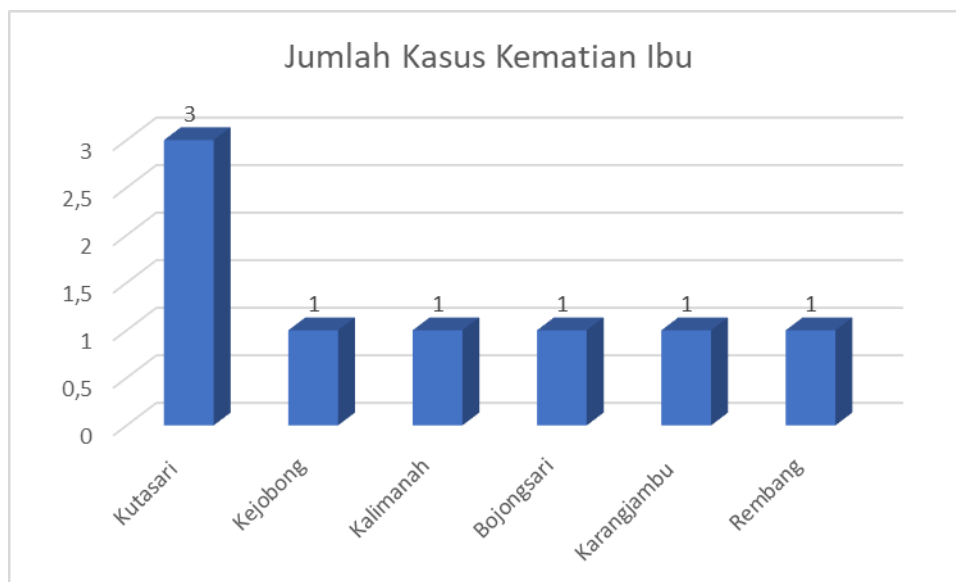
BPJS yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp28.061.966.600,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp26.966.381.200,- dan Rp1.095.585.400,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBPU dan BP kelas 3. Capaian UHC Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 100,14%, dimana 79,17% diantaranya adalah peserta aktif.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

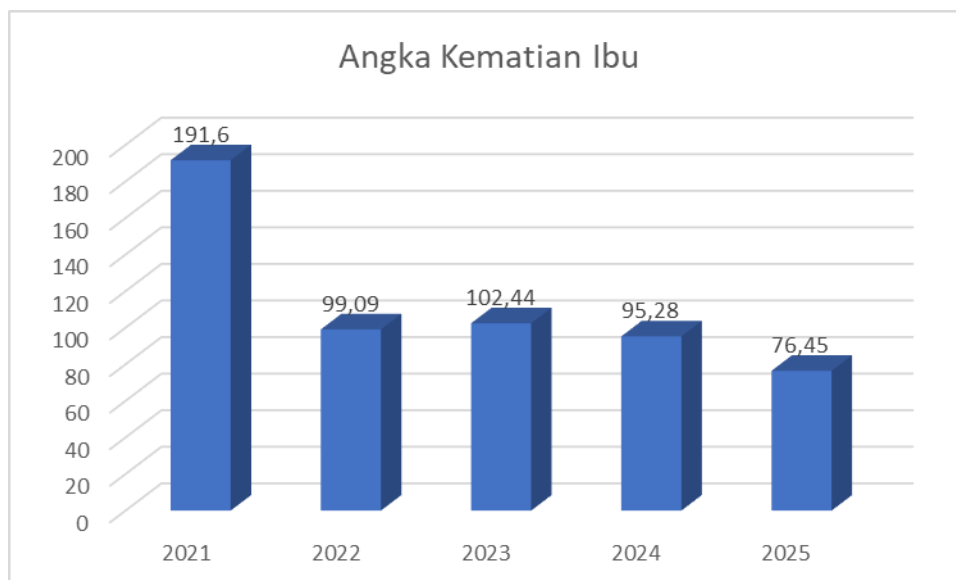
Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 76,45 per 100.000 KH dengan 8 kasus kematian ibu. AKI di Purbalingga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan 11 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Kutasari sebanyak 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Kejobong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Bojongsari, Puskesmas Karangjambu dan Puskesmas Rembang.

Grafik 2. 5
Angka Kematian Ibu Tahun 2025



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Grafik 2. 6
Trend Kematian Ibu Tahun 2021 - 2025



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Penyebab kematian ibu adalah disebabkan karena Perdarahan ada 4 kasus diikuti karena komplikasi Non Obstetrik 4 kasus. Tempat kematian 8 kasus di Rumah Sakit. Sebanyak 4 kasus meninggal di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata, 3 kasus meninggal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan 1 kasus meninggal di Rumah Sakit

Umum Harapan Ibu.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 11,75 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 123 kasus. Kematian banyak terjadi pada usia neonatal (0 - 28 hari) sebanyak 91 kasus dan usia bayi (29 hari – 11 bulan) sebanyak 32 kasus.

Dari 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Padamara, Puskesmas Serayu Larangan dan Karangjambu dengan jumlah 8 kasus dan Kematian bayi terendah terdapat di Puskesmas Bojong dengan jumlah 1 kasus kematian bayi

Tabel 2. 52
Angka Kematian Bayi

No	Puskesmas	Total Kematian Bayi		
		Kematian Neonatal (0 - 28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Total
1	Puskesmas Kemangkon	4	2	6
2	Puskesmas Bukateja	3	2	5
3	Puskesmas Kutawis	6	1	7
4	Puskesmas Kejobong	3	2	5
5	Puskesmas Pengadegan	3	1	4
6	Puskesmas Kaligondang	4	1	5
7	Puskesmas Kalikajar	2	0	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	3	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	6	1	7
11	Puskesmas Padamara	7	1	8
12	Puskesmas Kutasari	4	2	6
13	Puskesmas Bojongsari	7	2	9
14	Puskesmas Mrebet	3	3	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	5	3	8
16	Puskesmas Bobotsari	5	1	6

No	Puskesmas	Total Kematian Bayi		
		Kematian Neonatal (0 - 28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Total
17	Puskesmas Karangreja	1	2	3
18	Puskesmas Karangjambu	8	0	8
19	Puskesmas Karanganyar	2	5	7
20	Puskesmas Karangtengah	4	0	4
21	Puskesmas Karangmoncol	3	2	3
22	Puskesmas Rembang	6	2	6
Jumlah		91	32	123

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Grafik 2. 7
Tren Angka Kematian Bayi Tahun 2021 - 2025



Penyebab kematian bayi yang terjadi pada usia 0-28 hari diantaranya BBLR sebanyak 4 kasus, Prematur sebanyak 32 kasus, Asfiksia sebanyak 13 kasus, Sepsis sebanyak 7 kasus, Infeksi sebanyak 1 kasus, Kelainan kongenital sebanyak 9 kasus, kelainan cardiovascular sebanyak 10 kasus dan lain-lain (RDS, kongenital pneumonia, dll) sebanyak 15 kasus.

Penyebab Kematian bayi pada usia 29 hari sampai dengan 11 bulan diantaranya kondisi perinatal sebanyak 3 kasus, Pneumonia sebanyak 2 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 5 kasus, kelainan kongenital lain sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 5 kasus, infeksi sebanyak 4 kasus, dan lain-lain

(sepsis, ISPA, epilepsy,dll) sebanyak 12 kasus.

3. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 12,71 per 1.000 kelahiran hidup atau sejumlah 133 kasus. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2024 dengan Angka Kematian Balita sebesar 15,76 per 1.000 KH dengan 182 kasus kematian.

Penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh Pneumonia sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 1 kasus, penyakit syaraf sebanyak 1 kasus, penyebab lainnya sebanyak 5 kasus diantaranya disebabkan oleh sepsis, meningitis, radang paru-paru, Neoplasma Maligna ginjal, mual dan muntah.

Tabel 2. 53
Angka kematian Balita

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr-11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
1	Puskesmas Kemangkon	4	2	0	6
2	Puskesmas Bukateja	3	2	0	5
3	Puskesmas Kutawis	6	1	0	7
4	Puskesmas Kejobong	3	2	0	5
5	Puskesmas Pengadegan	3	1	2	6
6	Puskesmas Kaligondang	4	1	1	6
7	Puskesmas Kalikajar	2	0	0	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	3	0	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	6	1	1	8
11	Puskesmas Padamara	7	1	1	9
12	Puskesmas Kutasari	4	2	0	6
13	Puskesmas Bojongsari	7	2	1	10
14	Puskesmas Mrebet	3	3	0	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	5	3	0	8
16	Puskesmas Bobotsari	5	1	1	7
17	Puskesmas Karangreja	1	2	1	4
18	Puskesmas Karangjambu	8	0	0	8
19	Puskesmas Karanganyar	2	5	1	8
20	Puskesmas Karangtengah	4	0	0	4
21	Puskesmas Karangmoncol	3	2	0	3

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr-11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
22	Puskesmas Rembang	6	2	1	7
Jumlah		91	32	10	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

4. Indeks Kesehatan Keluarga Tingkat Kabupaten

Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga dilakukan melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Capaian PIS-PK pada tahun 2025 mencapai angka 0,65 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,62 maka terdapat kenaikan angka IKS sebanyak 0,3. Dengan capaian rata IKS yaitu 0,65 maka Kabupaten Purbalingga mencapai status pra sehat. Capaian IKS tertinggi pada Puskesmas Kemangkong dengan IKS 0,81 dan terendah di Puskesmas Mrebet dengan IKS 0,38

Tabel 2. 54
Indeks Kesehatan Keluarga

NO	PUSKESMAS	NILAI IKS
1.	Puskesmas Mrebet	0,38
2.	Puskesmas Karangjambu	0,52
3.	Puskesmas Karanganyar	0,53
4.	Puskesmas Kalimanah	0,54
5.	Puskesmas Karangreja	0,54
6.	Puskesmas Pengadegan	0,56
7.	Puskesmas Karangmoncol	0,56
8.	Puskesmas Bojong	0,56
9.	Puskesmas Bobotsari	0,58
10.	Puskesmas Rembang	0,58
11.	Puskesmas Purbalingga	0,59
12.	Puskesmas Kutasari	0,59
13.	Puskesmas Bukateja	0,60
14.	Puskesmas Serayu Larangan	0,61
15.	Puskesmas Bojongsari	0,63
16.	Puskesmas Kutawis	0,63
17.	Puskesmas Padamara	0,68
18.	Puskesmas Kejobong	0,73

NO	PUSKESMAS	NILAI IKS
19.	Puskesmas Kaligondang	0,75
20.	Puskesmas Karangtengah	0,76
21.	Puskesmas Kalikajar	0,79
22.	Puskesmas Kemangkon	0,81
Cakupan Kabupaten		0,65

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Purbalingga

5. Prevalensi Stunting

Terdapat dua sumber data prevalensi stunting, yaitu ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Data ePPGBM merupakan data by name by address balita yang dilaporkan secara real time setiap bulan oleh puskesmas, sedangkan SSGI/SKI merupakan survei nasional yang dilaksanakan secara berkala dengan metode sampling.

Berdasarkan data ePPGBM tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 12,1% meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,34%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei nasional, prevalensi stunting Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari 26,0% pada SKI tahun 2023 menjadi 22,3% pada SSGI tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan survei nasional.

Hasil pemantauan pertumbuhan melalui ePPGBM tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 57.318 balita (96,5%) telah dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan. Hasil pemantauan pertumbuhan menunjukkan bahwa permasalahan gizi masih cukup tinggi, yaitu terdapat 6.950 balita (12,1%) stunting, 2.369 balita (4,1%) underweight atau berat badan kurang menurut umur, dan 5.703 balita (9,9%) wasting atau berat badan kurang menurut tinggi badan.

Peningkatan prevalensi stunting pada data ePPGBM antara lain dipengaruhi oleh perbaikan kualitas pengukuran antropometri melalui peningkatan kapasitas kader, sehingga pengukuran panjang/tinggi badan menjadi lebih valid. Selain itu, peningkatan cakupan pengukuran bulanan serta masih adanya faktor risiko seperti praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal, penyakit infeksi, serta ketahanan pangan keluarga juga turut berkontribusi terhadap peningkatan angka prevalensi stunting.

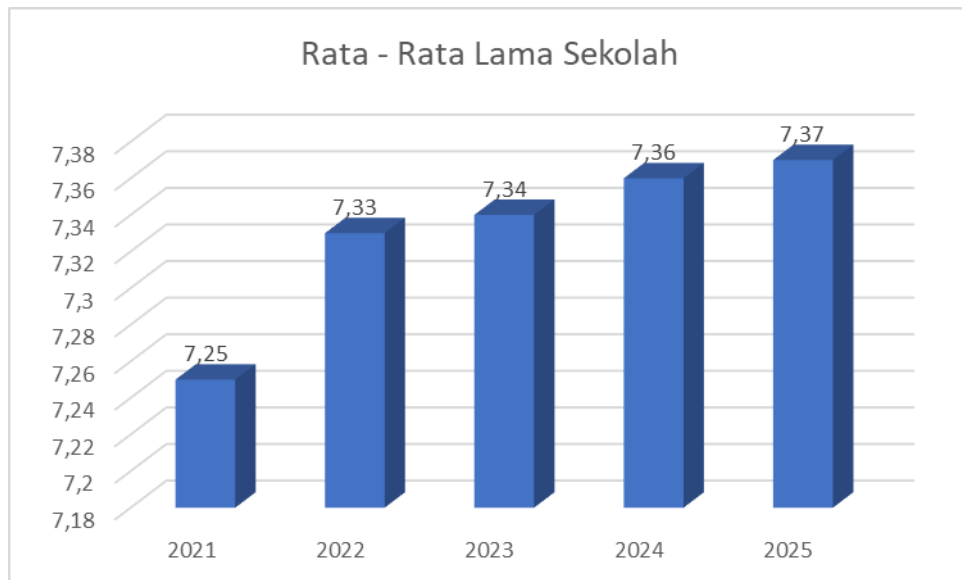
Rata-rata lama sekolah (RLS)

Data BPS menyebutkan bahwa angka Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 7,37 naik 0,01 dibandingkan tahun 2024 sebesar 7,36. Hal tersebut menunjukkan

bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata tujuh tahun atau sampai kelas 8 SMP/MTs. RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,15 tahun dan RLS Nasional sebesar 9,07 tahun. Angka RLS tersebut juga masih berada di bawah Kabupaten Banyumas maupun Kabupaten Cilacap dengan capaian masing-masing sebesar 8,1 tahun dan 7,65 tahun. Akan tetapi jika dibandingkan kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 7,1 tahun.

Jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, RLS Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu mencolok. Berikut grafik yang menunjukkan RLS di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Grafik 2. 8
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga



Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 12,03 tahun pada tahun 2023 menjadi 12,11 tahun 2025. Nilai HLS tersebut artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Walaupun memiliki tren yang positif, namun nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 13,05 tahun sehingga perlu usaha lebih keras bagi Purbalingga untuk mengejar ketertinggalan.

Grafik 2. 9
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah adalah dengan Inovasi AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) dengan tujuan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau yang belum menyelesaikan pendidikannya karena berbagai macam faktor untuk kembali ke bangku sekolah sesuai jenjang sekolahnya. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.

Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Program AUSTS mempunyai sasaran pada anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah karena faktor ekonomi, faktor geografis/lingkungan, dan cacat fisik atau mental yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain AUSTS ada juga program ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang bertujuan menjaring anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi keluarga kurang mampu, kondisi keluarga, dan faktor lain dapat menyebabkan putus sekolah atau *drop out*.

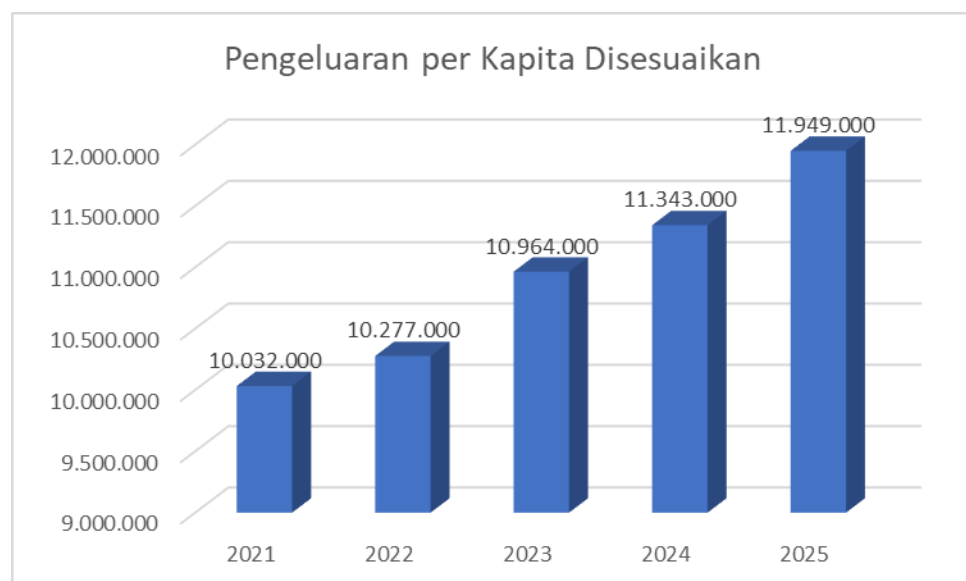
Pengeluaran Per Kapita



Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar Rp.10.032.000. Pada tahun 2022 dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp.10.277.000,-. Pada tahun 2023, Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp.10.964.000,-. Pada tahun 2024 menjadi Rp.11.343.000,-. Pada tahun 2025 menjadi Rp.11.949.000,- atau naik Rp.606.000,-. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.12.746.000,-

Grafik 2. 10
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kab. Purbalingga

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi selanjutnya digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknis. Adapun capaian IPG tahun 2025, dapat dijelaskan dari tabel berikut :

Tabel 2. 55
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,78	93,08	93,21	93,51	94,15	93,92	99,76

Capaian IPG di Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Tercatat posisi IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 yaitu 92,78 yang semakin naik sampai tahun 2025 menjadi 93,92.

Tabel 2. 56
IPG Jawa Tengah dan Purbalingga

No.	Uraian	Indek Pembangunan Gender				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jawa Tengah	92,18	92,48	92,83	92,87	93
2.	Purbalingga	92,78	93,08	93,21	93,51	93,92

Berdasarkan tabel Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin dapat diketahui besaran indek pembangunan gender. Capaian IPG tahun 2025 diperoleh dengan membandingkan IPM Perempuan : IPM Laki-Laki yaitu 74,23 : 69,58 atau rata-rata IPM menurut jenis kelamin sebesar 71,90. Walaupun nilai IPG mendekati 100 yang berarti semakin setara antara pembangunan perempuan dan laki-laki namun kalau dilihat capaian IPM Perempuan masuk kategori sedang dan IPM Laki- laki masuk kategori tinggi jadi masih terjadi kesenjangan.

Kesenjangan juga terjadi di masing-masing komposit yang hampir semuanya menunjukkan capaian IPM Perempuan lebih rendah dari laki-laki kecuali komposit Angka Harapan Hidup yang capaiannya Perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peran serta perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manajer serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan Perempuan.

Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa capaian angka untuk Kabupaten Purbalingga periode 2020 - 2024 menunjukkan tren meningkat dan menurun yaitu dari 74,27 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 70,99 pada tahun 2021. Namun kemudian menurun menjadi 70,09 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali naik menjadi 71,94 dan pada tahun 2024, IDG Kabupaten Purbalingga kembali naik menjadi 76,97. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kesetaraan peran gender cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 2020-2024 nilai IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57
Indek Pemberdayaan Gender

No.	Uraian	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah	71,73	71,64	73,78	74,18	72,58
2.	Purbalingga	70,27	70,99	70,09	71,94	76,97
3.	Banyumas	86,69	87,00	72,77	73,16	69,77
4.	Cilacap	88,27	88,54	70,9	70,38	69,97
5.	Banjarnegara	95,28	95,32	73,8	74,3	65,02

Tabel 2. 58
IDG Berdasarkan Komponen Penyusun

No	Uraian	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)			Perempuan sebagai tenaga Profesional (persen)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah	20,00	20,17	17,65	50,72	51,00	49,75	34,59	35,21	35,43
2.	Purbalingga	22,22	22,22	30,00	60,21	54,23	45,84	29,76	31,05	30,81

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IDG Kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat capaian IDG berdasarkan komponen penyusun keterlibatan perempuan di parlemen/dewan capaian Kabupaten Purbalingga di atas provinsi dan sudah memenuhi standar minimal 30 persen. Dari komponen perempuan sebagai tenaga profesional capaian Kabupaten Purbalingga sudah melebihi capaian provinsi. Dari komponen sumbangan pendapatan perempuan, capaian Kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian provinsi.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, dengan peringkat **NINDYA** dengan nilai 698.4 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI). Capaian ini menurun sebesar 34,25 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan nilai 732.65.

Tabel 2. 59
Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1.	Kelembagaan	164	134.70
2.	Klaster I Hask Sipil dan Kebebasan	115	68.50
3.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156	96.7
4.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	137.5
5.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	59.60

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
6.	Klaster V Perlindungan Khusus	205	137.15
.7	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	64
JUMLAH		1000	698.4

Kabupaten Purbalingga mendapatkan penghargaan pertama kali di tahun 2021 dengan Predikat Pratama dengan jumlah nilai verifikasi final sebanyak 580,53. Pada tahun 2022 diadakan penilaian kembali dan Kabupaten Purbalingga masih tetap mendapatkan Predikat Pratama tetapi dengan nilai verifikasi final sebanyak 531,15, akumulasi nilai turun dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2025, Kabupaten Purbalingga mendapat predikat **“NINDYA”** dengan nilai 698.4.

Program yang mendukung Tujuan Meningkatkan *Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender* adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- e. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- f. Program Pengembangan Kebudayaan
- g. Program Pembinaan Sejarah
- h. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- i. Program Pengelolaan Permuseuman
- j. Program Pembinaan Perpustakaan
- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- l. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- m. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- n. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- o. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- p. Program Pengendalian Penduduk
- q. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- r. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- s. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- t. Program Perlindungan Perempuan
- u. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- v. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- w. Program Perlindungan Khusus Anak

Misi 5 :
**"MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
 EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG
 SEMPUL-SEMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM
 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR,
 PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA,
 UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP
 BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN
 PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG
 DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK
 PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEPTAAN
 LAPANGAN KER.IA"**

TUJUAN :
MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI DAERAH

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2. 60
Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,19	5,41	4,51	4,55	5 - 6	5,92	118,4

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,92 atau 118,4% dari target yang ditentukan sebesar 5-6. Capaian 2025 meningkat 29,54 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,55. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2021–2025, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Konstruksi sebesar 7,09%, Jasa lainnya sebesar 8,10%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,63%. Pada beberapa sektor lapangan usaha perekonomian Kabupaten Purbalingga mengalami pemulihan dan penguatan pada sebagian besar sektor usaha, dengan beberapa sektor seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan hingga mencapai 5,92 persen pada tahun 2025. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 61
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,20	4,28	0,98	1,78	6,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,64	-3,23	0,54	3,04	2,54
C.	Industri Pengolahan	3,80	3,76	5,10	4,47	5,92
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,98	4,03	5,28	9,46	4,23
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	4,39	0,94	4,92	5,83	-0,89
F.	Konstruksi	6,95	1,42	5,43	10,84	7,09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,68	3,91	5,35	5,11	5,00
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,69	71,89	6,93	4,42	6,85
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,44	12,58	13,52	3,97	10,63
J.	Informasi dan Komunikasi	5,76	2,52	10,03	6,67	6,17
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	0,74	2,41	0,86	2,87
L.	Real Estate	2,21	2,71	6,72	4,99	1,52
M.N.	Jasa Perusahaan	3,05	5,50	7,23	7,48	
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,38	1,40	4,61	11,02	2,38
P.	Jasa Pendidikan	0,21	2,22	5,94	7,10	5,63
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,12	2,24	5,57	5,42	4,55
R.S.T.U.	Jasa lainnya	0,67	11,63	6,47	4,81	8,10

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB (ADHK)	3,19	5,41	4,47	4,57	5,92

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa lapangan usaha yang sekarang mulai diminati oleh masyarakat Purbalingga diantaranya kategori lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2025, yang menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 28,14 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 25,76 persen. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 28,29 persen atau sekitar Rp.33,357 milyar. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kab. Purbalingga dari sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 28,14 persen atau sekitar Rp.9,386 Milyar. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan 25,76 persen atau sekitar Rp.8,592 Milyar dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 12,50 persen atau sekitar Rp.4,169 Milyar.

SASARAN : MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PEREKONOMIAN DAERAH

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Tabel 2. 62
Nilai PDRB Per Kapita**



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Nilai PDRB Per Kapita	Milyar	26.190	28.820,62	31.224,55	33.357,33	31.480.622	34.426.830	109,36

Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar Rp.34.430.000 Milyar atau 109,36% dari target yang ditentukan sebesar Rp.31.480.622. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 31.224,55 Milyar dan tahun 2024 sebesar Rp.33.357.330 Milyar.

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp.26.190 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 34.430.000 milyar pada tahun 2025. Sedangkan dilihat dari perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 17.731,44 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 21.626,94 milyar pada tahun 2025. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 63
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
A.	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	7.994,83	8.433,03	9.291,41	4.697,49	4.785,07	5.097,24
B.	Pertambangan dan Penggalan	1.226,14	1.258,70	1.305,20	726,29	748,64	763,58
C.	Industri Pengolahan	8.832,36	9.430,94	10.151,13	726,29	748,64	5.726,67
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	15,15	16,77	17,60	12,99	14,22	14,82
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	29,99	34,01	35,03	24,23	25,64	25,41
F.	Konstruksi	1.979,67	2.228,69	2.430,79	1.230,55	1.363,95	1.460,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.934,08	4.218,88	4.508,87	2.693,50	2.837,55	2.972,29
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.263,22	1.332,58	1.444,16	870,68	909,13	417,25
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	829,56	873,13	979,93	613,11	636,20	971,43
J.	Informasi dan Komunikasi	619,95	665,72	708,92	631,25	673,37	714,88
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	680,40	705,34	745,35	402,97	405,60	417,25
L.	Real Estate	309,83	330,62	340,32	243,53	255,70	259,57
M.N.	Jasa Perusahaan	64,15	70,04	76,44	39,31	42,24	45,22



Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726,11	827,18	856,61	475,38	527,76	540,34
P.	Jasa Pendidikan	1.759,79	1.902,08	2.048,51	1.031,77	1.105,04	1.167,21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	338,25	362,40	384,75	226,25	238,51	249,37
R.S.T.U.	Jasa lainnya	621,06	667,22	745,86	439,22	458,59	495,75
PDRB		31.224,55	33.357,33	36.070,88	19.533,86	20.422,61	21.626,94

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Pada tahun 2025 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 36.070,88 sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 21.626,94. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) tahun 2025 pertumbuhan PDRB diatas 5,92 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga pada tahun 2025 pendapatannya rata-rata lebih dari 5,92 persen. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), pendapatan perkapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar Rp.34.427.000.

Tabel 2. 64
PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33	36.070,88
- ADHK Tahun 2010	17.731,44	18.690,73	19.533,86	20.422,61	21.626,94
Jumlah Penduduk	1.021.920	1.035.959	1.046.474	1.057.750	1.047.755

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Jika dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp. 36.070,88 miliar, yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada komponen Ekspor Barang dan Jasa, hingga tahun 2024 masih bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa impor lebih besar daripada ekspor. Namun pada tahun 2025 terjadi perbaikan signifikan dengan nilai positif sebesar 354,50, yang menandakan bahwa ekspor

sudah lebih besar dibandingkan impor. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT juga mengalami kenaikan secara bertahap, dari 410,00 pada tahun 2021 menjadi 619,30 pada tahun 2025. Meskipun terus tumbuh, kontribusinya tetap menjadi yang paling kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2. 65
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2025 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.517,38	20.271,87	22.166,47	23.961,84	25.347,32
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	410,00	456,45	505,26	588,33	619,30
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.745,42	1.765,29	1.842,42	1.892,95	1.959,46
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.480,25	5.836,78	6.180,38	6.796,51	7.296,89
5.	Perubahan Inventori	670,90	880,70	1.036,88	860,19	493,41
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-430,15	-387,47	-506,87	-742,49	354,50
PDRB (ADHB)		26.393,81	28.823,62	31.224,55	33.357,33	36.070,88

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2026

Tabel 2. 66
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2025 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.581,67	13.277,29	13.951,30	14.635,85	15.268,29
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	249,37	262,79	282,27	321,42	332,85
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.057,70	1.058,85	1.067,74	1.094,78	1.123,12
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.578,70	3.658,63	3.804,29	4.048,49	4.256,58
5.	Perubahan Inventori	849,21	1.052,08	1.207,21	964,73	539,40
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-585,21	-618,91	778,95	-642,66	106,70
PDRB (ADHK)		17.731,44	18.690,73	19.533,86	20.422,61	21.626,94

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2026

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa

ada pengaruh perubahan harga).

Selama kurun waktu 2010–2025, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

SASARAN : MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Tabel berikut menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 2. 67
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,05	5,23	5,61	4,96	< 4,8	4,83	99,37

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 6,05 persen, kemudian menurun menjadi 5,23 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sempat mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 persen, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,96 persen. Pada tahun 2025 ditetapkan target TPT kurang dari 4,8 persen. Realisasi yang dicapai pada tahun tersebut adalah 4,83 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,37 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi masih sedikit di atas target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran berjalan cukup efektif dan mendekati sasaran yang direncanakan.

Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Purbalingga Tahun

2025 sebesar 612.878 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 583.237 orang dan yang masih menganggur sebanyak 29.581 orang. Dari data diatas, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki. Pengangguran terdiri dari 18.597 orang laki-laki dan 10.984 orang perempuan. Jumlah pengangguran tahun 2025 mengalami sedikit penurunan 132 orang dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 29.713 orang. Data ketenagakerjaan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 68
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	357.799	255.019	612.878
- Bekerja	339.202	244.035	583.237
- Pengangguran Terbuka	18.597	10.984	29.581
Bukan Angkatan Kerja	52.180	148.328	200.508
Total	767.778	658.366	1.426.204
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,27	63,23	75,35
Tingkat Pengangguran	5,20	4,31	4,83
Tingkat Kesempatan Kerja	94,80	95,69	95,17

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar, jumlah pencari kerja pada tahun 2025 sebanyak 6.817 orang. Perempuan masih mendominasi sebanyak 4.242 orang dan laki-laki sebanyak 2.393 orang. Lowongan kerja pada tahun 2025 sebanyak 5.224 orang. Terkait permintaan tenaga kerja di Purbalingga masih banyak dibutuhkan tenaga kerja wanita sebanyak 4.183 orang dan laki-laki sebanyak 1.041 orang.

Tingkat pendidikan pencari kerja yang diterima kebanyakan adalah Pendidikan SLTA sebanyak 4.280 orang, disusul dengan Pendidikan SLTP sebanyak 984 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang berinvestasi di *Purbalingga* berfokus pada hasil produksi yang membutuhkan ketelitian dan keuletan sehingga kebanyakan perusahaan lebih cenderung merekrut perempuan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi sebagai karyawannya.

Investasi

Di Kabupaten Purbalingga investasi pada tahun 2025 sebanyak 21.733 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.1.135.956.928.855,-. Jumlah tersebut terdiri dari PMDN sebanyak 21.629 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.968.074.973.249,- dan PMA sebanyak 104 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.167.881.955.606,-.

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren yang meningkat.

Grafik 2. 11
Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga

Program yang mendukung Tujuan *Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah* adalah :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- i. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- j. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- k. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

- l. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- m. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- n. Program Pengembangan Ekspor
- o. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- p. Program Pemasaran Pariwisata
- q. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- s. Program Promosi Penanaman Modal
- t. Program Pelayanan Penanaman Modal
- u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- v. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- w. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- x. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- y. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- z. Program Penempatan Tenaga Kerja
- aa. Program Hubungan Industrial
- bb. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- cc. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- dd. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ee. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- ff. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- gg. Program Pengembangan UMKM

Misi 6 :

**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA”**

TUJUAN :

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN DAN
KEMANDIRIAN DESA**

Dari hasil evaluasi *“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa”* berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun



(IDM) tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7923 atau capaian sebesar 99,04%. Indeks Desa Mandiri (IDM) dari tahun 2021 sampai dengan 2025, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 69
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target akhir RPJMD 2021-2026
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6919	0,7078	0,7784	0,7901	0,80	0,7923	99,04	0,85

Indeks Desa pada Tahun 2025 sebesar 0,7923 dari target 0,80 atau capaian sebesar 99,04%, dan masih dibawah target akhir periode RPJMD 2021-2026. Capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan sistem penilaiannya. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Sedangkan Pengukuran Indeks Desa (ID) Tahun 2025 mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai Indeks Desa sebesar 0,7923 atau mengalami peningkatan nilai sebesar 0,0022 dengan Status MAJU. Di tingkat provinsi mengalami kenaikan dari peringkat 5 menjadi peringkat 2 dari 29 Kabupaten. Akan tetapi, sudah diatas rata-rata IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,7522 sedangkan di eks Karsidenan Banyumas sudah menempati peringkat 1.

Status perkembangan desa di Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 70
Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga

STATUS	CAPAIAN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	2	0	0	0	0
Berkembang	153	137	24	11	6
Maju	65	81	151	144	121
Mandiri	4	6	49	69	97
Jumlah	224	224	224	224	224

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga

Tabel tersebut menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- Sejak Tahun 2022, sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Purbalingga.
- Pada Tahun 2024 terdapat 11 desa berstatus berkembang, pada tahun 2025 menjadi 6. Artinya, ada 5 desa yang naik statusnya dari berkembang menjadi desa maju atau desa mandiri.
- Sedangkan untuk desa maju, pada tahun 2024 terdapat 144 desa, pada tahun 2025 menjadi 121. Artinya ada 23 desa yang berubah statusnya menjadi desa mandiri.
- Sementara untuk desa mandiri, pada tahun 2024 terdapat 69 desa dan pada tahun 2025 menjadi 97 desa, artinya terdapat peningkatan jumlah status Desa Mandiri sebanyak 28 Desa.

Program yang mendukung *Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa* adalah :

- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Misi 7 :
“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SARANA DAN PRASARANA WILAYAH /
INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP
MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN”

TUJUAN :
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG
BERKUALITAS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BERKELANJUTAN

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah pada tahun 2025 sebesar 71,85 dari target yang ditetapkan sebesar 82,275, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 87,32 persen. Capaian tersebut meningkat 12,715 point dari capaian tahun 2024 sebesar 69,56.

Tabel 2. 71
Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	81,88	80,70	81,94	69,56	82,275	71,85	87,32

Sumber : DPUPR Kabupaten Purbalingga

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi jika dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Indeks Jalan Mantap

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintahan dalam pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Panjang Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan panjang keseluruhan yaitu 952,602 km. Pada tahun 2023 panjang jalan yang mantap sebesar 78.83 persen atau sepanjang 750,921 km. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap menurun sepanjang 99,613 km menjadi 651,308 km. Pada tahun 2025 kondisi jalan mantap bertambah sepanjang 36,032 km atau sepanjang 687,340 km.

V/C Ratio

V/C Rasio jalan di Kabupaten Purbalingga sebesar 0,49 persen. hal tersebut dapat diartikan bahwa arus stabil, namun kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi. Pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan. Pada umumnya kondisi jalan Purbalingga masih bisa dikategorikan stabil. Kepadatan terjadi pada saat pagi hari, dimana penduduk akan memulai aktifitasnya dan pada sore hari pada saat pulang dari melakukan aktifitas. Ketika jam sibuk pagi dan sore hari, arus lalu lintas akan ramai lancar sedangkan pada siang hari arus lalu lintas normal seperti biasa lagi. V/C Rasio Purbalingga pada kisaran (0,45 - 0,74) yang berarti Purbalingga masuk dalam Tingkat Pelayanan C, Faktor Ukuran Kota (F_{cs}) Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, dengan Batas Lingkup V/C 0,45 - 0,74.

Tabel 2. 72
V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten

Kecamatan	Volume (V)	Kapasitas (C)	V/C	LOS
Karangjambu	449,35	1451	0,31	B
Karangreja	631,5	2291,8	0,29	A
Bobotsari	1181,57	2584,20	0,45	C
Mrebet	1408,42	2337,67	0,53	C
Bojongsari	2303,87	2911,00	0,75	D
Kutasari	1208,8	2365	0,51	C
Purbalingga	1595,86	2872,05	0,53	C
Kalimanah	2666,8	3153	0,85	E

Kecamatan	Volume (V)	Kapasitas (C)	V/C	LOS
Padamara	1098	2954	0,37	B
Kemangkon	1882,4	3053,5	0,61	C
Bukateja	1273,2	2021	0,64	C
Kaligondang	1028,2	2117,625	0,47	C
Kejobong	1049,93	2805,57	0,39	B
Karanganyar	1180,05	1835,5	0,64	C
Kertanegara	923,85	2157,5	0,49	C
Karangmoncol	826,93	1674,33	0,46	C
Rembang	821,35	1451	0,57	C
Pengadegan	672,57	1436,33	0,47	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

Irigasi

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah, baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi bangunan irigasi akan sangat mempengaruhi luas oncoran, hal di disebabkan apabila kondisi saluran dalam kondisi baik dan sedang secara otomatis air yang mengalir pada saluran yang baik akan sampai ke sawah dengan baik.

Kondisi bangunan irigasi akan sangat mempengaruhi luas oncoran, hal di disebabkan kalau kondisi saluran kondisi baik dan sedang secara otomatis air yang mengalir pada saluran yang baik akan sampai ke sawah dengan baik, kondisi saluran kondisi baik. Luas areal pertanian di Purbalingga dengan bangunan pengairan yang ada seluas 19.159 Ha. Itu terbagi menjadi 3 kriteria yaitu Teknis seluas 6.143 Ha, Semi Teknis seluas 4.899 Ha dan Sederhana seluas 8.117 Ha. Pada tahun 2025 bangunan pengairan dalam kondisi baik yaitu sebesar 53,22 persen, kondisi saluran kondisi sedang sebesar 20,79 persen dan kondisi saluran kondisi rusak sebesar 25,99 persen.

Luas daerah irigasi di Kabupaten Purbalingga seluas 19.159 ha, yang terdiri dari 18/16 Kecamatan dan terdapat 2 Kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi yaitu Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Bukateja. Kecamatan Kejobong merupakan kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi, sedangkan untuk Kecamatan Bukateja daerah irigasinya masuk ke Provinsi dan Pusat sehingga tidak terdapat

irigasi yang masuk ke Kabupaten. Kecamatan Padamara termasuk kecamatan yang paling luas daerah oncorannya yaitu seluas 1.864 Ha. Kecamatan Mrebet termasuk daerah dengan luas oncoran ke dua paling luas yaitu seluas 1.418 Ha, sedangkan pada urutan ketiga kecamatan dengan luas oncoran paling luas adalah Kecamatan Karanganyar yaitu seluas 1,382 Ha.

Tabel 2. 73
Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Jaringan			Kondisi Saluran			Capain Luas Oncoran (Ha)
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)	
1	Kutasari	1.501	1.106	16	379	49,80	21,33	28,87	1.103
2	Bojongsari	1.220	290	705	225	55,23	22,00	22,77	901
3	Purbalingga	763	703	60	0	65,00	20,00	15,00	560
4	Padamara	2.489	1.086	789	614	52,81	21,26	25,93	1.864
5	Mrebet	1.922	692	315	915	44,48	20,34	35,17	1.418
6	Kalimanah	1.164	626	511	27	68,64	19,09	12,27	875
7	Bobotsari	1.248	718	252	278	55,21	17,27	27,52	926
8	Karanganyar	1.920	437	535	948	42,44	21,20	36,36	1.382
9	Kemangkon	55	55	0	0	75,00	15,00	10,00	41
10	Karangmoncol	1.089	0	541	548	53,64	23,68	22,68	815
11	Kertanegara	1.426	0	233	1.193	42,88	19,23	37,88	1.036
12	Kaligondang	811	430	264	117	53,75	23,13	23,13	584
13	Karangjambu	986	0	0	986	42,67	21,67	35,67	710
14	Karangreja	637	0	116	521	45,50	21,43	33,07	459
15	Rembang	1.884	0	562	1.322	44,54	25,95	29,51	1.376
16	Pengadegan	44	0	0	44	60,00	20,00	20,00	32
Jumlah		19.159	6.143	4.899	8.117	53,22	20,79	25,99	14.082
Persentase Daerah Oncoran (Ha)									73,50

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet,



Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 capaiannya sebesar 80,32%, naik lagi menjadi 87,41% pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 92,22% pada tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 92,99% pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 95,29% sedangkan tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 menjadi sebesar 93,69%, tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 menjadi sebesar 96,50% . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang.

Tabel 2. 74
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2019	354	294	60	0	0	0
2	2020	184	142	20	22	0	0
3	2021	424	396	19	9	0	0
4	2022	520	345	26	149	0	0
5	2023	516	344	6	6	0	0
6	2024	283	257	7	1	0	0
7	2025	310	208	11	0	81	10

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung

Sedangkan untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga setelah tersusunnya Peraturan daerah Bangunan Gedung Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2015, belum ditindaklanjuti lagi dengan produk hukum turunannya berupa Peraturan Bupati Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Sistem Informasi Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan diperlukan inventarisasi terkait kondisi bangunan gedung yang dipersyaratkan dan tim ahli yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum ditindaklanjuti ke dalam

implementasi Peraturan Bupati. Namun, dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka diperlukan penyusunan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Perda Bangunan Gedung.

Tabel 2. 75
Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Dok	1	2	3	5	5
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	Buah	92,22	92,99	95,29	94,49	93,2
3	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Dok	0	0	0	0	0
4	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	Persen	60	50	49,25	52,35	53,13

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Nilai indeks IKLH dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen utama kehidupan mempunyai peran penting dalam pengukuran IKLH. Adapun parameter dalam indeks-indeks pendukung pengukuran IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 76
Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO2	0,405	
		NO2		

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
2.	Kualitas Air	TSS	0,376	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total Coliform		
3.	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0,219	

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas, IKLH dipengaruhi oleh 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu : SO₂ dan NO₂, 0,376 dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu : TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal – Coli, dan Total Coliform, serta 0,219 dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter yang diukur yaitu : Luas Hutan.

Hasil evaluasi pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* mendapatkan nilai sebesar 71,37 atau capaian sebesar 105,34% dengan kategori Sangat Baik. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 77
Capaian Kinerja sasaran Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,66	66,16	66,87	67,10	67,75	71,37	105,34

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKLH tahun 2025 sebesar 71,37 dari target sebesar 67,75 atau capaian sebesar 105,34%. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,27 dari tahun 2024 sebesar 67,10, dimana pada tahun 2023 IKLH sebesar 66,87. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 67,19, nilai IKU sebesar 79,28, dan nilai IKL sebesar 60,51.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan *Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang berkelanjutan adalah :

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- g. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- j. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- m. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- n. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- o. Program Pengelolaan Persampahan

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan visi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 yaitu **"Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera"**, yang merupakan pernyataan arah pembangunan jangka menengah yang akan dicapai, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **"MEWUJUDKAN PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA"**.

Purbalingga yang Mandiri diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang mampu menjadi kontributor perekonomian yang berdaya saing, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan, dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan kondisi dimana masyarakat sebagai subjek pembangunan terpenuhi kebutuhan dasarnya baik dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun kehidupan sosial budaya yang harmonis. Hasil pembangunan tentunya akan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Tolak ukur keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut yaitu Pendapatan Perkapita (ADHB), Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Tingkat Kemiskinan.

PENDAPATAN PERKAPITA (ADHB)

Pendapatan perkapita (ADHB) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam satu tahun, yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, serta digunakan untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

PDRB per kapita (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Makin besar pendapatan per kapitanya, maka makin besar juga kemungkinan daerah/wilayah memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Tabel 2. 78
Perbandingan antara realisasi 2025 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	25.118.000	26.190.000	28.820.000	32.090.000	35.000.000	34.426.830	98,36

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 2021-2025, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 25.118.000 kemudian meningkat mencapai Rp 32.090.000 di tahun 2024. Pada tahun 2025 sebesar Rp. Rp.4.426.830,- dengan capaian 98,36 persen dari target sebesar Rp. 35.000.000. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita (ADHB) setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2. 79
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.530,02	20.271,87	22.166,47	23.961,84	25.347,32
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	410,00	456,45	505,26	588,33	619,30

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024	2025
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.745,42	1.765,29	1.842,42	1892,95	1.959,46
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.480,25	5.836,78	6.180,38	6.796,51	7.296,89
5.	Perubahan Inventori	806,93	1.016,88	1.036,88	860,19	493,41
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-578,82	- 526,45	-506,87	-741,49	354,50
PDRB (ADHB)		26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33	36.070,88

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

INDEKS KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)

Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Tabel 2. 80
Perbandingan antara realisasi 2025 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,3652	0,3441	0,354	0,314	0,334	0,339	100

TINGKAT KEMISKINAN

Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada 2025 tercatat sebesar **12,55** persen, mengalami penurunan signifikan sebesar 1,63 persen poin dari 14,18 persen pada Maret 2024. Dengan penurunan ini, Purbalingga berhasil keluar dari posisi lima besar kabupaten termiskin di Jawa Tengah, menempati peringkat ketujuh terendah

Hasil evaluasi pada tujuan *Mewujudkan Purbalingga mandiri dan Sejahtera* mendapatkan nilai 112,03% dengan kategori **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 81
Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
-------------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-----------------



Tingkat Kemiskinan	Persen	16,24	15,3	14,99	14,18	14,06	12,55	112,03
--------------------	--------	-------	------	-------	-------	--------------	--------------	---------------

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan fluktuasi. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar 16,24 persen. Pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Tahun 2023 angka kemiskinan menjadi sebesar 14,99 persen atau turun sebesar 0,31 persen dari tahun 2022. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga kembali turun dari 14,88 persen di tahun 2023 menjadi 14,18 persen di tahun 2024. Pada tahun 2025, penurunan kemiskinan di Purbalingga sebesar 1,63 persen menjadi 12,55 persen.

Kemiskinan Purbalingga (12,55%) menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di peringkat yang membaik (sekitar urutan ke-7 dari bawah), keluar dari lima besar termiskin di Jawa Tengah, meskipun tetap memiliki tantangan dan bertujuan mencapai 10% pada RPJMD 2025-2029. Posisi ini lebih baik dari data 2024 (sekitar 14,18%) yang menempatkannya di urutan ke-6 termiskin, dengan penurunan terbaik di Jateng.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-29 dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tidak lepas dari program yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun para filantropis, baik dilaksanakan sendiri maupun sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin adalah dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dijalankan antara lain :

1. Beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah yang mayoritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, program ini dianggarkan sebesar Rp.1.294.950.000,- dengan sasaran sebanyak 1.598 anak.
2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dimana program ini pada tahun 2025 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 251.536 KK. Rumah yang layak huni sebanyak 247.852 68 rumah. Pada tahun 2025 jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab sebanyak 1.201 rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 3.684 rumah. Aktivitasnya rehab RTLH dari APBD Provinsi sebanyak 579 rumah, APBD Kabupaten 5 rumah, dana DD 250 rumah, Baznas 91 rumah, CSR 156 rumah dan BSPD 120 rumah
3. Jambanisasi
Program ini diarahkan untuk penyehatan lingkungan sebagai program preventif di bidang kesehatan lingkungan. Jambanisasi juga merupakan sarana mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
Pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan

masyarakat (UKM) serta kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan untuk meningkatkan mutu lingkungan sehat menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pada tahun 2025, paket stimulan jamban keluarga sejumlah 50 paket untuk 5 (enam) desa yaitu :

- | | |
|--|------------|
| a. Desa Pengadegan Kec. Pengadegan | : 16 paket |
| b. Desa Majasari Kec. Bukateja | : 24 paket |
| c. Desa Karangturi Kec. Mrebet | : 2 paket |
| d. Desa Blater Kec. Kalimanapak | : 4 paket |
| e. Kelurahan Wirasana Kec. Purbalingga | : 4 paket |

4. Rantang berkah

Program Rantang Berkah merupakan pemberian makanan siap santap untuk lanjut usia kurang mampu dan sebatangkara yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dalam seleksi pemilihan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang, yaitu penyeleksian dilakukan oleh penyedia rantang berkah yang dikoordinasikan dengan pihak Desa, kemudian diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Penyedia rantang berkah sendiri merupakan pemilik UMKM berjumlah 27 penyedia. Jumlah penerima rantang berkah sebanyak 510 orang yang diberikan selama 365 hari.

5. Operasionalisasi Rumah Singgah

Rumah Singgah Dharma Perwira Kabupaten Purbalingga diresmikan pada tanggal 8 April 2019. Rumah singgah dapat digunakan untuk persinggahan sementara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang berasal dari Kabupaten Purbalingga maupun dari luar kabupaten. Adapun fasilitas yang dapat dimanfaatkan, 4 shelter untuk perempuan, 4 shelter untuk laki-laki, 2 ruang isolasi untuk perempuan, 2 ruang isolasi untuk laki-laki, 3 kamar mandi, ruang aula, ruang makan, ruang kesehatan, ruang konseling dan tempat parkir.

6. Bantuan Sosial kepada anak yatim

Bantuan anak yatim piatu diberikan kepada 5.000 anak, dimana masing-masing anak mendapatkan Rp.200.000,- dengan jumlah anggaran Rp.1.000.000.000,-.

7. Bantuan orang dengan kecacatan berat

Bantuan untuk orang dengan kedisabilitas berat (ODKB) diberikan secara rutin selama 12 bulan yang diberikan kepada 300 anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.080.000.000 Bantuan tersebut diberikan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan atau membantu kebutuhan disabilitas berat, sehingga kehidupannya dapat lebih baik.

8. Jaminan kesehatan keluarga miskin

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk



miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS.

Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp28.061.966.600,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp26.966.381.200,- dan Rp1.095.585.400,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBU dan BP kelas 3. Sedangkan Capaian *Universal Health Coverage* (UHC) pada Desember tahun 2025 sebesar 100,14% dari total penduduk di Kabupaten Purbalingga, dimana 79,17% diantaranya adalah peserta aktif.

9. Usaha Mikro Naik kelas

Program ini mendorong agar usaha mikro naik kelas. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan tenaga pendamping UMKM di setiap kecamatan, melakukan kerjasama dengan LIPI untuk alih teknologi, pelatihan teknis, fasilitasi teknologi dan kewirausahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Hibah Bagi Paguyuban UMKM, sebesar Rp.1.312.000.000,- digulirkan untuk 54 pelaku UMKM .
- Pelatihan UMKM kepada 54 pelaku yang dilakukan sebanyak 10 kali.

10. Kartu Tani

Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses petani pada pupuk bersubsidi guna mendukung program ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Secara filosofis, program ini dilandasi akan pentingnya menjamin produksi dan produktivitas komoditas pertanian, mendukung program ketahanan pangan, dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang.

Manfaat Kartu tani yang diberikan petani adalah :

- Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi;
- Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara);
- Kemudahan akses pembiayaan (KUR);
- Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
- Biaya simpanan lebih ringan;
- Mendapatkan program Prona (BPN);
- Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop);
- Kemudahan mendapatkan bansos.

Jumlah kartu tani yang tercetak 49.125 kartu tani. Kartu tani yang sudah terdistribusi di Kabupaten Purbalingga sebanyak 49.051 kartu tani sedangkan yang belum terdistribusi sebanyak 74 kartu tani. Kartu tani yang digunakan 28.187 kartu tani. Kartu tani yang digunakan Kabupaten Purbalingga sebesar 57,78 % di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 68,87 persen menempati ranking 26 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah pennebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani urea sebesar 10.399.989 kg dan NPK sebesar 9.839.415kg

11. Tuka Tuku Produk Purbalingga

TUKA-TUKU adalah sebuah platform yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pemasaran produk UMKM. TUKA-TUKU akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, terutama pasar on line. Tuka-Tuku menyediakan personel untuk membantu branding produk yang ditampilkan antara lain membantu foto, editing, deskripsi produk dan pemasaran produk serta melakukan live streaming di Media Sosial untuk memperluas pemasaran produk Usaha Mikro. Hasil yang dicapai :

- Sampai saat ini program tuka tuku telah ada 63 item barang. Barang-barang tersebut sudah melalui kurasi dan branding
- Omset pada tahun 2025 sebesar Rp.106.004.000,-

12. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. Syarat untuk dapat tinggal di Rusunawa Kabupaten Purbalingga adalah WNI penduduk Kabupaten Purbalingga yang dikhususkan bagi pekerja pabrik, masyarakat berpenghasilan rendah (kurang dari Rp.8.000.000-), belum memiliki rumah dan mengisi formulir pendaftaran sesuai ketentuan. Jumlah Penghuni Rusunawa pada tahun 2025 adalah sebanyak 47 kepala keluarga.

13. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TPID adalah :

- a. Peningkatan kualitas koordinasi tim pengendali inflasi daerah, mendorong struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- b. Perbaikan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat.
- c. Peningkatan kegiatan operasi pasar khususnya operasi pasar bahan pokok masyarakat.
- d. Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi
- e. Penyusunan laporan hasil analisis permasalahan ekonomi sektor riil untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian pangan di daerah.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tujuan didukung oleh capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN :
TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN INKLUSIF



PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2. 82
Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,19	5,41	4,51	4,55	4,5	5,92	131,56

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,92 atau 131,56% dari target yang ditentukan sebesar 4,5. Capaian 2025 meningkat 1,37 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,55. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2021–2025, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Konstruksi sebesar 7,09%, Jasa lainnya sebesar 8,10%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,63%. Pada beberapa sektor lapangan usaha perekonomian Kabupaten Purbalingga mengalami pemulihan dan penguatan pada sebagian besar sektor usaha, dengan beberapa sektor seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan hingga mencapai 5,92 persen pada tahun 2025.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 28,29 persen atau sekitar Rp.33,357 milyar. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kab. Purbalingga dari sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 28,14 persen atau sekitar Rp.9,386 Milyar. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan 25,76 persen atau sekitar Rp.8,592 Milyar dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 12,50 persen atau sekitar Rp.4,169 Milyar. Selama kurun waktu tahun 2021-2025, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp.26.190 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 34.430.000 milyar pada tahun 2025. Sedangkan dilihat dari

perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 17.731,44 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 21.626,94 milyar pada tahun 2025. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.994,83	8.433,03	9.291,41	4.697,49	4.785,07	5.097,24
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.226,14	1.258,70	1.305,20	726,29	748,64	763,58
C.	Industri Pengolahan	8.832,36	9.430,94	10.151,13	726,29	748,64	5.726,67
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	15,15	16,77	17,60	12,99	14,22	14,82
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,99	34,01	35,03	24,23	25,64	25,41
F.	Konstruksi	1.979,67	2.228,69	2.430,79	1.230,55	1.363,95	1.460,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.934,08	4.218,88	4.508,87	2.693,50	2.837,55	2.972,29
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.263,22	1.332,58	1.444,16	870,68	909,13	417,25
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	829,56	873,13	979,93	613,11	636,20	971,43
J.	Informasi dan Komunikasi	619,95	665,72	708,92	631,25	673,37	714,88
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	680,40	705,34	745,35	402,97	405,60	417,25
L.	Real Estate	309,83	330,62	340,32	243,53	255,70	259,57
M.N.	Jasa Perusahaan	64,15	70,04	76,44	39,31	42,24	45,22
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726,11	827,18	856,61	475,38	527,76	540,34
P.	Jasa Pendidikan	1.759,79	1.902,08	2.048,51	1.031,77	1.105,04	1.167,21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	338,25	362,40	384,75	226,25	238,51	249,37
R.S.T.U.	Jasa lainnya	621,06	667,22	745,86	439,22	458,59	495,75
PDRB		31.224,55	33.357,33	36.070,88	19.533,86	20.422,61	21.626,94

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Pada tahun 2025 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 36.070,88 sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 21.626,94. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) tahun 2025 pertumbuhan PDRB diatas 5,92 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga pada tahun 2025 pendapatannya rata-rata

lebih dari 5,92 persen. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), pendapatan perkapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar Rp.34.427.000.

Tabel 2. 84
PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33	36.070,88
- ADHK Tahun 2010	17.731,44	18.690,73	19.533,86	20.422,61	21.626,94
Jumlah Penduduk	1.021.920	1.035.959	1.046.474	1.057.750	1.047.755

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Tabel berikut menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 2. 85
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,05	5,23	5,61	4,96	4,96	4,83	102,69

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 6,05 persen, kemudian menurun menjadi 5,23 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sempat mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 persen, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,96 persen. Pada tahun 2025 ditetapkan target TPT sebesar 4,96 persen. Realisasi yang dicapai pada tahun tersebut adalah 4,83 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,69 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi masih sedikit di atas target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran berjalan cukup efektif dan mendekati sasaran yang direncanakan.

Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebesar 612.878 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 583.237 orang dan yang masih menganggur sebanyak 29.581 orang. Dari data diatas, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki. Pengangguran terdiri dari 18.597 orang laki-laki dan 10.984 orang perempuan. Jumlah pengangguran tahun 2025 mengalami sedikit penurunan 132 orang dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 29.713 orang. Data ketenagakerjaan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 86
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	357.799	255.019	612.878
- Bekerja	339.202	244.035	583.237
- Pengangguran Terbuka	18.597	10.984	29.581
Bukan Angkatan Kerja	52.180	148.328	200.508
Total	767.778	658.366	1.426.204
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,27	63,23	75,35
Tingkat Pengangguran	5,20	4,31	4,83
Tingkat Kesempatan Kerja	94,80	95,69	95,17

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Program yang mendukung capaian kinerja sasaran *Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif* adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- f. Program Promosi Penanaman Modal
- g. Program Pelayanan Penanaman Modal
- h. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- i. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- j. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- k. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- l. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- m. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- n. Program Pemasaran Pariwisata
- o. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- p. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- q. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- r. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- s. Program Penyuluhan Pertanian
- t. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- u. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- v. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- w. Program Pengembangan Ekspor
- x. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- y. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- z. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- aa. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- bb. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- cc. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- dd. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- ee. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- ff. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- gg. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- hh. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- ii. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- jj. Program Pengelolaan Persampahan
- kk. Program Penataan Desa
- ll. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- mm. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- nn. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- oo. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- pp. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- qq. Program Penanggulangan Bencana
- rr. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- ss. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- tt. Program Penempatan Tenaga Kerja
- uu. Program Hubungan Industrial
- vv. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- ww. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- xx. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- yy. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- zz. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- aaa. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- bbb. Program Pengembangan Umkm.

SASARAN : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKUALITAS

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah pada tahun 2025 sebesar 71,85 dari target yang ditetapkan sebesar 82,275, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 87,32 persen. Capaian tersebut meningkat 12,715 point dari capaian tahun 2024 sebesar 69,56.

**Tabel 2. 87
Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	81,88	80,70	81,94	69,56	69,01	71,85	104,12

Sumber : DPUPR Kabupaten Purbalingga

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi jika dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur PUPR pada periode pelaporan tercatat sebesar 56,07. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat mencapai kondisi yang lebih optimal. Nilai indeks tersebut mencerminkan tingkat pemenuhan layanan infrastruktur dasar kepada masyarakat yang meliputi aspek infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi, perumahan, serta penataan permukiman.

Capaian indeks ini menggambarkan bahwa sebagian layanan infrastruktur telah tersedia dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain dari sisi kualitas layanan, cakupan pelayanan, pemerataan akses, serta keberlanjutan pengelolaan infrastruktur. Tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, serta perlunya peningkatan

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur PUPR pada periode mendatang, diperlukan penguatan strategi pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, optimalisasi pemeliharaan aset, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan terkait. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas layanan infrastruktur kepada masyarakat dapat terus meningkat secara bertahap, merata, dan berkelanjutan. Pengukuran indeks ini umumnya didasarkan pada beberapa komponen utama, antara lain:

- a. **Kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan**, yang mencerminkan kondisi jalan serta tingkat kemantapan jaringan jalan.
- b. **Layanan sumber daya air**, yang meliputi ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur pengairan serta pengendalian daya rusak air.
- c. **Akses air minum layak**, yang menunjukkan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan air minum.
- d. **Akses sanitasi layak**, yang mencerminkan kualitas layanan sanitasi bagi masyarakat.
- e. **Kualitas perumahan dan kawasan permukiman**, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas hunian.

Tabel 2. 88
Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR

No	Indikator	Realisasi
1	Indeks Jalan Mantap	72.15
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	73.75
3	Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak	66.03
4	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi Tertib Usaha	57.14
5	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	79
6	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	43.36
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1.04
Rata Rata		56.07

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan disusun berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu sebagai berikut:

- a. **Ketersediaan dan kondisi prasarana transportasi jalan** – nilai **62,0**
Indikator ini menggambarkan kondisi dan kelayakan prasarana jalan yang mendukung kelancaran lalu lintas serta mobilitas masyarakat.

- b. **Kualitas sarana dan prasarana perlengkapan jalan** – nilai **59,5**
Indikator ini mencerminkan ketersediaan dan kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.
- c. **Kualitas pelayanan transportasi umum** – nilai **58,7**
Indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan transportasi umum dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan terjangkau.
- d. **Tingkat keselamatan dan ketertiban lalu lintas** – nilai **61,8**
Indikator ini menggambarkan kondisi keselamatan lalu lintas yang tercermin dari upaya pengendalian, pengawasan, serta manajemen lalu lintas di wilayah daerah.

Tabel 2. 89
Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan

No	Indikator Penilaian	Nilai Indikator	Keterangan
1	Ketersediaan dan kondisi prasarana transportasi jalan	62,0	Menggambarkan kondisi jaringan jalan serta kelayakan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat
2	Kualitas sarana dan perlengkapan jalan	59,5	Meliputi ketersediaan rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan fasilitas keselamatan lalu lintas
3	Kualitas pelayanan transportasi umum	58,7	Menggambarkan tingkat pelayanan transportasi umum dari aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keterjangkauan
4	Tingkat keselamatan dan ketertiban lalu lintas	61,8	Menggambarkan kondisi keselamatan lalu lintas serta efektivitas pengelolaan dan pengawasan lalu lintas
Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan		60,5	

Secara umum, capaian nilai pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal pemeliharaan prasarana transportasi, penyediaan perlengkapan jalan yang memadai, serta peningkatan manajemen dan keselamatan lalu lintas.

V/C Rasio jalan di Kabupaten Purbalingga sebesar 0,49 persen. hal tersebut dapat diartikan bahwa arus stabil, namun kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi. Pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan. Pada umumnya kondisi jalan Purbalingga masih bisa dikategorikan stabil. Kepadatan terjadi pada saat pagi hari, dimana penduduk akan memulai aktifitasnya dan pada sore hari pada saat pulang dari melakukan aktifitas. Ketika jam sibuk pagi dan sore hari, arus lalu lintas akan ramai lancar sedangkan pada siang hari arus lalu lintas normal seperti biasa lagi. V/C Rasio Purbalingga

pada kisaran (0,45 - 0,74) yang berarti Purbalingga masuk dalam Tingkat Pelayanan C, Faktor Ukuran Kota (Fcs) Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, dengan Batas Lingkup V/C 0,45 - 0,74.

Berdasarkan hasil survey melalui data Sample sebanyak 89 ruas jalan Kabupaten Purbalingga mendapat angka untuk Volume kendaraan sebanyak 66.995,25 dan Kapasitas Jalan sebanyak 214.201. Survei jalan dilakukan pada jalan-jalan yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, sedang dan rendah. Survei juga dilakukan pada waktu arus lalu lintas yang sibuk dan lengang.

Program yang mendukung Sasaran *Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas* adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Penataan Bangunan Gedung
- e. Program Penyelenggaraan Jalan
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- g. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- h. Program Penatagunaan Tanah
- i. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- j. Program Pengembangan Perumahan
- k. Program Kawasan Permukiman
- l. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

SASARAN : TERWUJUDNYA KUALITAS MANUSIA YANG UNGGUL

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan penjelasan kemampuan penduduk untuk menikmati pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah 25+ dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut capaian IPM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan 2025.

Tabel 2. 90
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	65,15	69,54	70,24	70,97	71,63	71,71	100,11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 65,15 di tahun 2021 menjadi 71,71 pada tahun 2025. Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,77. IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 71,71 atau mengalami kenaikan sebesar 0,74 point dibanding tahun 2024 yang sebesar 70,97. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 30 masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 91
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Purbalingga 2016 – 2024

Komponen IPM	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,21	73,28	73,34	74,49	74,48
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12	12,01	12,02	12,03	12,11
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,25	7,33	7,34	7,36	7,37
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah/ orang/ tahun)	10.032	10.277	10.964	11.343	11.949

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui berbagai aspek layanan dan aktivitas literasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui perpustakaan daerah dan perpustakaan desa/kelurahan. IPLM mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas literasi, pemanfaatan perpustakaan, serta dukungan program literasi di masyarakat.

Pada Tahun 2025, **IPLM Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 70,33**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Purbalingga berada pada **kategori sedang menuju tinggi**, yang menggambarkan bahwa akses terhadap layanan perpustakaan dan aktivitas literasi masyarakat sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 adalah 63. Nilai nilai tersebut dapat dipahami sebagai gambaran agregat kondisi pembangunan pemuda pada seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Nilai IPP 63 dalam kerangka analisis non-parametrik deskriptif, estimasi nilai IPP Kabupaten Purbalingga tidak diturunkan melalui perhitungan matematis, melainkan melalui penalaran komparatif dan kontekstual terhadap karakteristik sosial-ekonomi wilayah.

Sebagai salah satu kabupaten non-metropolitan di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga memiliki ciri pembangunan pemuda yang berada pada spektrum menengah, dengan kekuatan pada modal sosial, partisipasi komunitas, serta sektor ekonomi kreatif berbasis lokal, namun masih menghadapi keterbatasan pada dimensi kesempatan kerja formal, akses pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan pemuda yang setara dengan wilayah perkotaan besar.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mendasari perhitungan dari Tenaga ahli CV Read's Consultan tentang Analisis Indeks Pembangunan Olahraga / Sport Development. IPO Kabupaten Purbalingga yang diterbitkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,435. Skor tersebut termasuk dalam kategori rendah dalam skala 0 s.d 1 yang meliputi (0-0,499 rendah; 0,500-0,799 menengah; 0,800-1 tinggi).

Skor IPO diukur mendasari 9 dimensi dengan indeks masing-masing dimensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 92
Dimensi penilaian Indeks Pembangunan Olahraga

No.	Dimensi	Nilai Aktual	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Indeks Dimensi
1.	Literasi Fisik	72,3016	0	100	0,723



No.	Dimensi	Nilai Aktual	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Indeks Dimensi
2.	Partisipasi	51,9907	0	100	0,520
3.	Perkembangan Personal	58,8272	0	100	0,588
4.	Kesehatan	64,6296	0	100	0,646
5.	Ekonomi	53,3565	0	100	0,534
6.	Kebugaran	27,4185	20,1	52,1	0,229
7.	SDM Olahraga	0,0012	0	0,005	0,242
8.	Ruang Terbuka	1,2154	0	3,5	0,347
9.	Performa Olahraga	19,6111	0	233	0,084
Indeks SDI					0,435

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan sistem pengukuran yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. IHaI berfungsi sebagai alat evaluasi yang menggambarkan sejauh mana keseimbangan, kerukunan, dan keberlanjutan sosial tercapai di masyarakat, dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik lokal serta tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah.

Terdapat 4 (empat) dimensi utama yang menjadi dasar pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yakni :

- Dimensi Ekonomi,
- Dimensi Sosial,
- Dimensi Budaya,
- Dimensi Agama

Angka Harapan Hidup (UHH)

Pada tahun 2025, Angka Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 74,48. Ketercapaian angka harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Angka tersebut menurun 0,01 dari capaian tahun 2024 sebesar 74,49 tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 74 tahun 05 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata – rata 75,24 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian UHH nasional yaitu sebesar 74,47 tahun.

Grafik 2. 12
Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025



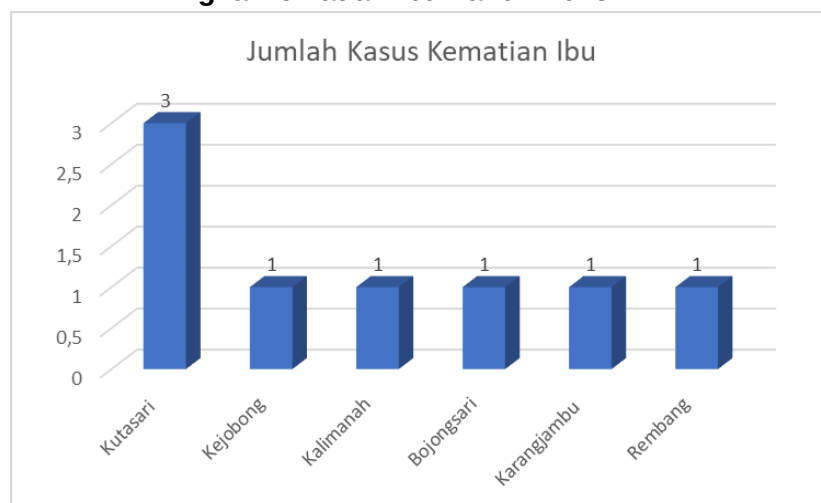
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

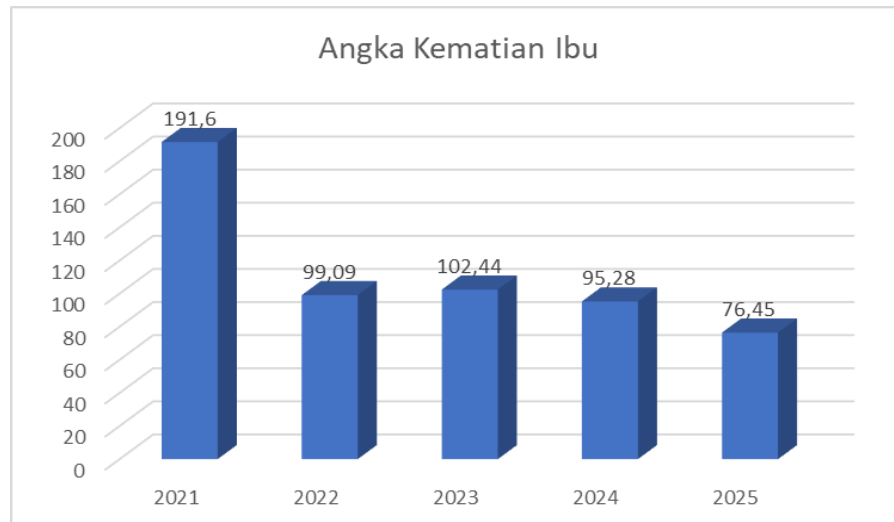
Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebesar 76,45 per 100.000 KH dengan 8 kasus kematian ibu. AKI di Purbalingga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan 11 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Kutasari sebanyak 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Kejobong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Bojongsari, Puskesmas Karangjambu dan Puskesmas Rembang.

Grafik 2. 13
Angka Kematian Ibu Tahun 2025



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

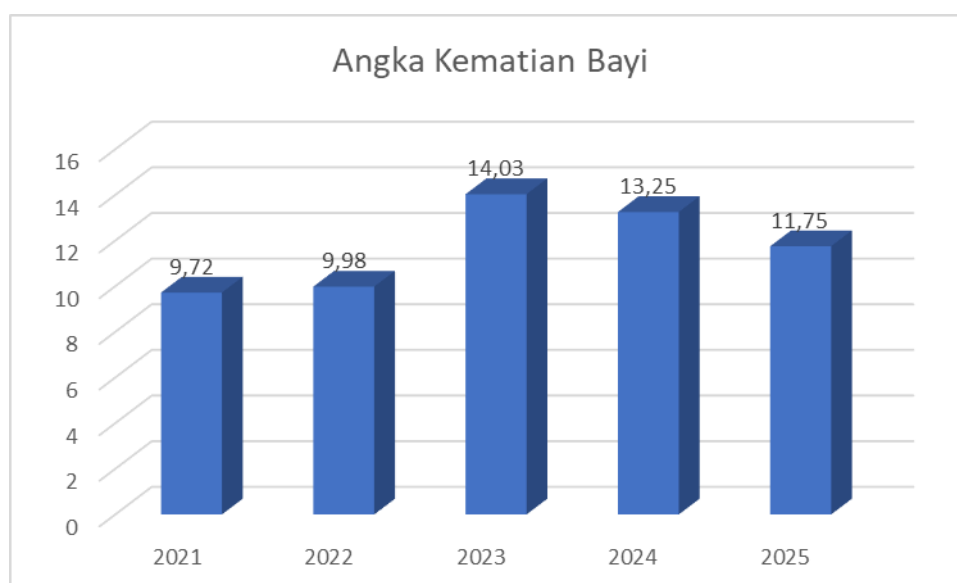
Grafik 2. 14
Trend Kematian Ibu Tahun 2021 – 2025



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Penyebab kematian ibu adalah disebabkan karena Perdarahan ada 4 kasus diikuti karena komplikasi Non Obstetrik 4 kasus. Tempat kematian 8 kasus di Rumah Sakit. Sebanyak 4 kasus meninggal di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata, 3 kasus meninggal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan 1 kasus meninggal di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu.

Grafik 2. 15
Tren Angka Kematian Bayi Tahun 2021 – 2025



Penyebab kematian bayi yang terjadi pada usia 0-28 hari diantaranya BBLR sebanyak 4 kasus, Prematur sebanyak 32 kasus, Asfiksia sebanyak 13 kasus, Sepsis sebanyak 7 kasus, Infeksi sebanyak 1 kasus, Kelainan kongenital sebanyak 9 kasus, kelainan cardiovascular sebanyak 10 kasus dan lain-lain (RDS, kongenital pneumonia, dll) sebanyak 15 kasus.

Penyebab Kematian bayi pada usia 29 hari sampai dengan 11 bulan diantaranya kondisi perinatal sebanyak 3 kasus, Pneumonia sebanyak 2 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 5 kasus, kelainan kongenital lain sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 5 kasus, infeksi sebanyak 4 kasus, dan lain-lain (sepsis, ISPA, epilepsy, dll) sebanyak 12 kasus.

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 12,71 per 1.000 kelahiran hidup atau sejumlah 133 kasus. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2024 dengan Angka Kematian Balita sebesar 15,76 per 1.000 KH dengan 182 kasus kematian.

Penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh Pneumonia sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 1 kasus, penyakit syaraf sebanyak 1 kasus, penyebab lainnya sebanyak 5 kasus diantaranya disebabkan oleh sepsis, meningitis, radang paru-paru, Neoplasma Maligna ginjal, mual dan muntah.

Tabel 2. 93
Angka kematian Balita

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr-11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
1	Puskesmas Kemangkon	4	2	0	6
2	Puskesmas Bukateja	3	2	0	5
3	Puskesmas Kutawis	6	1	0	7
4	Puskesmas Kejobong	3	2	0	5
5	Puskesmas Pengadegan	3	1	2	6
6	Puskesmas Kaligondang	4	1	1	6
7	Puskesmas Kalikajar	2	0	0	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	3	0	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	6	1	1	8
11	Puskesmas Padamara	7	1	1	9
12	Puskesmas Kutasari	4	2	0	6
13	Puskesmas Bojongsari	7	2	1	10

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr-11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
14	Puskesmas Mrebet	3	3	0	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	5	3	0	8
16	Puskesmas Bobotsari	5	1	1	7
17	Puskesmas Karangreja	1	2	1	4
18	Puskesmas Karangjambu	8	0	0	8
19	Puskesmas Karanganyar	2	5	1	8
20	Puskesmas Karangtengah	4	0	0	4
21	Puskesmas Karangmoncol	3	2	0	3
22	Puskesmas Rembang	6	2	1	7
Jumlah		91	32	10	133

Grafik 2. 16
Tren Angka Kematian Balita Tahun 2021-2025



3. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)

Definisi Operasional Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah persentase Puskesmas dengan indeks SPM Hipertensi dan DM >80%, angka depresi pada usia ≥ 15 tahun tidak lebih dari 1 % dan peraturan kepala daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Seluruh Puskesmas memiliki Capaian SPM Hipertensi dan DM sebesar 100% dan Angka Depresi pada usia ≥ 15 tahun di seluruh Puskesmas yaitu <1%, sehingga Realisasi Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purbalingga sebesar 100%.

Untuk Indikator peraturan kepala daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tertuang pada Peraturan Bupati No.42 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

4. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)

Definisi operasional Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) adalah Puskesmas yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB >90% penemuan TB >90% dan minimal 2 dari ODHIV dalam pengobatan ARV yang dites viraload dengan hasil Viraload (VL) dengan hasil tersupresi 95%, eradikasi frambusia, eliminasi malaria

Tabel 2. 94
Capaian Pengobatan dan Penemuan Tuberkulosis, ODHIV VL Tersuspensi 95% di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Puskesmas	Pengobatan TB >90%	Penemuan TB >90%	Minimal 2 ODHIV VL Tersuspensi 95%
1	2	3	4	5
1	Kemangkon	111%	32%	0
2	Bukateja	114%	39%	0
3	Kutawis	105%	43%	0
4	Kejobong	96%	34%	0
5	Pengadegan	104%	24%	2
6	Kaligondang	139%	27%	0
7	Kalikajar	108%	39%	0
8	Purbalingga	113%	41%	1
9	Bojong	100%	69%	0
10	Kalimanah	129%	35%	0
11	Padamara	100%	23%	6
12	Kutasari	108%	41%	0
13	Bojongsari	100%	43%	0
14	Mrebet	128%	36%	0
15	Serayu Larangan	105%	51%	0
16	Bobotsari	106%	78%	0
17	Karangreja	94%	26%	0
18	Karangjambu	113%	53%	1
19	Karanganyar	85%	38%	0
20	Karangtengah	121%	44%	0
21	Karangmoncol	108%	33%	0
22	Rembang	107%	52%	0

Hampir semua Puskesmas memenuhi target pengobatan lebih dari 90% kecuali Puskesmas Karanganyar yang hanya mencapai 85%. Untuk inidkator penemuan TB tidak ada Puskesmas yang memenuhi target penemuan kasus TBC lebih dari 90%. Semua Puskesmas tidak memenuhi indikator penemuan kasus TBC lebih dari 90% dikarenakan belum semua indeks kasus dilakukan investigasi kontak dan kegiatan aktif *case finding* menggunakan *portable X-ray* belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan alat

5. Indeks Kesehatan Keluarga Tingkat Kabupaten

Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga dilakukan melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Capaian PIS-PK pada tahun 2025 mencapai angka 0,65 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,62 maka terdapat kenaikan angka IKS sebanyak 0,3. Dengan capaian rata IKS yaitu 0,65 maka Kabupaten Purbalingga mencapai status pra sehat. Capaian IKS tertinggi pada Puskesmas Kemangkong dengan IKS 0,81 dan terendah di Puskesmas Mrebet dengan IKS 0,38

6. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang dimaksud dalam hal ini adalah Apotek, Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas, Instalasi Farmasi di Rumah Sakit dan Industri Rumah Tangga. Industri Rumah Tangga yang dimaksud adalah industri yang baru dibuka pada tahun 2025

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 terdapat 122 Apotek, 9 Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, 23 Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas dan 144 Industri Rumah Tangga. Dari total 297 fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman sebanyak 255 yang memenuhi standar terdiri dari 122 Apotek, 9 Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, 22 Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas dan 103 Industri Rumah Tangga. Pada tahun 2025, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian serta sarana produksi makanan dan minuman. Secara umum, sebagian besar fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana makanan dan minuman telah memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, capaian indikator belum sepenuhnya optimal karena beberapa Industri Rumah Tangga (IRT) belum semuanya memenuhi standar, Sebanyak 41 Industri Rumah Tangga tidak memenuhi standar dikarenakan dokumen persyaratan tidak terpenuhi dan rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Sebanyak 1 lintas cluster ruang farmasi di Puskesmas belum memenuhi standar karena baru beroperasi pada bulan Desember 2025.

7. Prevalensi Stunting

Terdapat dua sumber data prevalensi stunting, yaitu ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Data ePPGBM merupakan data by name by address balita yang dilaporkan secara real time setiap bulan oleh puskesmas, sedangkan SSGI/SKI merupakan survei nasional yang dilaksanakan secara berkala dengan metode sampling. Berdasarkan data ePPGBM tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 12,1% meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,34%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei nasional, prevalensi stunting Kabupaten Purbalingga

mengalami penurunan dari 26,0% pada SKI tahun 2023 menjadi 22,3% pada SSGI tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan survei nasional.

Hasil pemantauan pertumbuhan melalui ePPGBM tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 57.318 balita (96,5%) telah dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan. Hasil pemantauan pertumbuhan menunjukkan bahwa permasalahan gizi masih cukup tinggi, yaitu terdapat 6.950 balita (12,1%) stunting, 2.369 balita (4,1%) underweight atau berat badan kurang menurut umur, dan 5.703 balita (9,9%) wasting atau berat badan kurang menurut tinggi badan.

Peningkatan prevalensi stunting pada data ePPGBM antara lain dipengaruhi oleh perbaikan kualitas pengukuran antropometri melalui peningkatan kapasitas kader, sehingga pengukuran panjang/tinggi badan menjadi lebih valid. Selain itu, peningkatan cakupan pengukuran bulanan serta masih adanya faktor risiko seperti praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal, penyakit infeksi, serta ketahanan pangan keluarga juga turut berkontribusi terhadap peningkatan angka prevalensi stunting.

Faktor determinan stunting tertinggi berdasarkan hasil pendataan tahun 2025 meliputi:

- a. Lingkungan keluarga dengan kebiasaan merokok (85,5%);
- b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (35,3%);
- c. Riwayat masalah kesehatan ibu hamil (17,2%);
- d. Penyakit penyerta (16,7%);
- e. Kepemilikan jamban sehat (4,6%);
- f. Status imunisasi (3,1%);
- g. Akses air bersih (0,6%);
- h. Kecacingan (0,05%).

Program yang mendukung keberhasilan Sasaran *Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul* adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengembangan Kebudayaan
- e. Program Pembinaan Sejarah
- f. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- g. Program Pengelolaan Permuseuman
- h. Program Pembinaan Perpustakaan
- i. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- j. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- k. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- l. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- m. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- n. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- o. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- p. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- q. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- s. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- t. Program Pemberdayaan Sosial
- u. Program Rehabilitasi Sosial
- v. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- w. Program Penanganan Bencana
- x. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- y. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- z. Program Perlindungan Perempuan
- aa. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- bb. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- cc. Program Perlindungan Khusus Anak
- dd. Program Pengendalian Penduduk
- ee. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada instansi yang memberikan penugasan. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah atas APBN yang digunakan untuk kegiatan Tugas Pembantuan.

Tujuan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya. Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1) Urusan Pertanian

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purbalingga untuk urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperbarui menjadi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian



Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA- 018.08.4.039158/2025, tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian diperbarui dalam DIPA Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.13.4.691347/2025, tanggal 18 Juli 2025.

Program yang dilaksanakan adalah Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND). Kegiatan UPLAND adalah kegiatan integrasi kapulaga dan kambing yang berlokasi di 8 desa di Kecamatan Karangmoncol dan 8 desa di Kecamatan Rembang. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada kegiatan ini ditujukan untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan UPLAND di Kabupaten Purbalingga.

Anggaran Tugas Pembantuan urusan pertanian sebagai berikut :

- Sumber Dana : PHLN IFAD dan IsDB
- Jumlah Anggaran : Rp.821.600.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.760.412.800,-
- Presentase : 92,55%

Kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan cukup memadai sehingga tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purbalingga untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, DinsosdaldukKBP3A hanya bersifat pendampingan sehingga tidak mengelola anggaran.

3) Urusan Sosial

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purbalingga untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Program yang dilaksanakan adalah pendampingan penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ; dan tersalurnya Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Ngopeni (Banjamsos KAJEN).

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DinsosdaldukKBP3A hanya bersifat pendampingan sehingga tidak mengelola anggaran.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN

3.1.1. Target Kinerja

a. Urusan Pertanian

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan kepada Kabupaten Purbalingga.

Target Kinerja

Target penerima kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND) adalah 29 Kelompok Tani yang terdiri dari 13 Kelompok Tani di Kecamatan Karangmoncol dan 16 Kelompok Tani di Kecamatan Rembang.

b. Urusan Sosial

Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan kepada Kabupaten Purbalingga.

Target kinerja :

- 1) Tersalurnya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sejumlah 61.120 penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sejumlah 110.986 penerima;
- 2) Tersalurnya Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Ngopeni (Banjamsos KAJEN) kepada 260 penerima x 3 bulan.

3.1.2. Realisasi

a. Urusan Pertanian

Realisasi kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian

Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND) adalah terfasilitasinya kegiatan kepada 29 Kelompok Tani yang terdiri dari 13 Kelompok Tani di Kecamatan Karangmoncol dan 16 Kelompok Tani di Kecamatan Rembang.

b. Urusan Sosial

- Realisasinya adalah diterimkannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sejumlah 61.120 penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sejumlah 110.986 penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan
- Tersalurkannya Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Ngopeni (Banjamsos KAJEN) sejumlah 237 orang x 3 bulan.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Keterangan
1	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Jawa Tengah yang kemudian diperbarui menjadi Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Jawa Tengah	DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA- 018.08.4.0391 58/2025, tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian diperbarui dalam DIPA Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)	Kabupaten Purbalingga (8 desa di Kec. Karangmunc ol dan 8 desa di Kec. Rembang)	Dinas Pertanian Kab. Purbalingga	Rp.821.600.000,-	Rp.760.412.800,-	92,55 %	29 Kelompok Tani sebagai penerima	100%	Tidak ada permasalahan yang dihadapi

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIPA- 018.13.4.6913 47/2025, tanggal 18 Juli 2025									
2	Kementerian Sosial Republik Indonesia	DIPA Kementerian Sosial RI dan Sosial RI dan	Pendampingan penyaluran bantuan PKH	Kabupaten Purbalingga	Dinsosdai dukK BP3A Kabupaten Purbalingga	Rp.0,-	Rp.0,-	0 %	Penyaluran bantuan kepada penerima; PKH 61.120	100%	Tidak mengelola anggaran
			Pendampingan penyaluran BPNT	Kabupaten Purbalingga	Dinsosdai dukK BP3A Kabupaten Purbalingga	Rp.0,-	Rp.0,-	0 %	Penyaluran bantuan kepada penerima BPNT 110.986	100%	Tidak mengelola anggaran
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/422 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni	Penyaluran Banjamsos KAJEN	Kabupaten Purbalingga	Dinsosdai dukK BP3A Kabupaten Purbalingga	Rp.312.000.000,-	Rp.284.400.000,-	91,15 %	Penyaluran Banjamsos KAJEN kepada 237 orang x 3 bulan	91,15 %	- Tidak mengelola anggaran. - Alokasi anggaran yang ada merupakan dana yang dilasurkan kepada penerima.

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN KABUPATEN

3.2.1. Target Kinerja

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Target kinerja
 - a) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga ;
 - b) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana ;
 - c) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Nonformal
- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Penyusunan Profil Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana);
 - b) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
 - c) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; dan
 - d) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

3.2.2. Realisasi

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Realisasi
 - a) Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga ;
 - b) Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana ; dan
 - c) Terimplementasikannya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Nonformal
- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Tersusunnya Profil Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana);
 - b) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;

- c) Terlaksananya pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
dan
- d) Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan KB.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Kabupaten Purbalingga	DinsosdaldukK BP3A	Rp.0,-	Rp. 0,-	0%	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ; a) Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga ; b) Terlaksananya Rapat Pengendalian Program	100%	Tidak mengelola anggaran

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Bangka Kencana ; dan c) Terimplementasi ikannya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Nonformal		
									Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota : a) Tersusunnya Profil Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangka Kencana); b) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem		Tidak mengelola anggaran

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Informasi Keluarga; c) Terlaksananya pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; dan d) Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi implementasi pendidikan kependudukan belum dapat dilaksanakan di semua sekolah di Kabupaten Purbalingga;
- b. Adanya gangguan atau perbaikan pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sehingga input laporan terlambat menunggu aplikasi SIGA dapat digunakan kembali; dan
- c. Terbatasnya kuota Banjamsos KajeN, sehingga setiap kecamatan memiliki daftar tunggu calon Penerima Manfaat; Bantuan KajeN tidak boleh beririsan dengan bantuan pusat lainnya sehingga verifikasi benar-benar harus dilakukan secara cermat.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait Pendidikan Kependudukan ke sekolah-sekolah secara bertahap;
2. Melaksanakan koordinasi ke BKKBN perwakilan provinsi terkait gangguan aplikasi SIGA;
3. Berkoordinasi dengan petugas penginput laporan di Balai KB Kecamatan agar laporan dilaksanakan secara manual terlebih dahulu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. SPM Bidang Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan terdiri dari :

a. Pelayanan Dasar Pendidikan PAUD

Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

b. Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

c. Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan

Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	18.471
No	Jenis Mutu Layanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani

1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	79,62
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	74,46

b. Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pendidikan Dasar	Orang	129.410
No	Jenis Mutu Layanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani
SD			
1	Kemampuan Literasi	Nilai	68,76
2	Kemampuan Numerasi	Nilai	57,67
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,12
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,85
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,38
SMP			
1	Kemampuan Literasi	Nilai	77,92
2	Kemampuan Numerasi	Nilai	67,15
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,59
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,53
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,54

c. Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pendidikan Kesetaraan	Orang	2.418
No	Jenis Mutu Layanan Dasar	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	22,06

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM adalah capaian atas target SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Pendidikan tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	18.471	18.471	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	79,62	79,62	100%
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	74,46	74,46	100%

b. Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pendidikan Dasar	Orang	129.410	129.410	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
	SD				
1	Kemampuan Literasi	Nilai	68,76	68,76	100%
2	Kemampuan Numerasi	Nilai	57,67	57,67	100%
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,12	76,12	100%
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,85	73,85	100%
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,38	59,38	100%
	SMP				
1	Kemampuan Literasi	Nilai	77,92	77,92	100%

2	Kemampuan Numerasi	Nilai	67,15	67,15	100%
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,59	74,59	100%
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,53	74,53	100%
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,54	62,54	100%

c. Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pendidikan Kesetaraan	Orang	2.418	2.418	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	22,06	22,06	100%

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, TK Negeri se-Kabupaten Purbalingga, dan UPT SMP Negeri se-Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :

- Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp.12.499.814.968,- realisasi sebesar Rp.11.297.335.361,- (90,38%);
- Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebesar Rp.36.737.230.098,- realisasi sebesar Rp.35.128.618.816,- (95,62%);
- Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.139.116.000,- realisasi sebesar Rp.136.329.800,- (97,85%).

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan



pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 1.768 orang;
- b. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 7.064 orang;
- c. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Menengah Pertama sebanyak 2.555 orang;
- d. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 225 orang.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Masih banyak anak usia 5 - 6 tahun di Kabupaten Purbalingga yang belajar di lembaga yang tidak terdaftar di Kemendikdasmen maupun Kemenag, sehingga berpengaruh pada perhitungan APS PAUD.
- b. Masih adanya masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang memiliki keterbatasan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Kondisi ekonomi tersebut juga menyebabkan anak-anak usia sekolah (khususnya usia 7-15 tahun) lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah/melanjutkan pendidikan.
- c. Terbatasnya jumlah satuan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau SLB di Kabupaten Purbalingga menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di daerah terpencil/pedesaan serta memiliki keterbatasan ekonomi kesulitan untuk mengakses pendidikan yang sesuai.
- d. Motivasi siswa untuk membaca buku baik fiksi dan non fiksi masih rendah. Selain itu, belum semua Satuan Pendidikan di Kabupaten Purbalingga, baik di SD maupun SMP, tercukupi dengan Buku Teks dan Non Teks yang berkualitas serta bahan dan fasilitas belajar yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi siswa.
- e. Belum optimalnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru di SD dan SMP.
- f. Belum optimalnya peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan (TPPKSP) dan Satgas PPKSP Tingkat Kabupaten dalam pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik serta belum terselenggaranya penyediaan agen perubahan dari unsur siswa untuk pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

- g. Belum optimalnya peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan (TPPKSP) dan Satgas PPKSP Tingkat Kabupaten dalam pencegahan dan penanganan intoleransi serta belum terselenggaranya penyediaan agen perubahan dari unsur siswa untuk memperkuat kebinekaan di satuan pendidikan.
- h. Belum optimalnya peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) Tingkat Kabupaten Purbalingga serta belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus di SD dan SMP.
- i. Belum semua guru SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga mengikuti pendidikan inklusif berjenjang.
- j. Belum semua SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga memiliki sarpras yang ramah disabilitas.

Solusi yang ditempuh adalah :

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar anak usia 5-6 tahun belajar pada lembaga yang memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS), peserta didik rentan putus sekolah, serta peserta didik disabilitas jenjang SD/MI, SMP/MTs dan Kejar Paket A, B, C di Kabupaten Purbalingga melalui program Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS.
- c. Bekerjasama dengan berbagai OPD dalam melakukan pendataan dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) pada setiap desa di Kabupaten Purbalingga.
- d. Menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi/bimtek/workshop yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi guru SD dan SMP dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen pembelajaran yang mengarah ke peningkatan literasi dan numerasi siswa.
- e. Pemberian ruang bagi peserya didik untuk berkreasi meningkatkan kompetensi literasinya.
- f. Melakukan kerjasama lintas OPD dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan kerjasama lintas OPD dalam memberikan sosialisasi maupun pendampingan bagi guru SD maupun SMP untuk menciptakan suasana satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung sekolah berkebinekaan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Kesehatan mengacu pada Standar Teknis Penerapan SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan terdiri dari :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita adalah jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus adalah jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah jumlah warga negara terduga *Tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan.

- I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *Human Immunodeficiency Virus*.

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pelayanan kesehatan bagi penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau secara aktif dikunjungi oleh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif. Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	9.714
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Vaksin tetanus Difteri	Ampul/vial	1.214
2	Tablet tambah darah	Tablet	1.748.520
3	Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	Paket	9.714
4	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9.714
5	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan golongan darah	Paket	9.714
6	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan glukoprotein	Paket	1.457
7	Alat deteksi resiko ibu hamil : Skrinning triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	9.714
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9.714
9	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	9.714
10	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	31
11	Gel USG, untuk puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	757

12	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	216
13	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671
14	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313
15	Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	Orang	192
16	Tenaga kesehatan : tenaga gizi	Orang	53
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan	Orang	9.714

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	10.446
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Formulir Partograf	Formulir	10.446
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.446
3	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	10.446
4	Media promosi komunikasi dan edukasi (KIE)	Paket	31
5	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	216
6	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671
7	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313
8	Tenaga kesehatan : kefarmasian	Orang	192
9	Tenaga kesehatan : tenaga gizi	Orang	53

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	10.337
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal	Vaksin	10.337
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.337
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10.337
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.337
5	Formulir manajemen terpadu balita muda (MTBM)	Formulir	32.103
6	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	10.337
7	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	31

8	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis anak	Orang	209
9	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671
10	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313
11	Tenaga kesehatan : kefarmasian	Orang	192
12	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	37
13	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	53
14	Kader kesehatan	Orang	6.540

d. Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	51.082
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	51.082
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	51.082
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	51.082
4	Vitamin A Biru	Kapsul	9.789
5	Vitamin A Merah	Kapsul	49.702
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.257
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	6.324
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	4.630
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB – Hib	Vaksin	3.270
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Vaksin	1.702
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB – Hib	Vaksin	1.210
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	Vaksin	1.635
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	51.082
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	31
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	237
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
20	Guru PAUD	Orang	1.747

21	Kader kesehatan	Orang	6.540
----	-----------------	-------	-------

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	136.558
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/Buku	136.558
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	136.558
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	136.558
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	22
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	22
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	2.206.880
7	Alat pemeriksaan Hb	Alat	86
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	17.900
9	Media promosi kesehatan	Paket	22
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	7.134
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	227
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	774
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	6.540

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	679.016
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	22
3	Alat : Tensimeter	Unit	22
4	Alat : Glukometer	Unit	22
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	22
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	22
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	22
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	22
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	22
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	93.048
11	Alat Pelayanan KB	Unit	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	22
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	22
	c. Vasektomi set	Unit	9
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/vial	1.048
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.195

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	127.953
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	22
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	22
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	22
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	127.953
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	127.953
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	127.953
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.195

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	237.140
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	22



2	Obat Hipertensi	Paket	22
3	Tensimeter	Unit	22
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	22
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	37
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14.060
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	22
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	22
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	22
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	22
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	22
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192



10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	107

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	2.787
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	22
2	Penyediaan Psikofarmaka	Paket	22
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	22
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	22
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	22
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	2
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	22

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	18.770



No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22
2	Reagen Zn TB	Kit	469
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	704
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	18.770
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	18.770
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	12
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1
8	Tuberkulin	Vial	1.761
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	220
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	107
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	50
15	Kader Kesehatan	Orang	77

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Orang	17.703
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	17.703
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	17.703

4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	17.703
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	218
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	107
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan		4

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 atas target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	9.714	9.714	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Vaksin tetanus Difteri	Ampul/vial	1.214	1.214	100%
2	Tablet tambah darah	Tablet	1.748.520	1.748.520	100%
3	Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	Paket	9.714	9.714	100%
4	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9.714	9.714	100%

5	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan golongan darah	Paket	9.714	9.714	100%
6	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan glukoprotein	Paket	1.457	1.457	100%
7	Alat deteksi resiko ibu hamil : Skrinning triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	9.714	9.714	100%
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9.714	9.714	100%
9	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	9.714	9.714	100%
10	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	31	31	100%
11	Gel USG, untuk puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	757	757	100%
12	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	216	216	100%
13	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671	671	100%
14	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313	1.313	100%
15	Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	Orang	192	192	100%
16	Tenaga kesehatan : tenaga gizi	Orang	53	53	100%

17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan	Orang	9.714	9.714	100%
----	---	-------	-------	-------	------

b. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	10.446	10.446	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Formulir Partograf	Formulir	10.446	10.446	100%
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.446	10.446	100%
3	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	10.446	10.446	100%
4	Media promosi komunikasi dan edukasi (KIE)	Paket	31	31	100%
5	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	216	216	100%
6	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671	671	100%
7	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313	1.313	100%
8	Tenaga kesehatan : kefarmasian	Orang	192	192	100%
9	Tenaga kesehatan : tenaga gizi	Orang	53	53	100%

c. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	10.337	10.337	100%

No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal	Vaksin	10.337	10.337	100%
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.337	10.337	100%
3	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	10.337	10.337	100%
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.337	10.337	100%
5	Formulir manajemen terpadu balita muda (MTBM)	Formulir	32.103	32.103	100%
6	Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	Buku	10.337	10.337	100%
7	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	31	31	100%
8	Tenaga medis : dokter/dokter spesialis anak	Orang	209	209	100%
9	Tenaga kesehatan : bidan	Orang	671	671	100%
10	Tenaga kesehatan : perawat	Orang	1.313	1.313	100%
11	Tenaga kesehatan : kefarmasian	Orang	192	192	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	37	37	100%
13	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	53	53	100%
14	Kader kesehatan	Orang	6.540	6.540	100%

d. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	51.082	51.082	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase

1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	51.082	51.082	100%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	51.082	51.082	100%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	51.082	51.082	100%
4	Vitamin A Biru	Kapsul	9.789	9.789	100%
5	Vitamin A Merah	Kapsul	49.702	49.702	100%
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.257	2.257	100%
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	6.324	6.324	100%
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	4.630	4.630	100%
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	3.270	3.270	100%
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	1.702	1.702	100%
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	1.210	1.210	100%
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1.635	1.635	100%
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	51.082	51.082	100%
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	31	31	100%
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	237	237	100%
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%

20	Guru PAUD	Orang	1.747	1.747	100%
21	Kader kesehatan	Orang	6.540	6.540	100%

e. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	136.558	136.558	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/ Buku	136.558	136.558	100%
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/ Buku	136.558	136.558	100%
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	136.558	136.558	100%
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	22	22	100%
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	22	22	100%
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	2.206.880	2.206.880	100%



7	Alat pemeriksaan Hb	Alat	86	86	100%
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	17.900	17.900	100%
9	Media promosi kesehatan	Paket	22	22	100%
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	7.134	7.134	100%
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	227	227	100%
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192	192	100%
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	774	774	100%
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	6.540	6.540	100%

f. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	679.016	679.016	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	22	22	100%
3	Alat : Tensimeter	Unit	22	22	100%
4	Alat : Glukometer	Unit	22	22	100%
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	22	22	100%
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	22	22	100%
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	22	22	100%
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	22	22	100%
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	22	22	100%
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	93.048	93.048	100%
11	Alat Pelayanan KB	Unit			100%
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	22	22	100%
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	22	22	100%
	c. Vasektomi set	Unit	9	9	100%

12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	100%
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/vial	1.048	1.048	100%
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.195	1.195	100%

g. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	127.953	127.953	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	22	22	100%
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	22	22	100%

3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	22	22	100%
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	127.953	127.953	100%
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	127.953	127.953	100%
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	127.953	127.953	100%
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.195	1.195	100%

h. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
----	--------------------------------------	--------	----------------------------	-----------------------	------------

1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	237.140	237.140	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%
2	Obat Hipertensi	Paket	22	22	100%
3	Tensimeter	Unit	22	22	100%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	22	22	100%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	37	37	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192	192	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%

i. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus



No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14.060	14.060	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	22	22	100%
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	22	22	100%
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	22	22	100%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	22	22	100%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	22	22	100%
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%

9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	192	192	100%
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	53	53	100%
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	107	107	100%

j. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	2.787	2.787	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	22	22	100%
2	Penyediaan Psikofarmaka	Paket	22	22	100%
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	1	1	100%
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	22	22	100%

5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	22	22	100%
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	193	193	100%
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	22	22	100%
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	2	2	100%
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	22	22	100%

k. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	18.770	18.770	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%
2	Reagen Zn TB	Kit	469	469	100%
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	704	704	100%
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	18.770	18.770	100%

5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	18.770	18.770	100%
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	12	12	100%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	100%
8	Tuberkulin	Vial	1.761	1.761	100%
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	220	220	100%
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	192	192	100%
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	100%
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	107	107	100%
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	50	50	100%
15	Kader Kesehatan	Orang	77	77	100%

I. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Orang	17.703	17.703	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	22	22	100%

2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	17.703	17.703	100%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	17.703	17.703	100%
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	17.703	17.703	100%
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	218	218	100%
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	671	671	100%
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.313	1.313	100%
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	107	107	100%
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23	23	100%
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4	4	100%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, UPT Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga, dan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.225.011.000,-, realisasi sebesar Rp.8.477.573.461,- (91,90%), dengan rincian alokasi dan realisasi sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp.2.032.924.000,-; realisasi sebesar Rp.1.996.869.030,- (94,75%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bersalin sebesar Rp.121.700.000,-; realisasi sebesar Rp.60.350.000,- (49,59%);
- c. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp.12.000.000,-; realisasi sebesar Rp.8.210.870,- (68,42%);
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp.18.125.000,-; realisasi sebesar Rp.16.868.540,- (92,61%);
- e. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp.260.660.000,-; realisasi sebesar Rp.244.893.520,- (93,95%);
- f. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp.18.150.000,-; realisasi sebesar Rp.16.108.500,- (88,75%);
- g. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp.11.240.000,-; realisasi sebesar Rp.10.840.000,- (96,44%);
- h. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp.8.200.000,-; realisasi sebesar Rp.8.121.500,- (99,04%);
- i. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus sebesar Rp.8.300.000,-; realisasi sebesar Rp.8.281.500,- (99,78%);
- j. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp.83.091.000,-; realisasi sebesar Rp.70.831.196,- (85,25%);
- k. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp.199.675.000,-; realisasi sebesar Rp.185.323.866,- (92,81%);
- l. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebesar Rp.182.000.000,- realisasi sebesar Rp.174.337.426,- (95,79%).

Selain pada sub kegiatan di atas, anggaran yang mendukung



kegiatan penerapan SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga terinci pada sumber anggaran berikut :

- a. Sumber APBD Kabupaten Purbalingga dari Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan sebesar Rp.6.198.770.000,- ; realisasi sebesar Rp. 5.619.236.513,- (90,65%); dan
- b. Dana Lainnya, CSR dari Global Fund sebesar 70.086.000,- realisasi sebesar Rp.57.301.000,- (81,76%).

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan *antenatal*/ibu hamil sebanyak 2.445 orang;
- b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar sebanyak 2.445 orang;
- c. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan *neonatal esensial*/bayi baru lahir sesuai standar sebanyak 9.021 orang;
- d. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebanyak 10.523 orang;
- e. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar sebanyak 9.793 orang;
- f. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar sebanyak 3.448 orang;
- g. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar sebanyak 3.448 orang;
- h. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar sebanyak 2.482 orang;
- i. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar sebanyak 2.552 orang;
- j. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar sebanyak 239 orang;
- k. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar sebanyak 8.541 orang;
- l. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sesuai standar sebanyak 2.336 orang.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan



pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga antara lain, bayi baru lahir dan usia lanjut, meliputi :

a. Permasalahan pengelolaan pelayanan ibu hamil

Kurangnya informasi pentingnya pemeriksaan atau layanan ANC pada ibu hamil

Solusinya adalah :

Edukasi kepada catin dan PUS, Promosi kesehatan ttg ANC melalui organisasi wanita, media masa, serta koordinasi dengan lintas sektor, Peningkatan kualitas layanan ANC

b. Permasalahan pelayanan ibu bersalin

Deteksi risiko tinggi kehamilan belum optimal sejak ANC

Solusinya adalah :

Meningkatkan edukasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) saat hamil, Skrining dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi secara berkelanjutan

c. Permasalahan pelayanan bayi baru lahir

Deteksi dini komplikasi bayi baru lahir belum optimal

Solusinya adalah :

Penguatan deteksi dini dan tata laksana bayi baru lahir risiko tinggi, Edukasi orang tua tentang perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya neonatal

d. Permasalahan pelayanan balita antara lain :

Pelaksanaan pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) belum optimal

Solusinya adalah :

Penguatan pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

e. Permasalahan pelayanan pendidikan anak usia dasar antara lain :

Sulitnya menemukan sasaran anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah

Solusinya adalah :

Melakukan skrining kesehatan di Posyandu remaja Meningkatkan koordinasi dengan puskesmas dan lintas program Mengoptimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

f. Permasalahan kesehatan usia produktif :

- Belum adanya Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan

- Jadwal layanan Posbindu/Posyandu ILP bersamaan dengan waktu kerja/waktu sekolah
- Keterbatasan BMHP terkait pemeriksaan kolesterol dan asam urat sehingga menurunkan daya tarik masyarakat untuk datang ke Posbindu/Posyandu ILP
- Kurangnya kesadaran masyarakat usia 15-59 tahun untuk melakukan skrining kesehatan

Solusinya adalah :

- Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar secara manual
 - Penyesuaian jadwal layanan Posbindu/Posyandu ILP dengan waktu kerja/waktu sekolah (jemput bola)
 - Pelayanan Posbindu/Posyandu ILP untuk BMHP terkait pemeriksaan kolesterol dan asam urat menggunakan Dana Desa atau secara swadaya masyarakat
 - Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat usia 15-59 tahun untuk melakukan skrining kesehatan
 - Skrining kesehatan usia 15-59 tahun terintegrasi dengan CKG Komunitas
- g. Permasalahan pengelolaan pelayanan orang lanjut usia antara lain :
- Belum semua lansia yang dilayani di lakukan skrining dan pemeriksaan laborat terutama kolestero; karena keterbatasan petugas dan Reagen
- Solusinya adalah :
- Pelaksanaan Mobile Posyandu Lansia bagi lansia yg belum tersekrining , Koordinasi dengan lintas sektoral untuk peningkatan pelayanan pada usia lanjut
- h. Permasalahan pengelolaan pelayanan hipertensi antara lain :
- Belum ada Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi per by Name secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan
 - Target SPM Hipertensi tahun 2025 terlalu tinggi, menggunakan prevalensi hasil survei nasional
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Hipertensi
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan hasil skrining menderita Hipertensi di Posbindu/Posyandu ILP/CKG Komunitas untuk datang ke Puskesmas/ Faskes lain untuk mendapatkan penegakan diagnosa dan pengobatan

Solusinya adalah :

- Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi secara manual
 - Penemuan hasil skrining dengan Hipertensi pada Posbindu, Posyandu ILP, CKG Komunitas dirujuk ke Puskesmas
 - Penyesuaian Target Sasaran Hipertensi pada tahun 2026 menggunakan Perhitungan Hipertensi Diagnosis berdasarkan hasil SKI 2023
 - Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan skrining Hipertensi serta kepatuhan minum obat bagi penderita Hipertensi
- i. Permasalahan pengelolaan pelayanan diabetes mellitus antara lain :
- Belum ada Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Diabetes Melitus per by Name secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Diabetes Melitus
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan hasil skrining menderita Diabetes Melitus di Posbindu/Posyandu ILP/CKG Komunitas untuk datang ke Puskesmas/ Faskes lain untuk mendapatkan penegakan diagnosa dan pengobatan
- Solusinya adalah :
- Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Diabetes Melitus secara manual
 - Penemuan hasil skrining dengan Diabetes Melitus pada Posbindu, Posyandu ILP, CKG Komunitas dirujuk ke Puskesmas
 - Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan skrining Diabetes Melitus serta kepatuhan minum obat bagi penderita Diabetes melitus
- j. Permasalahan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa antara lain :
- Masih terdapat stigma negatif tentang pasien ODGJ dan keluarga di masyarakat
 - Kesadaran keluarga pasien ODGJ untuk mencari pengobatan medis bagi pasien gangguan jiwa masih rendah
- Solusinya adalah :
- Melakukan Edukasi, Sosialisasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat termasuk Anak Sekolah
 - Mengoptimalkan skrining kesehatan jiwa melalui CKG
 - Kolaborasi terkait penanganan ODGJ lintas program dan lintas sektor melalui TPKJM
- k. Permasalahan pengelolaan pelayanan TBC antara lain :
- Masih adanya *missing case* di fasyankes terutama difasyankes non pemerintah / swasta seperti klinik dan DPM (Dokter Praktek

Mandiri)

- Ketersediaan cartridge TCM sebagai tool utama penunjang diagnosa sering mengalami gangguan stok sehingga menunda dan bahkan menghambat jalannya penapisan baik penapisan pada orang terduga TBC maupun penapisan melalui Investigasi Kontak

Solusinya adalah :

- Pertemuan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
- Pelaksanaan pengadaan cartridge TCM di awal tahun

I. Permasalahan pengelolaan pelayanan HIV antara lain :

- Masih banyak kelompok berisiko yang enggan melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) karena takut akan hasil positif
- Ketakutan akan Pengucilan: Stigma ini membuat penderita cenderung menutup diri (merahasiakan statusnya), yang menghambat proses pelacakan kontak (tracing) dan pendampingan.

Solusinya adalah :

- Edukasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan kepada kelompok berisiko tentang manfaat VCT
- Kerja sama dengan LSM, organisasi masyarakat, dan komunitas kunci
- Melaksanakan workshop Public Private Community Partnership yang bertujuan untuk memperluas jejaring layanan HIV di klinik-klinik swasta difasilitasi oleh Global Fund.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan pada peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Target pencapaian pelayanan dasar Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	285
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	57
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	57
3	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	-
4	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	-

b. Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	1.220
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani

1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	244
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	-
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	-
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	244

4.3.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	285	285	100%



No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	57	57	100%
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	57	57	100%
3	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	-	-	100% (tutup mutu layanan)

4	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	-	-	100% (tutup mutu layanan)
---	---	--------------	---	---	------------------------------

b. Realisasi pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	1.220	1.220	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	244	244	100%
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	-	-	100% (tutup mutu layanan)

3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	-	-	100% (tutup mutu layanan)
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	244	244	100%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.987.865.000,-; realisasi sebesar Rp.1.987.865.000,- (94,87%), dengan rincian alokasi dan realisasi sebagai berikut :



Anggaran yang bersumber APBD :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp.568.605.000,-; realisasi sebesar Rp.467.486.055,- (82,22%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp.134.400.000,- realisasi sebesar Rp.133.768.488,- (99,53%);
- c. Alokasi anggaran dari sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp.125.000.000,- realisasi sebesar Rp.124.731.810,- (99,79%).

Anggaran yang bersumber dari Dana Lainnya :

- a. Anggaran CSR (Bank Jateng dan Baznas) sebesar Rp.522.860.000,- sebesar Rp.522.860.000,- (100%); dan
- b. Dana lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp.637.000.000,- realisasi sebesar Rp.637.000.000,- (100%).

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 40 orang Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 20 PNS, 2 PPPK, dan 18 PPPK Paruh Waktu.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yaitu akibat pengaruh iklim / cuaca musim hujan.
- Pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik dalam APBD Perubahan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran, mengakibatkan waktu penyelesaian kegiatan sangat terbatas.

Solusinya adalah :

- Waktu penyelesaian kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca maupun medan pekerjaan diupayakan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan suatu kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan.;
- Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Perumahan Rakyat mendasarkan pada peraturan



teknis yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	16
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	3
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	-

- b. Target pencapaian pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada.

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
----	--------------------------------------	--------	----------------------------

1	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada.	Orang	-
---	---	-------	---

4.4.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	16	16	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	3	3	100%
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1	1	100%
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	100% (tutup mutu layanan)
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	100% (tutup mutu layanan)

b. Realisasi pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada, namun dengan melampirkan data dukung isian penerapan dan pencapaian SPM sehingga tercapai realisasi 100%.

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada.	Orang	-	-	100% (tutup mutu layanan)

4.4.4. Alokasi Anggaran

- Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.93.253.000,- realisasi sebesar Rp.93.253.000,- (100%);
- Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,- (0%);

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 43 orang Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 20 PNS, 2 PPPK, 18 PPPK Paruh Waktu dan 3 orang *Outsourcing*.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Tidak semua memiliki lahan untuk melakukan relokasi bagi korban bencana maupun masyarakat yg berada di lokasi rawan bencana;
- Banyaknya kegiatan pendampingan terkait bantuan sosial baik anggaran pusat maupun provinsi atau dana lainnya.

Solusinya adalah :

- Melakukan verifikasi calon penerima bantuan target penerapan SPM yg memenuhi kriteria berupa lahan guna relokasi;
- Melakukan perbaikan terhadap time schedule sehingga semua kegiatan pada bidang perumahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Trantibumlinmas berdasarkan pada 3 (tiga) peraturan teknis yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibumlinmas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	1.725

No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	10
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	7
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	214
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	-
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	-

b. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	13.544
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk yang sah/legal)		

a	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana		
1)	Sosialisasi melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana		
a	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	786
b	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	30
c	Tersedianya narasumber/fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9
d	Tersedianya penyelenggara sosialisasi	Orang	10
2)	Sosialisasi melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia		
a	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	5
b	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	320
c	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	43
d	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
e	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		
a	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	24
b	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2
c	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
d	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
e	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	52

c. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	200
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		
a	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	1
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Dokumen	1
2	Pembuatan Rencana Kontinjensi		
a	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1
b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	2
c	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40
d	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11
3	Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi		
1)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur		
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	-
d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-
e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
2)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara		
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5

c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	125
d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6
e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
1)	Simulasi dalam Ruangan (Table-Top Exercise)		
a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
c	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15
2)	Gladi Lapang		
a	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
c	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
1)	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365
b	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	12
c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1
d	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
e	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22
2)	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana		
a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	13

b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	8
c	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	41
d	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1
3)	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast		
a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2
b	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan		
a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3
b	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	9

d. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
----	--------------------------------------	--------	----------------------------

1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Respon Cepat Darurat Bencana		
a	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	12
b	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	22
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
a	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2
b	Tersedianya sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	9
c	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5
d	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	12
e	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	12
f	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22
g	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22
h	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22

e. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	1.185
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani

1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	79
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	13
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	30
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	237
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	948

4.5.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	1.725	1.725	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase

1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	10	10	100%
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	7	7	100%

3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	214	214	100%
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	100%
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	-	-	100% (tutup mutu layanan)
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	-	-	100% (tutup mutu layanan)

b. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	13.544	13.544	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk yang sah/legal)				
a	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	100%
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	100%
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana				
1)	Sosialisasi melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
a	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	786	786	100%
b	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	30	30	100%
c	Tersedianya narasumber/fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9	9	100%
d	Tersedianya penyelenggara sosialisasi	Orang	10	10	100%
2)	Sosialisasi melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				

a	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	5	5	100%
b	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	320	320	100%
c	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	43	43	100%
d	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%
e	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%
3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
a	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	24	24	100%
b	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2	2	100%
c	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%
d	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%
e	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	52	52	100%

c. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	200	200	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
a	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	1	1	100%
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Dokumen	1	1	100%
2	Pembuatan Rencana Kontijensi				
a	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100%
b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	2	2	100%
c	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40	40	100%
d	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11	11	100%
3	Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi				
1)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				

a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	-	100% (tutup mutu layanan)
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	-	100% (tutup mutu layanan)
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	-	-	100% (tutup mutu layanan)
d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	-	100% (tutup mutu layanan)
e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	100% (tutup mutu layanan)
f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	100% (tutup mutu layanan)
2)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	125	125	100%
d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100%

e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100%
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1)	Simulasi dalam Ruang (Table-Top Exercise)				
a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100%
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%
c	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100%
2)	Gladi Lapang				
a	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100%
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%
c	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100%
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1)	Koordinasi Teknis Pemanjapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				

a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	100%
b	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	12	12	100%
c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	100%
d	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%
e	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	22	100%
2)	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	13	13	100%
b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	8	8	100%
c	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	41	41	100%
d	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100%
3)	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				

a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%
b	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan				
a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100%
b	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%
b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%
c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%

d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	9	9	100%
---	---	------	---	---	------

d. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50	50	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Respon Cepat Darurat Bencana				
a	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	12	12	100%
b	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	22	22	100%
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
a	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%
b	Tersedianya sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	9	9	100%

c	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5	5	100%
d	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	12	12	100%
e	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	12	12	100%
f	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	22	100%
g	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	22	100%
h	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	22	100%

e. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
----	-----------------------------------	--------	----------------------------	-----------------------	------------

1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	1.185	1.185	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	79	79	100%
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1	1	100%
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	13	13	100%
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	30	30	100%
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	237	237	100%
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	948	948	100%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM



Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar Rp.1.429.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.214.069.635,- dengan perincian target dan realisasi sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.839.827.000,-; realisasi sebesar Rp.689.908.144,- (82,15%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp.34.558.000,-; realisasi sebesar Rp.34.380.000,- (99,48%);
- c. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp.206.868.000,-; realisasi sebesar Rp.204.754.264,- (98,98%)
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp.166.145.000,-; realisasi sebesar Rp.106.658.320,- (64,20%);
- e. Alokasi anggaran Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar Rp.9.350.000,-; realisasi sebesar Rp.9.257.000,- (99,10%); dan
- f. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp.172.952.000,-; realisasi sebesar Rp.169.111.997,- (97,78%).

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah Satlinmas sebanyak 6.100 orang;
- b. Jumlah PPNS sebanyak 2 orang;
- c. Jumlah Satpol PP sebanyak 93 orang (35 PNS, 58 PPPK);
- d. Jumlah Pegawai BPBD sebanyak 38 orang (11 PNS, 3 PPPK, dan 24 PTT);
- e. Jumlah Pusdalops PB sebanyak 22 orang;
- f. Jumlah Petugas Pelayanan Kebakaran sebanyak 32 orang;
- g. Jumlah Relawan Kebakaran sebanyak 0 orang.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Belum adanya MoU (*Memorandum Of Understanding*) antar Perangkat Daerah dalam penanganan angka pelanggaran Perda/Perkada guna penurunan angka gangguan trantibumlinmas;
- b. Belum adanya sinergitas dalam penanganan dan Penegakan Perda dengan Perangkat Daerah yang memiliki Perda yang ditindaklanjuti

dengan Perbup atau Perkada terkait Juknis denda penanganan sanksi bagi yang melanggar Perda;

- c. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai contoh terkait dengan tata ruang dari DPUPR juga belum memiliki PPNS serta masih banyak dinas teknis lainnya seperti Inspektur Inspektorat, Bakeuda, BKSDM, DPMPTSP, Dinperindag, Dinporapar, Dinpermasdes, Dinrumkim, Dinpendukcapil, DKK, Dinnaker, DINSOSDALDUKKBP3A;
- d. Semakin meningkatnya gangguan tibumtranmas yang diakibatkan oleh dinamika perkembangan sosial, ekonomi masyarakat (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, pengamen, orang dengan gangguan jiwa, anak punk);
- e. Belum ada perhatian dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dukungan kesejahteraan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka peran aktif mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan atau Desa.

Solusinya adalah :

- a. *Stakeholder* teknis yang memiliki Perda yang mengandung sanksi menyusun Peraturan Bupati petunjuk teknis terkait pengenaan sanksi dengan melibatkan unsur terkait;
- b. Adanya usulan dari dinas teknis terkait pengiriman peserta Diklat PPNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli kewilayahan antar kecamatan, dengan melakukan pemetaan daerah rawan konflik sosial serta daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Sinergitas Penegakan Perda dan Perkada dengan dinas teknis dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Pemadam kebakaran di masing-masing perusahaan sehingga bisa mengoptimalkan serta dapat meminimalisir akibat kebakaran dan juga mempermudah jaringan simpul penanganan bahaya kebakaran;
- g. Memanfaatkan peta potensi rawan gangguan trantibumlinmas berbasis SIG (Sistem Informasi Geospasial) yang difasilitasi oleh Dinkominfo yang melaksanakan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial serta mengembangkan melalui inovasi

Sipagerbaya.satpolppppurbalinggakab.go.id;

- h. Pemutakhiran data potensi daerah rawan gangguan trantibumlinmas dengan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- i. Perlu dihidupkannya kembali Rapat koordinasi gangguan trantibumlinmas antar *stakeholder* dan juga kecamatan;
- j. Ide Inovasi “Waktu Orientasi Langsung Penegakan Perda Kepada Masyarakat (Wong Ngapak Ya)” melalui kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada;
- k. Penanganan Anak Sekolah melalui Ide Inovasi “Penanganan Atas Gangguan Anak Sekolah Rawan Trantibumtranmas (Pangkas Rambut).”;
- l. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat (Pemuda, Karang Taruna dan Satlinmas), sehingga menjadi masyarakat yang berdaya guna dalam mendukung kinerja Satpol PP di bidang tibuntranmas melalui Inovasi UNIT BIANGLALA (Unit Pembinaan Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar), serta pencegahan, penanganan dan evakuasi bahaya kebakaran dengan membentuk tim reaksi cepat “MANDALIKA (Masyarakat Relawan Pengendalian Kebakaran)” dll.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Sosial mendasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di

luar panti.

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	550
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	85
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60
3	Penyediaan permakanan	Orang	32
4	Penyediaan sandang	Orang	10
5	Penyediaan alat bantu	Orang	49
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	300
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	250
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	85
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6
13	Layanan rujukan	Orang	85

- b. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
----	--------------------------------------	--------	----------------------------

1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	24
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	24
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	24
3	Penyediaan permakanan	Orang	18
4	Penyediaan sandang	Orang	18
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	18
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	18
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	18
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	14
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	18
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	18
12	Layanan rujukan	Orang	16

c. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	760
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	12
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	12
3	Penyediaan permakanan	Orang	12
4	Penyediaan sandang	Orang	12
5	Penyediaan alat bantu	Orang	11
6	Penyediaan perbekalan kesehatan		12
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	510

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanar	Orang	250
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	12
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12
13	Layanan rujukan	Orang	12

d. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	10
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	10
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10
3	Penyediaan permakanan	Orang	10
4	Penyediaan sandang	Orang	10
5	Penyediaan perbekalan kesehatan		10
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10
12	Layanan rujukan	Orang	10

- e. Target pencapaian pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	930
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani
1	Penyediaan permakanan	Orang	930
2	Penyediaan sandang	Orang	58
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	120
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	75
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	38

4.6.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	550	550	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	85	85	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60	60	100%
3	Penyediaan permakanan	Orang	32	32	100%
4	Penyediaan sandang	Orang	10	10	100%

5	Penyediaan alat bantu	Orang	49	49	100%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	300	300	100%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	250	250	100%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	85	85	100%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	100%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	100%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	100%
13	Layanan rujukan	Orang	85	85	100%

b. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	24	24	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	24	24	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	24	24	100%

3	Penyediaan permakanaan	Orang	18	18	100%
4	Penyediaan sandang	Orang	18	18	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	18	18	100%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	18	18	100%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	18	18	100%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	14	14	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18	18	100%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	18	18	100%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	18	18	100%
12	Layanan rujukan	Orang	16	16	100%

c. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	760	760	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase

1	Layanan data dan pengaduan	Orang	12	12	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	12	12	100%
3	Penyediaan permakanan	Orang	12	12	100%
4	Penyediaan sandang	Orang	12	12	100%
5	Penyediaan alat bantu	Orang	11	11	100%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan		12	12	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	510	510	100%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	250	250	100%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	100%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12	100%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	12	12	100%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	12	100%
13	Layanan rujukan	Orang	12	12	100%

d. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	10	10	100%

No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	100%
3	Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100%
4	Penyediaan sandang	Orang	10	10	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan		10	10	100%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	100%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10	10	100%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	100%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	100%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	100%
12	Layanan rujukan	Orang	10	10	100%

e. Realisasi pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar (Bobot 80%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	930	930	100%
No	Jenis Mutu Layanan Dasar (Bobot 20%)	Satuan	Target yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Presentase
1	Penyediaan permakanan	Orang	930	930	100%
2	Penyediaan sandang	Orang	58	58	100%
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	120	120	100%
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	75	75	100%
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	38	38	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2025 sebesar Rp.6.394.337.000,- dan realisasi sebesar Rpxxxxx dengan rincian alokasi dan realisasi sebagai berikut :

1. Anggaran yang bersumber dari APBD
 - a. Alokasi anggaran pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar Rp.6.154.827.000,-; realisasi sebesar Rp.5.719.702.638,- (92,93%);
 - b. Alokasi anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp.137.010.000,- ; realisasi Rp.92.276.900,- (67,35%);
2. Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.102.500.000.- untuk pengadaan alat bantu kursi roda dan realisasi sebesar Rp.102.500.000,- (100%).

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga sejumlah 59 orang yang terdiri dari TAGANA sejumlah 37 orang, Pelopor Perdamaian sejumlah 2 orang, TSKS sejumlah 18 orang, dan Pekerja Sosial sejumlah 2 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Pemohon penerima alat bantu mengajukan belum memiliki persyaratan yang lengkap;
- b. Kurang lengkapnya persyaratan penerima manfaat yang diajukan untuk mendapatkan bantuan;
- c. Kurang lengkapnya data korban dalam format pelaporan kejadian bencana, hingga perlu assessment lebih lanjut untuk menentukan bantuan yang akan diberikan;
- d. Ada beberapa personil TAGANA yang tidak aktif dalam kegiatan, sehingga terkadang kekurangan personil saat terjadi bencana.
- e. Domisili personel TAGANA yang belum merata di setiap wilayah.

Solusinya adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan TSKS untuk menyelesaikan permasalahan;
- b. Bekerjasama dengan TSKS dan TAGANA terdekat dengan lokasi bencana untuk melakukan assssment kebutuhan;
- c. Memperkuat sinergi TAGANA melalui pembinaan dan mengikutsertakan personil jika ada pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mengupayakan rekrutmen TAGANA baru atau TAGANA muda terutama di wilayah Kecamatan yang belum ada TAGANA nya dan memaksimalkan peran TAGANA yang sudah ada.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Pendidikan adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan PAUD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Parasarana dan Utilitas PAUD;
 - Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD;
 - Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD ;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar
- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/ Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/ Nonformal/ Kesetaraan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama;
 - Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Sub Kegiatan bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang / PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan.
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
 - Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan;
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan

intoleransi;

- Sub Kegiatan bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang / PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan.

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

-

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
- Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM



Bidang Pekerjaan Umum adalah :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat;
 - Pengelolaan Kesehatan Lingkungan;
 - Dana CSR;
 - Dana Liannya (bantuan Keuangan dari Provinsi).

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani;
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
 - c. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah

4.7.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Trantibumlinmas adalah :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban



Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota ;
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
2. Program Penanggulangan Bencana
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

4.7.6. Urusan Sosial

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Sosial adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu;
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.
 - b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan ;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang ;
 - Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penanganan Bencana
- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang;
 - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Substansi LPPD ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui berbagai program dan kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dari seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan yang dicapai selama kurun waktu tahun 2025 merupakan partisipasi aktif dari semua komponen Pemerintahan Daerah mulai dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh *stakeholders* yang menjadi *partner* dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat.

Perlu disadari bahwa belum semua aspek pembangunan dapat dilaksanakan secara sempurna dan paripurna. Maka dari itu hubungan yang serasi dan seimbang serta keharmonisan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud dari representasi rakyat Kabupaten Purbalingga, serta dukungan dan kebersamaan seluruh warga masyarakat dalam upaya ikut mewarnai jalannya proses pemerintahan dan turut serta dalam upaya pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan di segala aspek di Kabupaten Purbalingga sangat dibutuhkan pada waktu mendatang.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan komunikasi yang telah berlangsung. Semoga hasil pembangunan yang telah diraih pada

tahun 2025 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan kedepan yang lebih baik. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022 Email
:inspektorat@purbalinggakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVUI

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Purbalingga, 10 Maret 2026



**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

ATO SUSANTO. AP, M.Si.,CGCAE.,CFrA.

Pembina Utama Muda
NIP. 197407061993111001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Onje Nomor 1B Telp. 891012, 891122, 891059, 891452, 891430 fax 891271
PURBALINGGA Kode Pos 53311

Purbalingga, 16 Maret 2026

Nomor : 100/5409/2025/R

Kepada Yth. :

Lampiran : -

Inspektur Inspektorat

Perihal : Tanggapan Atas Catatan Hasil
Reviu LPPD Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025.

Kabupaten Purbalingga

di -

PURBALINGGA

Menindaklanjuti Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700.1.2/028.CHR/2026 R tanggal 10 Maret 2026 Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviu LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dengan hormat disampaikan bahwa terhadap CHR dimaksud akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pula bahwa draft LPPD Kabupaten Purbalingga yang telah diperbaiki sesuai CHR Inspektorat akan dilaporkan kepada Bupati Purbalingga dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah secara tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
Kepala Bagian Pemerintahan


JULI ATMADI, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I
NIP. 19770701 199603 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.